

Katalog BPS: 1303025

PEDOMAN PRAKTIS PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENGHITUNGAN MENURUT PENGGUNAAN



BADAN PUSAT STATISTIK

**PEDOMAN PRAKTIS PENGHITUNGAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA**

**TATA CARA PENGHITUNGAN
MENURUT PENGGUNAAN**

<http://www.bps.go.id>

PEDOMAN PRAKTIS PENGHITUNGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENGHITUNGAN MENURUT PENGGUNAAN

ISBN : 978-979-064-135-8
No Publikasi : 07240.0903
Katalog BPS : 1303025

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : xii + 146

Naskah:
Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak Oleh:
CV. Chandra Abadi

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam dua dekade ini telah tersedia data PDRB tahunan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk menjaga kesinambungan publikasi serta keterbandingannya dari waktu ke waktu diperlukan sebuah pedoman. Memenuhi keperluan tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) mencoba menyusun pedoman penyusunan PDRB kabupaten/kota tata cara menurut penggunaan yang diturunkan dari konsep baku secara internasional, yaitu dari SNA '93 (*System of National Account*) yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Buku pedoman ini berisikan tentang panduan dan tata cara penyusunan PDRB dari sisi penggunaan (*expenditures*). Mengacu pada konsep SNA '93, buku pedoman ini diusahakan untuk terus disempurnakan mengikuti perkembangan zaman dan ketersediaan data. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan agar para penyusun memiliki standar dan prosedur yang sama sehingga hasilnya dapat terbandingkan.

Kepada semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku, diucapkan terima kasih. Saran-saran untuk menyempurnakan buku pedoman ini sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna.

Jakarta, Desember 2009
DEPUTI BIDANG NERACA DAN
ANALISIS STATISTIK BPS

Dr. Slamet Sutomo
NIP. 340004005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Diagram	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sejarah Penyusunan PDRB	2
1.4. Prospek dan Kegunaan Data PDRB Menurut Penggunaan	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II Kerangka Dasar Proses Ekonomi	5
2.1. Siklus Kegiatan Ekonomi	6
2.2. Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional	10
2.3. Pencatatan Dalam Sistem Neraca	14
2.4. Sistem Penilaian	16
2.5. Pengertian PDRB	17
2.6. Analisis Keynesian	19
BAB III DEFINISI OPERASIONAL	21
3.1. Klasifikasi Kegiatan	21
3.2. Definisi Konsep Secara Umum	24
3.3. Definisi Konsep Komponen PDRB Menurut Penggunaan	28
3.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	28
3.3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	37
3.3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46
3.3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	58

3.3.5. Perubahan Inventori	65
3.3.6. Transaksi Eksternal (Perdagangan antar-wilayah)	70
BAB IV RANCANGAN TABULASI	89
4.1 Tabel-tabel Kerja	90
4.1.1. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)	91
4.1.2. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (adhk)	97
4.2 Tabel-tabel Rekapitulasi	98
4.3 Tabel-tabel Analisis	108
4.3.1. Nilai Produk Barang dan Jasa Yang Dikonsumsi Akhir (adhb) ..	109
4.3.2. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) Atas Berbagai Produk Barang dan Jasa Yang dikonsumsi Masyarakat	110
4.3.3. Konsumsi Rumah Tangga per RT (Rata-Rata Setiap Rumah Tangga)	111
4.3.4. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rata-Rata Setiap Penduduk)	112
4.3.5. Rasio Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB	113
4.3.6. Konsumsi Pemerintah Per Kapita	114
4.3.7. Investasi Fisik (PMB)	115
4.3.8. Rasio PMTB Terhadap PDRB	115
4.3.9. Neraca Perdagangan (Trade Balance)	116
4.3.10. Rasio Kekuatan Ekspor Terhadap Output Domestik	117
4.3.11. PDRB Per Kapita	118
BAB V TEKNIK ANALISIS	121
5.1. Produk Domestik Regional Bruto	122
5.2. Identifikasi Data Agregat PDRB	125
5.3. Analisis Data PDRB Menurut Penggunaan	129
5.4. Perbedaan Dengan Data Nasional (PDB)	142
BAB VI PENUTUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Lembar Kerja Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku	32
Tabel 3.2	Lembar Kerja Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga Tahunan Atas Dasar Harga Konstan	35
Tabel 3.3	Klasifikasi jenis LNP menurut Sektor Kelembagaan	37
Tabel 3.4	Neraca Produksi Pemerintah	49
Tabel 3.5	Neraca Produksi Pemerintah Daerah Kabupaten X Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 (juta rupiah)	52
Tabel 3.6	Neraca Produksi Pemerintah daerah Provinsi X Atas Dasar Harga Konstan, 2007 (juta rupiah)	53
Tabel 3.7	Lembar Kerja Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 (juta rupiah)	54
Tabel 3.8	Lembar Kerja Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan, 2007 (juta rupiah)	54
Tabel 3.9	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007 Provinsi X (juta rupiah)	55
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi X, 2007 (juta rupiah)	55
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi X, 2007 (ribu rupiah)	56
Tabel 3.12	Metode Estimasi Penghitungan Indeks Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi X, 2007	58
Tabel 3.13	Lembar Kerja Penghitungan PMTB dengan Metode Langsung	64
Tabel 3.14	Lembar Kerja Penghitungan PMTB	65
Tabel 3.15	Lembar Kerja Penghitungan Perubahan Persediaan Sektor-sektor yang Diketahui Posisi Persediaan (Quantum dan Harga Rata-rata Tahunan)	69
Tabel 3.16	Lembar Kerja Penghitungan Perubahan Persediaan Sektor-sektor Berdasarkan Laporan Keuangan	69

Tabel 3.17	Lembar Kerja Penghitungan Ekspor Barang Data dari <i>Subject Matter</i> (Berupa Nilai Ekspor menurut Jenis Barang 2 Digit HS, dalam US \$)	83
Tabel 3.18	Agregasi dari 99 Sektor HS 2 Digit Menjadi Nilai Triwulanan menurut 18 Sektor	83
Tabel 3.19	Perkiraan <i>Direct Purchase</i> dan Ekspor Ilegal Atas Dasar Harga Berlaku	84
Tabel 3.20	Total Nilai Ekspor Atas Dasar Harga Berlaku	84
Tabel 3.21	Total Nilai Ekspor Atas Dasar Harga Konstan	85
Tabel 3.22	Lembar Kerja Penghitungan Impor Barang Data dari <i>Subject Matter</i> (Berupa Nilai Impor Menurut Jenis Barang 2 Digit HS, dalam US \$)	85
Tabel 3.23	Agregasi Dari 99 Sektor HS 2 Digit Menjadi Nilai Triwulanan menurut 18 Sektor	86
Tabel 3.24	Perkiraan <i>Direct Purchase</i> dan Impor Ilegal Atas Dasar Harga Berlaku	86
Tabel 3.25	Total Nilai Impor Atas Dasar Harga Berlaku	87
Tabel 3.26	Total Nilai Impor Atas Dasar Harga Konstan	87
Tabel 4.1	Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>juta rupiah</i>), 2003-2007	91
Tabel 4.2	Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>juta rupiah</i>), 2007	92
Tabel 4.3	Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>juta rupiah</i>), 2003-2007	92
Tabel 4.4	Indeks Perkembangan Konsumsi Rumah tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>2000 = 100,00 Persen</i>), 2003-2007	93
Tabel 4.5	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>Persen</i>), 2003-2007	93
Tabel 4.6	Distribusi Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>Persen</i>), 2003-2007	94

Tabel 4.7	Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kategori Konsumsi (<i>Persen</i>), 2007	94
Tabel 4.8	Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota (<i>Persen</i>), 2007	95
Tabel 4.9	Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota dan Kategori Konsumsi (<i>Persen</i>), 2007	95
Tabel 4.10.	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/kota dan Kategori Konsumsi (<i>Persen</i>), 2003-2007	96
Tabel 4.11	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku(<i>Persen</i>), 2003-2007	96
Tabel 4.12	Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kategori Konsumsi (<i>Persen</i>), 2003-2007	96
Tabel 4.13	Konsumsi Rumah tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/kota (<i>juta rupiah</i>), 2003-2007	97
Tabel 4.14	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/kota (<i>Persen</i>), 2003-2007	97
Tabel 4.15	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Konstan (<i>Persen</i>), 2003-2007	98
Tabel 4.16	PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Juta Rupiah</i>), 2003-2007	99
Tabel 4.17	PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Konstan (<i>Juta Rupiah</i>), 2003-2007	100
Tabel 4.18	Pangsa/Peran PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Konstan (<i>Juta Rupiah</i>), 2003-2007	102

Tabel 4.19	Indeks Perkembangan PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE Atas Dasar Harga Konstan (2000= 100,00 persen), 2003-2007	103
Tabel 4.20	Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2003-2007	105
Tabel 4.21	Indeks Implisit PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2003-2007	107
Tabel 4.22	Nilai dan Porsi Permintaan Akhir Produk Barang dan Jasa Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007	110
Tabel 4.23	Tingkat Inflasi Komponen Permintaan/Konsumsi Akhir Produk barang dan jasa, Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Persen), 2003-2007	111
Tabel 4.24	Total Konsumsi Rumah Tangga dan Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga Provinsi/ Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2003-2007	112
Tabel 4.25	Total Konsumsi Rumah Tangga dan Rata-rata Konsumsi Per penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2000-2003 ..	113
Tabel 4.26	Rasio Konsumsi Pemerintah terhadap Total PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), Tahun 2003-2007	113
Tabel 4.27	Rata-Rata Konsumsi Pemerintah Per-Kapita Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, Tahun 2003-2007	114
Tabel 4.28	Komposisi Pembentukan Modal Bruto (PMB) Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, Tahun 2003-2007	115
Tabel 4.29	Perbandingan Pembentukan Modal Bruto (PMB) terhadap PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007	116
Tabel 4.30	Keseimbangan Neraca Perdagangan Luar Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2003-2007	117
Tabel 4.31	Rasio Ekspor terhadap Output Domestik Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007	118
Tabel 4.32	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2003-2007	118

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Siklus Kegiatan Ekonomi	7
Diagram 2.	Siklus transaksi ekonomi domestik dengan luar negeri	9
Diagram 3.	Arus Pendapatan Faktor Nasional/Regional	11
Diagram 4.	Alur Pendapatan dan Penerimaan Nasional/Regional	13

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara besar yang sedang berkembang, Indonesia memiliki perbedaan struktur penguasaan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya finansial antar-wilayah yang cukup beragam.

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi potensial yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses produksi, sedangkan sumber daya alam merupakan faktor dasar kekayaan alam (*endowment factor*), yang mendorong timbulnya peristiwa dan perilaku ekonomi oleh berbagai pelaku ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya.

Dalam praktiknya sangat dimungkinkan PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah akan sangat bervariasi baik dilihat dari cara pendekatan pengukuran, jenis kegiatan ekonomi, lingkup data, asumsi yang digunakan maupun sumber data. Perbedaan yang terjadi antar-daerah akan membuat data PDRB yang sangat dinamis. Oleh karena itu untuk kepentingan konsistensi data PDRB pada tingkat nasional maupun regional, maka perlu diterapkan sebuah sistem¹ yang mampu menangani hal ini. Selanjutnya sistem ini akan dikembangkan secara terus menerus sehingga pada akhirnya akan terbentuk keselarasan dan kesesuaian, baik yang menyangkut definisi konsep, lingkup ukuran, pendekatan, asumsi maupun metoda estimasinya.

Buku pedoman ini dimaksudkan untuk menjelaskan tata cara penghitungan PDRB, khususnya dilihat dari **sisi penggunaan** (*demand side*). Di dalamnya dijelaskan, konsep, klasifikasi, macam dan jenis data, metode estimasi, prosedur pengukuran, asumsi dan keterbatasan, dan sumber data. Kehadiran buku ini diharapkan akan memudahkan para pengguna untuk lebih memahami makna data PDRB. Perlu ditekankan bahwa perangkat data PDRB hanya merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem neraca nasional, yang lebih memfokuskan pada aspek **riil** (produksi & konsumsi) daripada aspek **moneter**.

¹ Pada tingkat nasional disebut sebagai sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) sedangkan pada tingkat regional disebut sebagai sistem neraca regional Indonesia (SNRI).

Lebih jauh, buku pedoman ini dilengkapi dengan prosedur penyusunan **PDRB sisi penggunaan**, berikut dengan lembar kerjanya. Pedoman ini merupakan pembaruan dari pedoman yang sudah pernah disusun dan dipublikasikan sebelumnya. Konsep maupun metode pengukuran yang dituangkan di sini secara umum mengikuti tatacara dan prosedur yang digariskan dalam buku pedoman *System of National Accounts 1993 (SNA'93)*², dalam beberapa hal disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dengan cara ini prinsip-prinsip akuntansi sudah digunakan untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan data yang dikumpulkan, termasuk penyajiannya, sehingga dapat dihasilkan sintensa statistik neraca nasional maupun regional secara komprehensif.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama penyusunan buku ini adalah untuk menyinkronkan penghitungan PDRB yang dilakukan dari sisi penggunaan dan lapangan usaha. Penghitungan PDRB dari sisi lapangan usaha sudah lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan sisi penggunaan, sehingga diperlukan usaha yang lebih gigih agar penghitungan kedua sisi tersebut bias sejajar. Menurut teori, seharusnya kedua penghitungan tersebut dilakukan secara terpisah (meskipun saling berkaitan). Perbedaan dalam prosedur penghitungan, asumsi maupun sumber data menunjukkan penyebab utama perbedaan tersebut. Selain itu buku pedoman ini juga mulai memperkenalkan konsep-konsep terbaru SNA'93 yang dianggap cukup aplikatif bagi pengembangan penyusunan PDRB pada tingkat regional di Indonesia.

1.3. Sejarah Penyusunan PDRB

Penyusunan PDRB ini sudah dilakukan selama lebih dari 30 tahun, dan selalu mengalami penyempurnaan mengikuti perkembangan yang terjadi, baik perkembangan tatanan ekonomi, teknologi dan informasi maupun teknik penyusunannya. Sementara penyusunan PDB telah dilakukan sejak tahun 1958, namun secara teratur dilakukan oleh BPS mulai tahun 1960.

Selama disusunnya PDRB/PDB telah beberapa kali mengalami perubahan tahun dasar yaitu untuk data series tahun:

² Buku pedoman SNA '93 disusun oleh PBB (United Nations) bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya seperti World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Commission of the European Communities (CEC).

1960-1973 menggunakan tahun dasar 1960,
1973-1983 menggunakan tahun dasar 1973,
1983-1993 menggunakan tahun dasar 1983,
1993-2000 menggunakan tahun dasar 1993, dan
2000-saat ini menggunakan tahun dasar 2000.

Dalam perkembangannya yang terakhir, statistik ini sudah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah. Bahkan PDB maupun PDRB juga digunakan sebagai variabel pendukung bagi model-model ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu tersedianya data PDB maupun PDRB secara regular dan konsisten, menjadi suatu kebutuhan yang mendasar.

1.4. Prospek dan Kegunaan Data PDRB Menurut Penggunaan

Sistem neraca nasional merupakan perangkat data ekonomi makro yang direkomendasikan PBB untuk dikembangkan penyusunannya di seluruh negara di dunia. Sistem ini menyajikan berbagai indikator ekonomi makro dalam konsep serta format neraca secara terintegrasi dan konsisten. Tersedianya perangkat ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak untuk mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi (makro) berbagai pelaku ekonomi di masing-masing wilayah. Perilaku ekonomi: produksi, konsumsi, menabung dan investasi (akumulasi) serta pemilikan kekayaan disajikan dalam satu sistem data neraca³, di mana transaksi yang satu terpaut (*articulated*) dengan lainnya. Apabila neraca-neraca tersebut digabungkan seluruhnya (dikonsolidasikan) maka akan terbentuk seperangkat sistem statistik neraca nasional suatu negara/wilayah. Pada dasarnya pembentukan sistem neraca nasional (SNN) ini mengikuti kaidah-kaidah yang digariskan dalam statistik ekonomi makro, yang juga mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi perusahaan.

PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah (regional), sementara pada tingkat nasional dikenal dengan produk domestik bruto (PDB). Penyusunan PDB/PDRB yang secara rutin di Indonesia dan juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota dihitung melalui pendekatan lapangan usaha/sector dan pendekatan penggunaan.

³ Disajikan dalam format neraca T, tabel dan matriks.

Dengan tersedianya data PDRB menurut penggunaan secara baik, lengkap dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan gambaran fenomena ekonomi tentang perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah. Dari komponen PDRB menurut penggunaan ini dapat diturunkan beberapa indikator makro di antaranya tingkat kecenderungan konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*), ICOR (*incremental capital output ratio*), rasio pembentukan modal tetap terhadap konsumsi, dan sebagainya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam publikasi ini selain disajikan secara teoritis gambaran kerangka dasar proses ekonomi juga disajikan teknik-teknik aplikatif dalam rangka menyusun PDRB menurut penggunaan. Pembahasan diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah penyusunan PDRB, dan prospek dan kegunaan data PDRB penggunaan serta sistematika penulisan. Pada bagian kedua dibahas gambaran teoritis kerangka dasar proses ekonomi. Pada bagian tersebut dibahas tentang siklus kegiatan ekonomi, siklus pendapatan dan penerimaan nasional/regional, pencatatan dalam sistem neraca, sistem penilaian, dan pengertian PDRB.

Pada bagian selanjutnya dibahas berbagai definisi operasional yaitu klasifikasi kegiatan, definisi konsep secara umum yang terkait dengan PDRB umum, dan secara khusus yang terkait dengan PDRB menurut penggunaan. Selain itu juga diberikan gambaran rancangan tabulasi dalam rangka penyusunan PDRB penggunaan yaitu tabel-tabel kerja, tabel-tabel rekapitulasi, dan tabel-tabel analisis. Teknik analisis terutama yang terkait dengan pemanfaatan data PDRB penggunaan dibahas pada bagian selanjutnya. Pembahasan diakhiri dengan bab penutup yang berisi beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam penyusunan PDRB menurut penggunaan dan rekomendasi bagi penyempurnaan penyusunannya.

BAB II

KERANGKA DASAR PROSES EKONOMI

Secara teori dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh adanya berbagai perilaku manusia (masyarakat) dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku atau aktivitas masyarakat tersebut didasarkan pada dua motivasi pokok yaitu ekonomi dan non-ekonomi, dimana keduanya sama-sama mempunyai resiko yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap arus ekonomi⁴. Interaksi maupun transaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku ekonomi dalam berbagai perilakunya baik berbentuk tindakan produksi, konsumsi maupun akumulasi (investasi) yang membentuk suatu proses ekonomi yang panjang dan berkaitan, akan direkam dalam bentuk suatu sistem pencatatan yang dikenal sebagai **sistem neraca nasional (SNN)**⁵.

Dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan (*demand*) daripada penyediaan (*supply*). Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian besar masyarakat modern telah mendorong para produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada gilirannya juga akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tuntutan serta kebutuhan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik serta didorong oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang juga menjadi pemicu meningkatnya permintaan akan produk-produk ekonomi dengan berbagai ragam macamnya.

Bagian ini akan menjelaskan tentang keterkaitan perilaku antara kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi (investasi) dalam proses ekonomi sebagai gambaran hubungan secara simultan antara PDRB sisi *demand* (permintaan) dengan PDRB sisi *supply* (penyediaan). Perangkat data yang akan digunakan adalah **PDRB menurut penggunaan maupun PDRB menurut lapangan usaha**. Secara sederhana, persamaan yang ada⁶ menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh proses ekonomi

⁴ Lebih jauh berikutnya akan diperkenalkan prinsip "5 A" dalam SNN yaitu: *Actor, Activity, Action, Account, dan Articulated*.

⁵ Dalam konteks nasional (Indonesia) disebut sebagai Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI).

⁶ Model "Keynesian".

produksi berupa nilai tambah akan digunakan oleh masyarakat⁷ untuk membiayai seluruh kebutuhan konsumsinya. Meskipun demikian nilai tambah yang menjadi pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya menjadi penerimaan masyarakat, karena ada sebagian dana yang ditahan oleh perusahaan, mengalir ke luar daerah/region, dan sebagainya. Keterkaitan para perilaku ekonomi dalam siklus ekonomi makro tersebut akan dijabarkan lebih jauh berikut ini.

2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi

Konsep ekonomi klasik secara sederhana menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (makro) yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan menjadi dua kelompok pelaku utama yaitu **produsen** dan **konsumen**. Kelompok produsen menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok konsumen bagi kepentingan proses produksinya dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, atau lazimnya disebut sebagai *output*. Di sisi lain kelompok konsumen memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi berupa tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*) dan kewiraswastaan (*entrepreneurship/skill*) yang digunakan oleh produsen sebagai *input* untuk mendukung kegiatan proses produksinya. Sebagai kompensasinya, konsumen akan menerima balas jasa dari produsen berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal, dividen serta bentuk keuntungan lainnya. Balas jasa yang diterima oleh konsumen ini merupakan sumber pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.

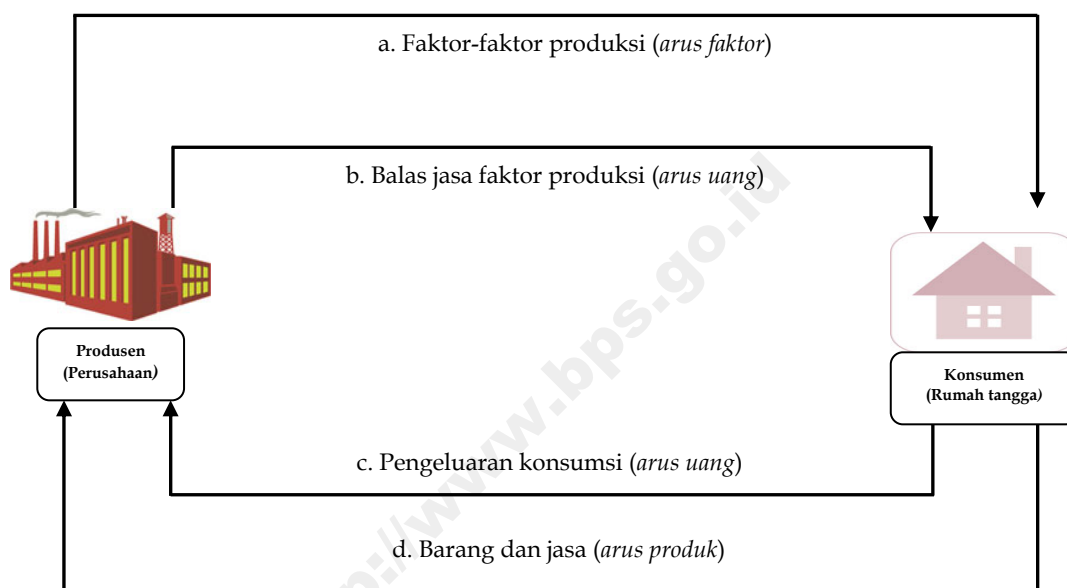
Pada sisi yang berbeda, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi akan dibeli kembali oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara penyediaan produk di satu sisi serta penggunaan (permintaan) di sisi lainnya ini disebut sebagai titik keseimbangan umum (*general equilibrium*) antara penyediaan (*supply*) dan permintaan (*Demand*). Bahkan interaksi yang terjadi antara kedua kelompok besar pelaku ekonomi ini terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan membentuk suatu siklus perekonomian. Pada proses ini produsen berfungsi sebagai penghasil produk sedangkan konsumen sebagai pemakai produk akhir. Dari siklus makro tersebut dapat dilihat gambaran tentang struktur ekonomi serta

⁷ Terdiri atas sektor usaha, rumah tangga, lembaga nir-laba maupun pemerintah.

perubahan-perubahan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi maupun beberapa data agregat lainnya.

Pada sisi lain ada peran pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. Peran utama pemerintah tersebut adalah sebagai regulator, fasilitator maupun stabilitator antara pihak produsen dengan konsumen dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Diagram 1. Siklus kegiatan ekonomi



Untuk melihat siklus (perputaran) sistem perekonomian suatu wilayah atau negara secara sederhana (dua sektor), adalah dengan menggunakan model perekonomian tertutup di mana diasumsikan tidak ada transaksi ekonomi antara wilayah tersebut dengan wilayah/negara lain (seperti halnya transaksi ekspor dan impor). Wilayah yang menganut sistem ekonomi tertutup tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh negara lain, begitu juga sebaliknya, negara lain juga tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Diagram 1 di atas menunjukkan hubungan transaksi tersebut.

Berdasarkan siklus makro tersebut (Diagram 1), secara sederhana dapat dijelaskan beberapa arus transaksi yang terjadi antara produsen dengan konsumen sebagaimana berikut ini:

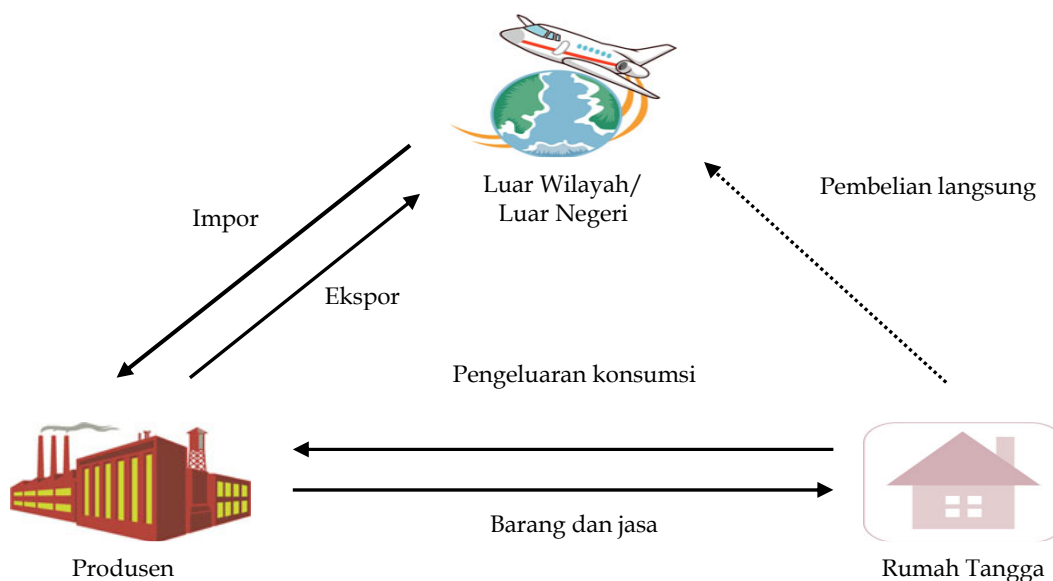
- a. arus penyediaan faktor produksi yang terdiri dari unsur tanah, tenaga kerja, kapital, kewirausahaan;
- b. arus balas jasa faktor produksi atau pendapatan yang terdiri atas unsur sewa tanah, upah dan gaji, bunga, deviden, serta keuntungan;
- c. arus pengeluaran untuk kebutuhan konsumsinya, dan
- d. arus barang dan jasa yang menjadi konsumsi.

Diagram di atas menunjukkan adanya hubungan secara langsung antara arus produk (riil) dengan arus uang (moneter). Apabila seluruh transaksi dikonversikan ke dalam satu satuan moneter (rupiah) maka keempat alur transaksi tersebut akan memberikan besaran nilai yang sama. Aliran faktor produksi dari rumah tangga ke produsen akan menyebabkan terjadinya arus balik dari produsen ke rumah tangga dalam bentuk **pendapatan** atau yang disebut sebagai balas jasa faktor produksi.

Pendapatan faktor yang dibayarkan oleh produsen tersebut merupakan sumber penerimaan bagi rumah tangga yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. Konsumsi (akhir) tersebut meliputi penggunaan berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen (perusahaan); atau dengan kata lain pendapatan di satu sisi akan sama dengan penggunaan pendapatan di sisi yang lain. Dengan demikian maka aliran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen akan sama dengan aliran uang yang dibayarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa tersebut⁸.

⁸ Aliran tersebut menunjukkan adanya hubungan antara arus riil dan arus uang.

Diagram 2. Siklus transaksi ekonomi domestik dengan luar negeri



Dalam kenyataannya barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun barang modal, tidak semuanya berasal dari dalam negeri tetapi bisa juga sebagian dari luar negeri (*import*). Juga sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri tetapi sebagian digunakan oleh luar negeri (*export*). Seluruh aktivitas dan transaksi perdagangan tersebut akan tergambar dalam sistem perekonomian terbuka yang strukturnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perekonomian sistem tertutup. Interaksi perdagangan antara pelaku ekonomi domestik dengan luar negeri akan menyebabkan terjadinya aliran **devisa** baik masuk maupun keluar wilayah. Dalam hal pendapatan regional, pengertian luar negeri bisa juga mencakup luar daerah atau luar wilayah.

Berdasarkan aliran atau siklus ekonomi tersebut disebut sebagai **produk regional**, atau **pengeluaran** atau **penggunaan regional** maupun **pendapatan regional**, dapat dideskripsikan secara lebih jauh sebagai berikut:

- a. ditinjau dari **segi produksi** (arus nilai tambah), disebut sebagai produk regional, yang merupakan penjumlahan komponen nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi (produsen) di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu;
- b. ditinjau dari **segi pengeluaran** atau penggunaan disebut sebagai pengeluaran/penggunaan atas produk regional (*regional expenditure*), yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi akhir yang dilakukan oleh

rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori serta ekspor dan impor suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu; dan

- c. ditinjau dari **segi pendapatan** disebut sebagai pendapatan regional (*regional income*) yang merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu.

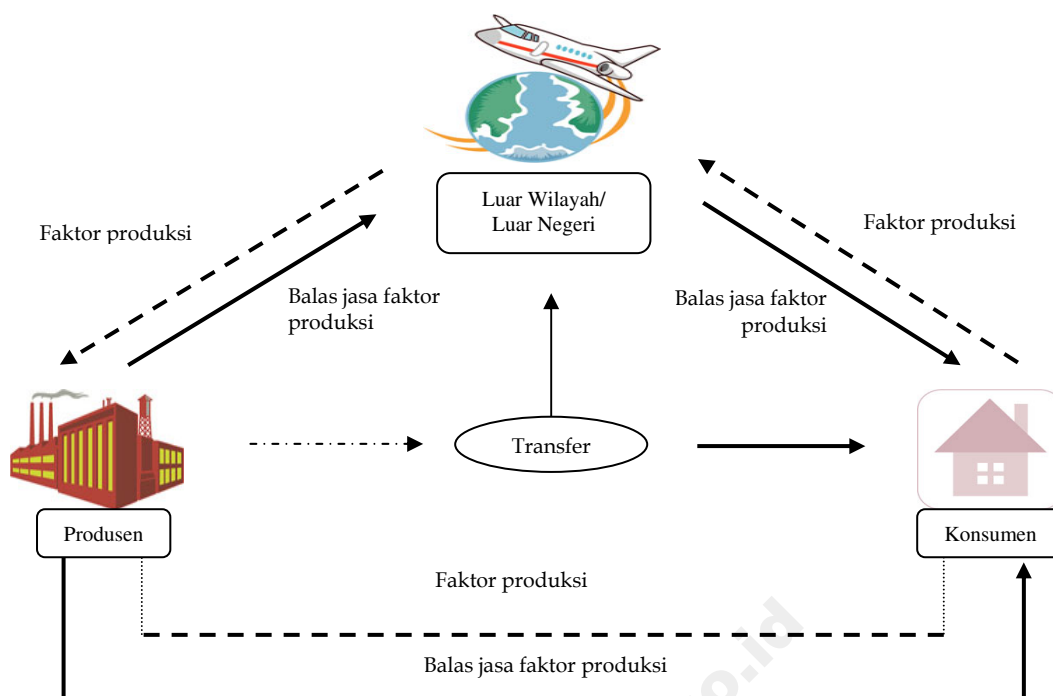
2.2 Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional

Tujuan akhir dari penghitungan PDRB adalah untuk mengetahui besarnya **pendapatan** yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan yang diterima inilah yang akan menjadi dasar ukuran kemakmuran suatu wilayah, karena dengan adanya pendapatan masyarakat dapat membiayai kebutuhannya. Pendapatan tercipta akibat adanya proses produksi, dimana kemudian pendapatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pembiayaan konsumsinya. Pendapatan yang berasal dari kompensasi faktor produksi (*active income*) ini akan didistribusikan kembali di antara kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau tranfer, atau pemberian dalam bentuk lain (natura) secara cuma-cuma yang bersifat tidak mengikat.

Dalam kenyataannya, pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah⁹ belum tentu seluruhnya dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ada sebagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah, begitu pula sebaliknya, ada pula pendapatan yang berasal dari wilayah lain yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Implikasi dari kondisi tersebut adalah terjadinya aliran pendapatan antarwilayah, atau timbulnya arus pendapatan yang mengalir dari suatu daerah ke daerah lainnya, sebagaimana dijelaskan pada diagram berikut ini.

⁹ Wilayah ekonomi.

Diagram 3. Arus Pendapatan Faktor Regional



Pendapatan yang mengalir antarwilayah tersebut dapat berupa pendapatan faktor itu sendiri (distribusi primer) atau redistribusi pendapatan (distribusi sekunder), antarpelaku ekonomi maupun antar wilayah dalam bentuk pemberian atau penerimaan hibah atau transfer. Dengan demikian maka untuk memperoleh gambaran penerimaan¹⁰ masyarakat yang sesungguhnya (pendapatan disposabel) harus diperhitungkan pula aliran pendapatan yang mengalir keluar maupun yang masuk ke wilayah tersebut, baik dalam bentuk pendapatan faktor (neto) maupun transfer/hibah (neto).

Pendapatan masyarakat yang berupa balas jasa faktor produksi, baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke wilayah lain (faktor produksi dimiliki oleh wilayah lain), disebut sebagai pendapatan regional (neto). Kemudian, pendapatan regional yang ditambah dengan "transfer" yang diterima dikurangi dengan transfer yang dibayar ke wilayah lain disebut sebagai penerimaan disposabel regional (neto). Penerimaan atas pendapatan faktor milik sendiri maupun yang diterima dari pendapatan faktor pihak

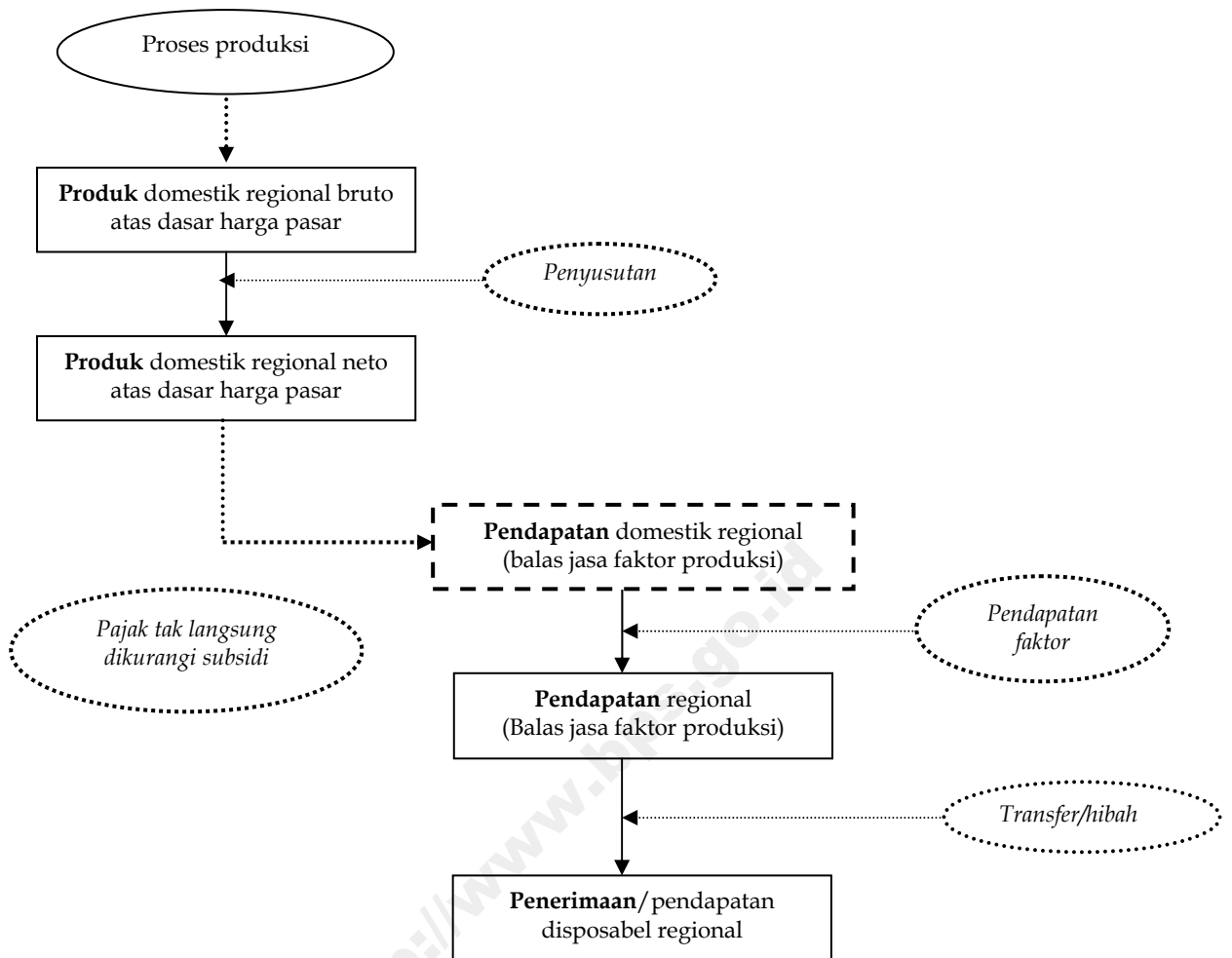
¹⁰ yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan ditambah dengan transfer atau hibah. Mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetapi memperoleh transfer dari pendapatan pihak lain disebut sebagai kelompok penerima pendapatan (*passive earner*).

lain digambarkan sebagai penerimaan masyarakat yang benar-benar dapat dibelanjakan dan dinikmati masyarakat di wilayah tersebut (*disposable income*).

Transfer merupakan mekanisme pendistribusian atau pengalokasian kembali pendapatan faktor yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain secara cuma-cuma, atau tanpa adanya suatu kewajiban; diartikan juga sebagai pemberian yang bersifat tidak mengikat yang digambarkan sebagai cara redistribusi pendapatan masyarakat sebagai akibat dari adanya dorongan, motivasi serta tindakan sosial. Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer berjalan (*current transfer*) seperti halnya sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan, sumbangan kesehatan dan sebagainya. Dilihat dari lalu lintasnya maka transfer dapat terjadi antar rumah tangga, antara rumah tangga dan pemerintah, antar pemerintah, antara rumah tangga dan perusahaan, antar perusahaan serta antara perusahaan dan pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang diturunkan dari berbagai sektor ekonomi produksi, akan didistribusikan atau dialokasikan kembali kepada pihak-pihak lain di dalam wilayah maupun ke/dari wilayah lain. Relokasi pendapatan dalam bentuk transfer akan menyebabkan terjadinya transaksi penerimaan bagi kelompok penerima pendapatan, meskipun mungkin juga diterima oleh kelompok pencipta pendapatan itu. Sebagai contoh ada orang yang mempunyai pendapatan sebagai pemilik faktor produksi tetapi juga menerima bagian dari pendapatan milik pihak lain dalam bentuk hadiah atau sumbangan.

Diagram 4. Alur Pendapatan dan Penerimaan Regional



Dari kronologi transaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa PDRB menurut sektor produksi (pendekatan nilai tambah) lebih mencerminkan tentang tingkat produktivitas suatu daerah/wilayah, data tersebut menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output (produk) serta dalam menciptakan nilai tambah, sedangkan PDRB menurut penggunaan lebih menggambarkan tentang bagian dari produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal serta yang diekspor. Untuk melihat peran ekonomi domestik maka total PDRB tersebut harus dikurangi dengan impor.

Lebih jauh, PDRB dari sisi penggunaan dapat pula diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menggunakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi maupun untuk tabungan, yang merupakan sumber investasi domestik (dilihat dari aspek

moneter). Sementara itu transaksi ekspor dan impor lebih menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan yang berasal dari transaksi perdagangan dengan wilayah lain, termasuk luar negeri (*external transaction*), sedangkan PDRB menurut pendekatan pendapatan lebih menekankan tentang aspek pemerataan pendapatan (pengukuran PDRB dengan pendekatan pendapatan tidak dibahas lebih jauh dalam pedoman ini).

Model arus transaksi yang sama berlaku pula bagi kegiatan dalam proses distribusi (*primary distribution*) serta redistribusi pendapatan (pengalokasian kepada pihak lain atau disebut sebagai transfer). Proses ini bisa juga terjadi antardaerah atau antarwilayah, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap struktur pendapatan atau penerimaan daerah. Dengan demikian maka sebenarnya data agregat makro penerimaan/pendapatan disposabel regional (*regional disposable income*) dapat lebih menggambarkan informasi tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan sebagai dampak pembangunan, yang benar-benar potensial untuk dinikmati atau diakses oleh masyarakat.

Apabila dilihat dari ukuran pemerataan orang per orang (nilai rata-rata), maka PDRB per-kapita¹¹ yang disebut sebagai ukuran **produktivitas** tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap individu di wilayahnya untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah. Sedangkan pendapatan regional per kapita yang disebut sebagai ukuran **kemakmuran** menggambarkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran potensial yang dapat dinikmati oleh setiap individu di wilayah tersebut, tanpa perlu membedakan faktor jabatan, usia, jenis kelamin, suku bangsa, ataupun aspek sosial-ekonomi lainnya.

2.3. Pencatatan Dalam Sistem Neraca

Menurut konsep SNA, transaksi dalam bentuk arus (*flow*) dicatat atas dasar *accrual basis* (basis akrual), yaitu pencatatan yang dilakukan pada saat terjadinya atau adanya suatu transaksi, bukan pada konsep *cash basis* (basis tunai) atau pada saat terjadinya pembayaran (pertukaran dengan menggunakan uang). Penghitungan secara akrual ini mencatat arus pada saat mana nilai ekonominya terjadi, bertransformasi, serta

¹¹ Per kapita merupakan refleksi ukuran rata-rata setiap individu untuk mengakses berbagai hasil atau produk pembangunan, seperti ekonomi pada khususnya. Dengan fungsinya sebagai nilai sentral, per-kapita digunakan sebagai ukuran pemerataan ataupun kesenjangan yang terjadi antarwilayah.

berubah atau hilang/punah. Jenis prinsip pencatatan ini khususnya digunakan untuk mengaitkan antara transaksi dan arus pada suatu periode akuntansi tertentu. Dengan menggunakan cara ini transaksi maupun arus lainnya dapat langsung dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca kekayaan (neto). Penghitungan secara akrual ini umumnya diterapkan untuk transaksi arus yang bersifat non-moneter.

Sebaliknya perhitungan secara basis tunai (*cash basis*) hanya mencatat adanya aliran uang tunai (*cash flow*) saja, yaitu ketika uang berpindah tangan dari pembayar ke pihak penerima (tidak akan ada pencatatan arus yang bersifat non-moneter). Pencatatan transaksi atas basis tunai digunakan untuk analisis tertentu yang berkaitan dengan masalah moneter, contohnya adalah pencatatan dalam neraca keuangan pemerintahan¹² dan neraca pembayaran luar negeri (*balance of payment*)¹³. Karena itu apabila data tersebut akan digunakan dalam penyusunan PDRB harus dilakukan penyesuaian, supaya seragam dengan konsep yang berlaku.

Pencatatan *output* suatu komoditi yang terdiri dari barang dan jasa, dilakukan pada waktu barang dan jasa tersebut selesai diproduksi. Begitu pula halnya dengan penggunaan atau konsumsi yang seharusnya dicatat pada saat barang dan jasa¹⁴ tersebut dikonsumsi atau digunakan. Dengan demikian seluruh produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir di sini sebaiknya dicatat pada saat dibeli untuk tujuan digunakan. Seluruh produk tersebut dinilai atas dasar harga pembelian yaitu harga yang dibayarkan pada pihak lain. Harga pembelian adalah harga produsen ditambah dengan margin perdagangan, penyaluran serta margin pengangkutan. Pencatatan margin tersebut adalah pada waktu barang tersebut diperdagangkan dan dijual di pasar serta diangkut ke tempat konsumen.

Dalam banyak kasus, khususnya ketika harta (*asset*) dipertukarkan dengan uang tunai, penghitungan dengan basis akrual dan basis tunai akan menghasilkan nilai yang sama. Namun penghitungan secara akrual biasanya relevan ketika harta tidak segera ditukar dengan uang tunai, seperti penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan, pencatatan bagi transaksi internal (seperti penambahan *output* untuk persediaan) dan bagi pencatatan transfer yang bersifat tidak cuma-cuma (seperti pajak yang harus dicatat ketika jatuh tempo, bukan ketika pembayaran terjadi).

¹² Dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

¹³ Dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

¹⁴ Khusus untuk jasa, tidak ada perbedaan.

Berikut ini ada beberapa peraturan umum yang perlu diterapkan berkaitan dengan waktu pencatatan transaksi:

- a. Transaksi barang dan jasa dicatat pada saat kepemilikan barang berubah atau pada saat jasa dilaksanakan. Satu-satunya pengecualian adalah dalam kasus pembangunan gedung dan konstruksi, di mana transaksi dianggap terjadi ketika pekerjaan sedang berlangsung.
- b. Transaksi distributif dicatat pada saat kewajiban pembayaran terjadi. Sebagai contoh adalah upah/gaji pegawai, bunga, sewa tanah, sumbangan sosial yang harus dicatat pada periode ketika muncul kewajiban pembayaran. Hal yang sama juga berlaku bagi pajak produksi dan subsidi yang seharusnya dicatat pada saat transaksi terkait terjadi.
- c. Demikian juga dengan transaksi finansial yang seharusnya dicatat pada saat terjadi perubahan atas kepemilikan.

2.4. Sistem Penilaian

Barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi pada dasarnya dinilai atas dasar harga produsen. Harga produsen adalah suatu harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak produsen dengan pihak pembeli. Harga tersebut merupakan nilai yang akan diterima oleh produsen yang terjadi pada pasar atau transaksi pertama, atas penjualan barang dan jasa tersebut. Harga ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, termasuk di dalamnya keuntungan normal (yang diharapkan) serta pajak-pajak yang dibayarkan dikurangi dengan subsidi (apabila ada). Harga produsen atas produk tersebut (barang) tidak termasuk margin perdagangan/penyaluran serta biaya transportasi atau pengangkutan pada waktu produsen menyerahkan barang tersebut pada pihak lain, selama kegiatan tersebut tidak menjadi satu satuan usaha dengan kegiatan proses produksinya.

Berbeda dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, barang dan jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh konsumen¹⁵ pada prinsipnya harus dinilai atas dasar harga pembelian, yakni sejumlah harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dalam harga pembelian ini termasuk

¹⁵ Konsumen antara dan konsumen akhir.

unsur margin perdagangan dan penyaluran serta biaya pengangkutan yang menjadikannya lebih tinggi daripada harga produsen. Dalam hal penggunaan produksi yang berbentuk jasa, harga produsen sama besarnya dengan harga pembeli atau konsumen karena jasa dapat langsung dikonsumsi pada saat yang sama tanpa melalui jalur perdagangan dan pengangkutan, meskipun harga bisa termasuk komisi pihak ketiga sebagai perantara.

Dalam struktur PDRB menurut penggunaan/pengeluaran, setiap komponen penggunaan seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit serta konsumsi pemerintah semua dinilai menggunakan harga pembeli. Pembentukan modal tetap bruto dinilai setelah barang tersebut menjadi investasi (fisik), yang juga dinilai atas dasar harga pembeli. Ekspor dan impor dinilai pada harga setelah barang dan jasa tersebut sampai di tangan konsumen dan siap dipergunakan oleh konsumen atau dinilai pada harga pembeli¹⁶. Apabila komoditas impor masih dinilai atas dasar harga F.O.B, maka harus dinilai atas dasar harga pembeli ketika sampai di tangan konsumen, artinya ke dalam harga pokok tersebut harus ditambahkan margin perdagangan, penyaluran (distribusi) serta pengangkutan.

2.5. Pengertian PDRB

Kalau PDB (Produk Domestik Bruto) berkaitan dengan penyediaan informasi/data ekonomi makro di tingkat nasional maka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan perluasannya di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.

Seperti PDB, PDRB dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah (b) pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan masyarakat wilayah, serta (c) pendekatan penggunaan/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat. Selama ini pendekatan pertama dan ketiga umumnya sudah dikembangkan, sedangkan pendekatan yang kedua baru mulai akan dikembangkan, agar dapat diketahui penerapan ketiga pendekatan tersebut menghasilkan informasi

¹⁶ Konsep SNA'68 merekomendasi ekspor dinilai atas dasar harga FOB (*free on board*) sedangkan impor dinilai atas dasar harga CIF (*cost insurance freight*). SNA '93 merekomendasikan agar kedua transaksi tersebut dinilai atas dasar harga FOB.

yang konsisten satu sama lain. Karena itu baik PDB maupun PDRB¹⁷ merupakan perangkat data ekonomi makro yang diturunkan dari Sistem Neraca Nasional, yang menyajikan berbagai indikator ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan proses produksi serta kaitannya dengan proses konsumsi (akhir) dan investasi (fisik).

Dalam pengertian sederhana, ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tiga konsep yaitu banyaknya barang dan jasa yang diproduksi, besarnya pendapatan yang diterima dan penggunaan pendapatan tersebut. Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui suatu persamaan matematis sederhana. Sebagaimana kompilasi pada tingkat nasional (PDB), kompilasi pada tingkat wilayah (PDRB) juga dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan serupa yaitu, kompilasi PDRB dari sisi sektor (*supply side*), sisi penggunaan (*demand side*) dan sisi pendapatan (*income side*). Pertemuan antara ketiga dimensi perilaku tersebut dikenal sebagai titik keseimbangan umum antara sisi penyediaan dan permintaan di tingkat makro/semi makro (*general equilibrium*). Ketidakseimbangan yang terjadi antara dua titik tersebut diartikan sebagai surplus atau defisitnya suatu daerah.

PDRB sisi sektoral (penyediaan) pada intinya menjelaskan tentang besarnya nilai tambah¹⁸ yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi yang berada di wilayah yang bersangkutan. Dari sisi ini dapat diketahui data agregat turunannya seperti struktur ekonomi (harga berlaku), pertumbuhan ekonomi (harga konstan) dan indeks implisit PDRB. Selain itu, dapat pula dihitung PDRB per kapita, sebagai indikator yang menjelaskan tingkat kemakmuran rata-rata orang per orang yang diperoleh dari hasil pembangunan ekonomi¹⁹.

Dilihat dari sisi permintaan atau penggunaan akhir, PDRB menurunkan agregat-agregat makro mengenai struktur/komposisi permintaan atau penggunaan akhir masing-masing komponen, pertumbuhan "riil", serta indeks implisit. Komponen penggunaan akhir meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori/persediaan²⁰, serta transaksi luar negeri/luar

¹⁷ Secara umum diartikan sebagai produksi yang dihasilkan oleh unit produksi residen.

¹⁸ Dalam pengertian sederhana diartikan sebagai pendapatan masyarakat yang timbul di suatu wilayah akibat keterlibatannya dalam proses produksi. Nilai tambah disini merupakan pendekatan pengukuran terhadap sektor yang membayarkan (produsen).

¹⁹ Disebut sebagai ukuran produktivitas.

²⁰ Istilah sebelumnya adalah perubahan stok.

daerah (ekspor dan impor). Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga untuk investasi. Selain itu juga dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

Dengan demikian apabila pengukuran PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, maka secara langsung akan ditunjukkan adanya keterkaitan antara **nilai tambah** yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dengan **pendapatan** yang diterima, serta bagaimana berbagai institusi (rumah tangga, swasta dan pemerintah) menggunakan pendapatannya untuk membiayai pengeluarannya. Selain itu untuk menghitung pengaruh luar negeri atau luar wilayah terhadap pendapatan masyarakat di wilayah tersebut harus pula diperhitungkan pendapatan neto luar negeri wilayah (pendapatan yang diterima domestik dikurangi yang dibayar ke luar wilayah), serta transaksi transfer berjalan untuk memperoleh gambaran tentang pendapatan yang benar-benar diterima di wilayah (pendapatan *disposabel*).

2.6. Analisis Keynesian

Penghitungan PDRB dari sisi **penggunaan** lebih menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan melalui proses ekonomi dari berbagai macam sektor produksi digunakan oleh berbagai institusi domestik²¹ untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Atau pada pengertian lain PDRB menurut penggunaan ini menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah lain²² disebut juga sebagai **output akhir** (*final output*). Hubungan antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran atau penggunaan akhir berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk yang diekspor) dapat dinyatakan dalam model **Keynesian** dengan persamaan sebagai berikut:

²¹ Institusi yang dimaksud di sini adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani RT, pemerintah, serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik.

²² Disebut sebagai pendekatan riil.

$$Y = C + G + GFCF + \Delta Invent + X - M$$

di mana:

Y (<i>Income</i>)	=	PDRB
C (<i>Consumption</i>)	=	Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT
G (<i>Government</i>)	=	Konsumsi pemerintah
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	=	Pembentukan modal tetap bruto
Δ Invent	=	Perubahan inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

<http://www.bps.go.id>

BAB III DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Klasifikasi Kegiatan

Pelaku kegiatan, transaksi maupun produk ekonomi yang terjadi di suatu negara/wilayah sangat beraneka ragam dilihat dari sifat maupun jenisnya. Untuk kepentingan analisis maka berbagai kategori atau karakteristik yang sangat beragam tersebut perlu dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu. Maksud utama pengelompokan melalui proses klasifikasi ini adalah untuk menghimpun data/informasi yang sangat heterogen ke dalam golongan yang sesuai sehingga karakteristiknya menjadi relatif sama (*homogen*). Keseragaman dalam konsep, definisi serta klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar daerah/wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu menjadi lebih baik dan lebih tepat.

Penggolongan yang paling sederhana adalah menurut pelaku ekonomi yang secara garis besar terbagi atas konsumen, produsen, pemerintah dan luar negeri. Penggolongan ini tentunya didasarkan pada fungsi dan tujuan utama masing-masing pelaku ekonomi tersebut. SNA'93 menggolongkan pelaku-pelaku ekonomi (*actors*) menjadi korporasi (finansial dan non-finansial), rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah, serta luar negeri (*rest of the world*)²³.

Konsep konsumen yang selama ini dipakai identik dengan rumah tangga, sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pelaku-pelaku ekonomi produksi. Lingkup ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi yang digunakan dalam SNA'93 yang lebih cenderung membuat klasifikasi berdasarkan **institusi**²⁴ atau kelembagaan. Institusi ini bisa dalam bentuk perorangan atau pun kolektif.

Dalam kaitannya dengan penyusunan PDRB secara garis besar struktur dan perilaku ekonomi di suatu wilayah dapat dikelompokkan atau dibedakan menurut:

- a. lapangan usaha/sektoral (*production approach*);
- b. penggunaan/pengeluaran (*expenditure approach*); dan
- c. pendapatan atau balas jasa faktor produksi (*income approach*).

²³ Selain luar negeri disebut sebagai pelaku ekonomi domestik.

²⁴ Adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang mempunyai kemampuan sendiri, memiliki aset/kekayaan, mempunyai kewajiban, terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, serta mampu melakukan transaksi dengan unit-unit ekonomi lainnya.

Penggolongan atau klasifikasi yang telah dipakai dalam penyusunan PDRB sektoral selama ini adalah klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI). Penetapan klasifikasi ini didasarkan pada batasan kegiatan atau perilaku ekonomi produksi, yang menekankan pada aspek proses produksi dengan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkannya. Penggolongan kegiatan ekonomi ke dalam suatu sektor/lapangan usaha ini didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara berproduksi, sifat maupun jenis produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Lebih lanjut yang dimaksud dengan konsep produksi dalam penyusunan klasifikasi ini adalah yang berkaitan dengan proses, teknologi dan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut. Perlu diingat bahwa ada sedikit perbedaan antara konsep produksi dengan konsep produk, berkaitan dengan karakteristik dari masing-masing variabel tersebut.

Sebagai upaya untuk memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai negara atau wilayah, pada pertamanya PBB menerbitkan publikasi mengenai klasifikasi lapangan usaha yang disebut sebagai *international standard industrial classification of all economic activities (ISIC)*. Publikasi ini telah direvisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan tatanan dan perilaku ekonomi yang terjadi. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1958, revisi kedua tahun 1968, dan revisi ketiga tahun 1990. Dalam klasifikasi lapangan usaha secara internasional tersebut, lapangan usaha dibagi kedalam 10 (sepuluh) sektor ekonomi produksi sebagai berikut:

- a. pertanian;
- b. pertambangan dan penggalian;
- c. industri pengolahan;
- d. listrik, gas dan air bersih;
- e. konstruksi;
- f. perdagangan, hotel dan restoran;
- g. pengangkutan dan komunikasi;
- h. lembaga keuangan, usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan;
- i. pemerintahan dan jasa-jasa; dan
- j. kegiatan yang belum jelas batasannya.

Untuk kepentingan pengumpulan data secara nasional, biasanya perlu dilakukan penyesuaian²⁵ terhadap klasifikasi yang diterbitkan oleh PBB tersebut mengikuti kondisi maupun perilaku kegiatan ekonomi di setiap negara. Akan halnya klasifikasi di Indonesia,

²⁵ Bisa ditambahkan dan bisa pula dikurangkan.

BPS telah menerbitkan KLUI yang menjadi pegangan bagi kegiatan pengumpulan data atau penyusunan statistik di Indonesia²⁶. Dalam penyusunan pendapatan nasional atau pun pendapatan regional, klasifikasi sektor produksi yang dipakai terdiri dari sembilan sektor utama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (tidak termasuk kegiatan yang tidak jelas batasannya). Selanjutnya masing-masing dari sembilan sektor-sektor tersebut dapat lebih dirinci lagi ke dalam berbagai subsektor, yang tujuannya untuk lebih dapat mengetahui tingkat kerincian struktur ekonomi yang ada.

Klasifikasi atau penggolongan PDRB menurut sisi penggunaan dapat dibedakan atas 2 (dua) kategori utama, yaitu menurut **pelaku ekonomi** dan menurut **jenis transaksi**. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga (RT)²⁷, lembaga non-profit pelayan rumah tangga (LNPRRT), pemerintah (pusat dan daerah), investor (pelaku investasi fisik), serta luar daerah/wilayah dan luar negeri (eksportir dan importir); sedangkan jenis transaksinya digolongkan menurut pengeluaran untuk penggunaan berbagai produk sebagai konsumsi akhir serta untuk investasi (PMTB dan perubahan inventori). Kemudian pada transaksi eksternal perlu dibedakan dengan pihak mana transaksi tersebut dilakukan (domestik atau luar negeri). Pada umumnya transaksi ekspor dan impor (antar-wilayah/negara) digolongkan hanya berdasarkan sifat dan jenis produk. Penggolongan menurut transaksi yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi dalam wilayah ini disebut sebagai pengeluaran atau penggunaan konsumsi akhir²⁸.

Selanjutnya transaksi-transaksi tersebut yang akan menjadi dasar penggolongan PDRB menurut permintaan/penggunaan akhir²⁹ ini akan dibedakan:

1. Konsumsi akhir
 - Rumah Tangga (RT)
 - Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT)
 - Pemerintah (Pem)
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
3. Perubahan inventori (persediaan)
4. Perdagangan antar-wilayah
 - Keluar (domestik, *outflow*)
 - Masuk (domestik, *inflow*)

²⁶ Saat ini sudah diubah menjadi Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

²⁷ Terdiri atas rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus didasarkan pada konsep residen.

²⁸ Disebut akhir karena tidak akan diproses produksi lebih lanjut dalam wilayah domestik. Komponen selain permintaan akhir adalah permintaan antara. Sementara itu untuk barang impor meskipun sebagian dari produknya untuk tujuan diproses lebih lanjut, tetapi diperlakukan berbeda. Sama halnya dengan ekspor, data impor hanya disajikan secara total.

²⁹ Dengan kata lain disebut sebagai pengeluaran konsumsi akhir.

5. Perdagangan antar-negara
 - Ekspor (luar negeri, *outflow*)
 - Impor (luar negeri, *inflow*)
6. Diskrepansi statistik³⁰

Dengan demikian maka penggolongan tersebut merupakan kombinasi antara jenis transaksi, pelaku transaksi, serta wilayah transaksi yang kesemuanya dirinci sesuai dengan kepentingan analisis.

Penilaian PDRB menurut pengeluaran/penggunaan lazim dilakukan dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*), yang dengan kata lain disebut sebagai pendekatan tidak langsung (*indirect method*). Sampai sekarang, pendekatan dengan cara konvensional ini masih digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia karena dianggap sebagai cara yang relatif mudah, praktis dan efisien. Pendekatan arus komoditi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap berbagai produk barang dan jasa (komoditi) baik yang berasal dari produk domestik maupun impor yang dikonsumsi oleh pelaku-pelaku ekonomi bersangkutan. Karena informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen pelaku konsumsi akhir bersangkutan belum memadai (kelengkapan, akurasi dan kesinambungan) menyebabkan metode ini masih direkomendasikan sampai saat ini. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar data konsumsi akhir ini diperoleh dari hasil sistem pencatatan administrasi³¹.

3.2. Definisi Konsep Secara Umum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa data PDRB ini sebagian besar diturunkan dari data neraca produksi. Khusus bagi PDRB menurut penggunaan penggolongan dilihat dari struktur sisi keluaran (*output*). Pada sisi ini dapat ditelusuri lebih jauh penggunaan atas produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut. Dengan demikian maka seluruh transaksi yang ada dipastikan mempunyai keterkaitan dengan transaksi pada neraca-neraca lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (*articulated*). Neraca produksi merupakan neraca yang pertama kali terbentuk dalam perangkat data sistem neraca nasional (SNN) yang pada gilirannya akan menurunkan neraca-neraca berikutnya³². Dari neraca produksi inilah pengukuran komponen PDRB melalui kedua pendekatan tadi dapat disajikan. Beberapa konsep dasar yang melatarbelakangi penyusunan neraca nasional

³⁰ Perbedaan dengan hasil perhitungan PDRB dari pendekatan lain (umumnya sisi sektoral).

³¹ Kecuali untuk konsumsi rumah tangga yang diperoleh dari berbagai survei rumah tangga.

³² Didasarkan transaksi pada neraca barang dan jasa.

pada umumnya serta PDRB diuraikan di bawah ini.

- **Wilayah ekonomi**

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi: wilayah udara, daratan dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

- **Ekonomi Domestik**

Ekonomi domestik adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, yang dibedakan dengan luar daerah berdasarkan konsep **residen**, bukan karena unsur kedaerahan yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi yang dikelola oleh residen.

- **Residen**

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi³³ (*centre of economic interest*) dalam batas ekonomi suatu daerah dan lama tinggal (*length of stay*) yang relatif panjang (satu tahun). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu daerah dianggap sebagai sektor luar daerah/luar negeri/asing (*non-resident*).

- **Produk**

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di wilayah domestik, pada satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*goods*) serta jasa (*services*).

- **Produk Domestik**

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor. Total produk yang berasal dari produk domestik dan impor disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

³³ Wilayah di mana masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan.

- **Neraca Produksi**

Neraca produksi adalah neraca dasar yang disajikan dalam format “T” yang berisikan data tentang perilaku dan proses produksi, yang alur prosesnya terdiri dari input, transformasi serta keluaran (*output*). Pada lajur kiri neraca disajikan data struktur input yang menggambarkan pengeluaran dari kegiatan produksi, yang secara garis besar dibedakan atas input antara dan input primer (nilai tambah bruto); sedangkan pada lajur kanan diuraikan struktur keluaran yang bisa digolongkan lebih jauh menurut sifat produk, jenis produk, serta tujuan penggunaan produk.

- **Domestik**

Batas domestik adalah batas teritorial kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritorial suatu negara secara hukum (batas administrasi), merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

- **Nasional dan Regional**

PDRB adalah segmen PDB nasional berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi, yang mengacu pada pembagian wilayah administrasi pemerintah yang berlaku. Secara hirarki tingkat agregasi produk terdiri dari tingkat nasional (Indonesia), provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan kepentingan analisis maka batasan regional bisa pula dibuat menurut kelompok lain, seperti pengelompokan menurut pulau atau kepulauan atau pengelompokan menurut wilayah pembangunan.

- **PDRB dan PDRN**

PDRB merupakan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik yang dibedakan dengan PDRN karena unsur penyusutan. Produk domestik regional bruto (PDRB) dikurangi dengan penyusutan sama dengan produk domestik regional neto (PDRN). Dalam pengukuran PDRB baik menurut sektor maupun menurut penggunaan unsur penyusutan harus diperhitungkan untuk menghindari terjadinya pencatatan yang tumpang tindih.

Penghitungan atau pengukuran PDRB menurut lapangan usaha (nilai tambah sektor produksi) maupun PDRB menurut pengeluaran/penggunaan dilakukan dengan metode

dan tatacara penghitungan yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Apabila penghitungan dari sisi lapangan usaha lebih menekankan pada proses penciptaan (*distribusi primer*) oleh berbagai sektor ekonomi maka penghitungan PDRB menurut penggunaan lebih menekankan pada bagaimana pendapatan masyarakat digunakan atau dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi akhir. Konsumsi akhir produk barang dan jasa bisa berasal dari produk domestik bisa pula dari wilayah lain (termasuk impor).

Pada umumnya cara pengukuran beberapa komponen PDRB menurut pengeluaran menggunakan **metode arus komoditi** (*commodity flow method*), yaitu dengan cara menelusuri alokasi barang dan jasa yang tersedia (*supply*) yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di suatu wilayah, pada satu kurun waktu tertentu. Barang dan jasa tersebut bisa berasal dari produk domestik maupun impor (baik yang berasal dari wilayah lain maupun negara lain). Banyak negara di dunia masih menggunakan metode ini karena alasan kemudahan teknisnya. Metode ini amat tergantung pada sumber informasi pokok tentang penyediaan (*supply*) berbagai produk barang dan jasa di wilayah tersebut. Melalui pendekatan ini dapat dilihat konsistensi dan keterkaitan antara transaksi *supply* dengan *demand* berbagai pelaku ekonomi.

Salah satu parameter atau data agregat pokok yang dapat diturunkan dari perhitungan PDRB adalah **pertumbuhan ekonomi** atau yang biasanya disebut sebagai pertumbuhan **riil**. Parameter ini memberikan indikasi tentang perubahan kuantitas produk atau volume yang menjadi konsumsi akhir. Apabila pertumbuhan dari masing-masing komponen diagregasikan maka akan membentuk pertumbuhan ekonomi. Lazimnya metode harga konstan³⁴ yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan metode yaitu **i) revaluasi, ii) ekstrapolasi dan iii) deflasi**³⁵. Tentu saja pendekatan mana dari ketiga metode tersebut yang dipakai harus disesuaikan dengan tingkat ketersediaan data (volume dan harga) yang ada pada masing-masing komoditi komponen PDRB.

Bagi PDRB menurut pengeluaran metode **deflasi**³⁶ merupakan pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan karena pertimbangan praktis, yaitu tidak tersedianya data volume konsumsi akhir pada masing-masing komoditi komponen PDRB.

³⁴ Konsep SNA'68.

³⁵ Selain itu deflasi berganda (*double deflation*) merupakan pendekatan lainnya.

³⁶ Proses sebaliknya disebut sebagai reflasi.

Deflasi adalah cara menghitung nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Apabila perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang perubahan volume maupun harga, maka PDRB atas dasar harga konstan lebih menggambarkan tentang perubahan volume (perubahan harga sudah dieliminasi).

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi maka buku manual SNA'93 merekomendasikan untuk mengubah metode perhitungan tersebut dengan menggunakan metode **indeks volume berantai** (*chain volume index*). Perbedaan pokok pengukuran pertumbuhan riil antara metode tersebut dengan metode yang konvensional adalah dalam cara pembobotannya. Menurut pengalaman pendekatan pengukuran melalui indeks volume berantai ini dianggap lebih tepat dan efektif untuk digunakan dalam menghitung pertumbuhan riil. Bahkan metode yang terbaru ini menegaskan bahwa untuk mengukur pertumbuhan sebaiknya tidak menggunakan tahun dasar sebagai penimbang (bobot), karena apabila selang waktu penghitungan antara tahun dasar dengan tahun-tahun berjalan relatif sangat jauh, maka tingkat akurasi pengukuran pertumbuhan ekonomi menjadi menurun.

Metode *chain volume index* untuk menghitung pertumbuhan riil masing-masing tahun berjalan (t) pada setiap komponen PDRB menggunakan bobot volume tahun sebelumnya ($t-1$). Pembobotan tersebut didasarkan pada struktur ekonomi waktu sebelumnya (tahun berjalan). Alasannya karena penggunaan struktur ekonomi pada tahun referensi (dasar) kemungkinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang tengah berlangsung. Penggunaan tahun sebelumnya sebagai referensi waktu diasumsikan mendekati kondisi yang tengah berlangsung (tahun t). Dengan demikian maka perubahan dari metode konvensional ke metode ini menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi, yang besarnya tentu sangat bervariasi. Namun demikian, metode indeks volume berantai sampai dengan saat ini masih belum diterapkan dalam sistem neraca nasional Indonesia dan sistem neraca regional Indonesia

3.3. Komponen PDRB Menurut Penggunaan

3.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai

konsumen akhir (*final consumer*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka secara bersama mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

3.3.1.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikurangi hasil penjualan neto³⁷ barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu.

3.3.1.2. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi seluruh pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa oleh penduduk³⁸ suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok ;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*) ;
- segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala ;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, tanaman hias ;
- barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan sebagainya;
- jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga;

³⁷ Penjualan dikurangi pembelian.

³⁸ Menggunakan konsep residen.

- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri selain masuk sebagai konsumsi rumah tangga juga diperlakukan sebagai transaksi impor, sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan.

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali) seperti hasil karya seni dan barang antik (yang dihitung nilai marjinnya). Meskipun barang tersebut sudah dinilai pada saat diproduksi, tetapi karena nilainya cenderung naik maka umumnya dari waktu ke waktu harga barang tersebut relatif lebih mahal. Pembelian atas produk lama semacam ini diperlakukan sebagai investasi barang berharga.

Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri adalah karena dalam hal ini rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi diri sendiri. Imputasi sewa rumah adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut adalah milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkan adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak (karena mendapat subsidi).

Dalam komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk imputasi atas jasa layanan lembaga keuangan (seperti bank) yang disebut sebagai FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*)³⁹. Pengeluaran tersebut berupa perkiraan nilai jasa layanan lembaga keuangan atas tabungan dan pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk transaksi bunga⁴⁰. Transaksi pembayaran maupun penerimaan bunga oleh rumah tangga tidak digolongkan sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai bagian dari transaksi penerimaan lain (*property income*).

Pengeluaran rumah tangga berupa barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal tidak termasuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, contohnya pembelian barang untuk keperluan usaha, perbaikan besar dan pembelian rumah, dan sebagainya.

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan transfer baik berupa uang atau barang tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga.

³⁹ Dalam konsep SNA'68 disebut sebagai *Imputed Bank Service Charge (IBSC)*.

3.3.1.3. Sumber Data

Sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain adalah:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu konsumsi seminggu untuk kelompok makanan, pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan, dan pengeluaran perkapita setahun untuk kelompok barang tahan lama.
2. Survei Biaya Hidup (SBH).

3.3.1.4. Metode Penghitungan

Penghitungan konsumsi rumah tangga selama ini berdasarkan data hasil Susenas. Akan tetapi, karena data konsumsi hasil Susenas cenderung *under estimate* untuk konsumsi rumah tangga perkotaan, terutama untuk barang-barang non makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyusunan *mark up* untuk data konsumsi rumah tangga di perkotaan.

Pada tahun 2007, BPS mengadakan kegiatan SBH di beberapa kota di Indonesia dengan metode pendataan menggunakan buku harian selama 1 tahun. Pada saat yang bersamaan BPS juga mengadakan Susenas yang mengumpulkan data konsumsi rumah tangga. Momen ini akan dimanfaatkan untuk mencari seberapa besar *mark-up* konsumsi rumah tangga kota, dengan asumsi pengumpulan data SBH adalah lebih baik.

Cara yang dilakukan adalah membandingkan hasil SBH dengan hasil Susenas di kota yang sama, komoditi per komoditi. Asumsinya, jika pendataan dilakukan di kota yang sama maka perilaku konsumsi rumah tangganya seharusnya sama. Maka rasio antara data SBH dengan Susenas akan menunjukkan berapa *mark up* yang diperlukan untuk mengangkat data Susenas kota dan di kelompok komoditi yang mana. *Mark up* konsumsi rumah tangga kota tersebut dapat digunakan untuk *mark up* hasil Susenas kota untuk beberapa tahun sampai tersedia data yang lebih baik.

Dengan demikian, total konsumsi rumah tangga pada tahun t adalah susenas daerah perkotaan yang sudah di *mark up* ditambah dengan Susenas daerah perdesaan.

$$C_t = (C_{kti} * M_i) + C_{dt}$$

dimana:

⁴⁰ Bunga diperlakukan sebagai pendapatan kepemilikan (*property income*), yang bukan terjadi dari proses

- C_t = Konsumsi rumah tangga tahun t
- C_{kti} = Konsumsi rumah tangga kota untuk komoditi i tahun ke t , berdasarkan data Susenas kota
- C_{dt} = Konsumsi rumah tangga desa tahun ke- t , berdasarkan data Susenas desa
- M_i = Rasio SBH dan Susenas di kota yang sama (penghitungan akan lebih baik jika dilakukan berdasarkan komoditi atau kelompok komoditi).

Penghitungan tersebut di atas menunjukkan konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku. Untuk konsumsi rumah tangga harga konstan, konsumsi rumah tangga di kota harga berlaku dikelompokkan menjadi 7 kelompok indeks harga konsumen (IHK). Kemudian konsumsi rumah tangga kota diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator IHK yang sesuai. Sedangkan konsumsi rumah tangga di desa diperoleh dengan metode yang sama dengan deflator indeks konsumen rumah tangga (IKRT) merupakan bagian dari indeks yang dibayar petani (IB) pada indeks nilai tukar petani (NTP). Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan diperoleh dari penjumlahan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan kota dan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan di desa. Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada lembar kerja konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.1
Contoh Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga Tahunan
Atas Dasar Harga Berlaku

Kode	Komoditi	Menghitung <i>mark-up</i>		Menghitung konsumsi rumah tangga tahun ke- t				
		2007		<i>Mark-up</i>	Susenas Kota	Susenas Kota setelah <i>mark-up</i>	Susenas Desa	Kons. Rumah tangga
		Susenas Kota	SBH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
00000	UMUM / TOTAL	5.332.569	3.865.493	1,6625	5.332.569	8.865.493	3.002.390	15.071.073
10000	BAHAN MAKANAN	1.478.564	1.653.044	3,1470	1.478.564	4.653.044	1.245.608	5.898.652
10100	PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA	416.035	922.306	2,2169	416.035	922.306	502.440	1.424.746
10101	Beras	381.055	805.620	2,1142	381.055	805.620	445.557	1.251.177
10200	DAGING-DAN HASIL-HASILNYA	114.786	606.502	5,2837	114.786	606.502	55.072	661.573
10300	IKAN SEGAR	177.598	907.027	5,1072	177.598	907.027	136.918	1.043.945
10400	IKAN DIAWETKAN	10.196	29.975	2,9400	10.196	29.975	12.908	42.882
10500	TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA	180.170	566.849	3,1462	180.170	566.849	78.677	645.526
10506	Susu Bubuk	49.504	212.254	4,2876	49.504	212.254	9.286	221.540

produksi.

Kode	Komoditi	Menghitung		Menghitung konsumsi rumah tangga tahun ke-t				
		mark-up		Mark-up	Susenas Kota	Susenas Kota setelah mark-up	Susenas Desa	Kons. Rumah tangga
		2007	SBH					
(1)	(2)	Susenas Kota (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10509	Susu Kental Manis	22.406	60.386	2,6951	22.406	60.386	14.092	74.479
10512	Susu Untuk Bayi	38.849	76.793	1,9767	38.849	76.793	11.403	88.196
10514	Telur Ayam Kampung	3.862	5.160	1,3362	3.862	5.160	4.566	9.727
10515	Telur Ayam Ras	52.331	151.733	2,8995	52.331	151.733	33.238	184.971
10600	SAYUR-SAYURAN	173.012	390.024	2,2543	173.012	390.024	160.540	550.564
10700	KACANG-KACANGAN	73.029	171.797	2,3525	73.029	171.797	54.298	226.095
10800	BUAH-BUAHAN	138.044	467.851	3,3891	138.044	467.851	84.110	551.961
10900	BUMBU-BUMBUAN	51.910	361.332	6,9607	51.910	361.332	43.276	404.608
11000	LEMAK DAN MINYAK	74.708	260.557	3,4877	74.708	260.557	70.447	331.004
11002	Margarine	1.904	16.686	8,7623	1.904	16.686	342	17.029
11004	Minyak Goreng	15.159	49.299	3,2522	15.159	49.299	18.171	67.471
11100	BAHAN MAKANAN LAINNYA	69.076	52.494	0,7599	69.076	52.494	46.924	99.418
11101	Bahan Agar-agar	1.191	7.169	6,0179	1.191	7.169	473	7.642
20000	MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU	969.592	3.928.811	4,0520	969.592	3.928.811	562.521	4.491.332
20100	MAKANAN JADI	439.920	2.281.166	5,1854	439.920	2.281.166	237.802	2.518.968
20106	Biskuit	13.983	95.612	6,8379	13.983	95.612	8.149	103.761
20133	Makanan Ringan/Snack	33.976	162.801	4,7916	33.976	162.801	26.107	188.908
20200	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	191.846	633.925	3,3043	191.846	633.925	131.213	765.138
20201	Air Kemasan	27.217	520.476	19,1235	27.217	520.476	4.750	525.226
20206	Gula Pasir	50.538	164.966	3,2642	50.538	164.966	52.507	217.473
20210	Kopi Bubuk	21.148	55.145	2,6075	21.148	55.145	21.670	76.815
20213	Minuman Kesegaran	3.773	52.708	13,9714	3.773	52.708	1.760	54.469
20217	The	12.003	38.325	3,1929	12.003	38.325	9.147	47.472
20300	TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL	240.538	764.599	3,1787	240.538	764.599	193.505	958.104
20302	Bir / anggur	1.410	6.401	4,5403	1.410	6.401	854	7.255
20310	Rokok Kretek	58.468	100.514	1,7191	58.468	100.514	61.641	162.155
20311	Rokok Kretek Filter	158.713	918.367	5,7863	158.713	918.367	101.306	1.019.673
20312	Rokok Putih	17.152	107.706	6,2793	17.152	107.706	10.261	117.967
20317/9	Tuak / bir hitam	901	948	1,0517	901	948	1.751	2.699
30000	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	1.689.686	497.383	0,8862	1.689.686	1.497.383	745.588	2.242.971
30100	BIAYA TEMPAT TINGGAL	747.065	774.107	1,0362	747.065	774.107	224.449	998.556
30129	Kontrak Rumah	41.471	17.068	0,4116	41.471	17.068	1.311	18.380
30154	Sewa Rumah	572.445	519.020	9,0664	572.445	519.020	173.803	5.363.823
30200	BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR	380.912	268.878	0,7059	380.912	268.878	217.478	486.355
30206	Gas Elpiji	29.697	31.734	1,0686	29.697	31.734	5.541	37.275

Kode	Komoditi	Menghitung			Menghitung konsumsi rumah tangga tahun ke-t			
		mark-up		Mark-up	Susenas Kota	Susenas Kota setelah mark-up	Susenas Desa	Kons. Rumah tangga
		2007	SBH					
(1)	(2)	Susenas Kota (3)	SBH (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30216	Minyak Tanah	98.435	67.494	0,6857	98.435	67.494	56.729	124.224
30219	Tarip Air Minum PAM	36.166	65.292	1,8054	36.166	65.292	5.045	70.337
30221	Tarip Listrik	173.317	150.306	0,8672	173.317	150.306	66.765	217.070
30300	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	349.256	199.282	0,5706	349.256	199.282	211.960	411.242
30400	PENYELENGGARAAN RUMAH TANGGA	212.453	301.380	1,4186	212.453	301.380	91.703	393.082
30414	Pengharum Cucian/Pelembut	9.301	9.886	1,0629	9.301	9.886	2.710	12.596
30418	Sabun Cuci Batangan	35.152	5.512	0,1568	35.152	5.512	26.776	32.288
30424	Upah Pembantu RT	62.925	100.073	1,5904	62.925	100.073	4.932	105.005
40000	SANDANG	180.724	201.337	1,1141	180.724	201.337	108.444	309.780
40100	SANDANG LAKI-LAKI	46.578	52.656	1,1305	46.578	52.656	27.806	80.463
40106	Bahan Celana	50.732	68.897	1,3580	50.732	68.897	28.917	97.814
40111	Celana Dalam Pria	32.617	34.962	1,0719	32.617	34.962	22.694	57.656
40134	Sandal Kulit	50.797	46.858	0,9225	50.797	46.858	29.027	75.884
40200	SANDANG WANITA	7.481	12.349	1,6508	7.481	12.349	4.364	16.713
40205	Baju Kaos/T-Shirt	29.356	3.591	0,1223	29.356	3.591	16.557	20.148
40241	Sandal Kulit	180.724	201.337	1,1141	180.724	201.337	108.444	309.780
40300	SANDANG ANAK-ANAK	46.578	52.656	1,1305	46.578	52.656	27.806	80.463
40304	Baju Kaos/T-Shirt	50.732	68.897	1,3580	50.732	68.897	28.917	97.814
40322	Sandal	32.617	34.962	1,0719	32.617	34.962	22.694	57.656
40400	BARANG PRIBADI DAN SANDANG LAINNYA	50.797	46.858	0,9225	50.797	46.858	29.027	75.884
40414	Ongkos Jahit	7.481	12.349	1,6508	7.481	12.349	4.364	16.713
40421	Semir Sepatu	29.356	3.591	0,1223	29.356	3.591	16.557	20.148
50000	KESEHATAN	173.566	219.890	1,2669	173.566	219.890	76.095	295.985
50100	JASA KESEHATAN	123.598	599.874	4,8534	123.598	599.874	52.239	652.114
50105	Dokter Umum	22.108	16.183	0,7320	22.108	16.183	9.204	25.387
50108	Tarif Puskesmas	3.950	2.389	0,6049	3.950	2.389	4.668	7.057
50109	Tarif Rumah Sakit	86.292	92.398	1,0708	86.292	92.398	26.709	119.108
50200	OBAT-OBATAN	49.969	63.849	1,2778	49.969	63.849	23.855	87.704
60000	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	219.549	355.767	1,6204	219.549	355.767	57.419	413.186
60100	JASA PENDIDIKAN	173.390	195.056	1,1250	173.390	195.056	39.450	234.506
60200	KURSUS-KURSUS / PELATIHAN	8.177	35.674	4,3627	8.177	35.674	1.807	37.481
60300	PERLENGKAPAN / PERALATAN PENDIDIKAN	37.982	52.470	1,3814	37.982	52.470	16.162	68.632
60304	Buku Bacaan/Pelajaran	27.554	11.979	0,4348	27.554	11.979	9.361	21.340
60310	Buku Tulis Bergaris	10.428	11.085	1,0630	10.428	11.085	6.802	17.887

Kode	Komoditi	Menghitung <i>mark-up</i>		Menghitung konsumsi rumah tangga tahun ke-t				
		2007		<i>Mark-up</i>	Susenas Kota	Susenas Kota setelah <i>mark-up</i>	Susenas Desa	Kons. Rumah tangga
		Susenas Kota	SBH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70000	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	620.887	.212.451	1,9528	620.887	1.212.451	206.715	1.419.166
70100	TRANSPOR	395.868	732.224	1,8497	395.868	732.224	155.161	887.385
70103	Angkutan Umum	162.642	159.189	0,9788	162.642	159.189	55.932	215.122
70106	Bahan Pelumas/Oli	24.937	24.350	0,9765	24.937	24.350	12.846	37.197
70108	Bensin	202.641	245.010	1,2091	202.641	245.010	81.651	326.661
70120	Solar	5.648	15.300	2,7091	5.648	15.300	4.731	20.031
70200	KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN	202.090	418.549	2,0711	202.090	418.549	41.961	460.510
70208	Pulsa HP	127.725	254.675	1,9939	127.725	254.675	33.047	287.722
70300	SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR	22.929	65.599	2,8609	22.929	65.599	9.592	75.192
70317	Perbaikan Ringan Kendaraan	22.929	7.268	0,3170	22.929	7.268	9.592	16.861

Tabel 3.2
Contoh Kerja Penghitungan Konsumsi Rumah Tangga Tahunan Atas Dasar Harga Konstan

Kode	Komoditi	Konsumsi Rumah Tangga di Kota Atas Dasar Harga Berlaku	IHK Tahun 2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000	Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
00000	UMUM / TOTAL	15.071.073	2,2038	6.621.831	66.792
10000	BAHAN MAKANAN	4.653.044	2,2832	2.583.513	26.142
20000	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	3.928.811	0.	2.056.746	19.905
30000	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	1.497.383	2,3361	960.147	9.940
40000	SANDANG	201.337	2,1140	146.540	1.373
50000	KESEHATAN	219.890	1,9848	149.125	1.312
60000	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	355.767	2,4265	170.283	1.831
70000	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	1.212.451	2,5549	555.477	6.289

Karena IHK dan IKRT yang digunakan mempunyai tahun dasar yang berbeda dengan tahun dasar penghitungan PDRB, maka keduanya perlu disesuaikan tahun dasarnya terlebih dahulu agar antara IHK, IKRT dan PDRB sama-sama menggunakan tahun dasar 2000.

3.3.1.5. Keterbatasan dan Perlakuan Khusus

Rumah tangga sering kali melakukan kegiatan usaha, sehingga di samping melakukan pengeluaran konsumsi, boleh jadi juga menggunakan barang dan jasa untuk kegiatan usaha. Misalnya dalam kasus pembelian atau penggunaan mobil dan bensin. Apabila mobil tersebut dibeli dengan tujuan untuk kegiatan usaha, maka bukan merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga namun termasuk dalam PMTB. Demikian juga penggunaan bensin, apabila untuk kegiatan usaha maka merupakan biaya antara usaha tersebut. Apabila pembelian bensin bukan untuk kegiatan usaha, maka pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Para pengusaha terkadang menyediakan barang dan jasa seperti perumahan, makanan, atau pakaian yang bebas digunakan oleh pegawai. Barang dan jasa tersebut harus dicatat sebagai upah dan gaji dalam bentuk barang, dan termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tidak demikian halnya pengeluaran atas barang dan jasa oleh majikan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, efisiensi, dan kinerja pegawai misalnya tes kesehatan, program pendidikan dan turnamen olah raga. Pengeluaran semacam ini dicatat sebagai pengeluaran biaya antara kegiatan usaha dan bukan merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pembayaran retribusi atau iuran kepada pemerintah seperti biaya pembuatan KTP dan akte kelahiran termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan pembayaran pajak seperti pajak pendapatan, pajak airport, pajak binatang diperlakukan sebagai transfer atau tidak termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pemberian barang atau jasa oleh pemerintah, misalnya dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila rumah tangga bebas memilih barang/jasa yang diinginkan maka diklasifikasikan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan diperlakukan sebagai transfer dari pemerintah ke rumah tangga.

Penilaian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi biasanya didasarkan pada harga pembelian. Di dalamnya termasuk berbagai biaya yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Biaya yang dimaksud adalah biaya transpor, biaya instalasi, biaya lainnya yang harus dibayar oleh pembeli. Sedangkan untuk barang yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga produsen dinilai atas dasar harga produsen. Apabila tidak terdapat harga produsen karena barang/jasa tersebut tidak dijual oleh produsen, maka dapat dinilai atas dasar harga pokok penjualan barang dan jasa tersebut.

Di sisi lain penerimaan rumah tangga di luar balas jasa faktor produksi dan penerimaan kepemilikan lain, mencakup juga penerimaan dari penjualan barang bekas. Penjualan neto barang bekas adalah sama dengan nilai penjualan dikurangi pembelian barang bekas yang dijual.

3.3.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga.

3.3.2.1. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Sebagian besar kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

3.3.2.2. Ruang Lingkup

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non profit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya ada LNP yang melayani rumah tangga, dan ada juga yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah LNP yang khusus melayani rumah tangga. Klasifikasi unit LNP menurut sektor kelembagaan terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.
Klasifikasi jenis LNP menurut Sektor Kelembagaan

Kelompok LNP	Jenis LNP	Sektor kelembagaan
▪ Produsen Jasa Komersial	▪ melayani masyarakat umum	Bisnis
	▪ melayani dunia usaha, kecuali yang dibiayai pemerintah	Bisnis
▪ Produsen Jasa Non Komersial	▪ dibiayai pemerintah, baik keberadaannya terikat maupun tidak	Pemerintahan Umum
	▪ dibiayai masyarakat dan khusus melayani anggota organisasi	LNPRT
	▪ dibiayai masyarakat dan melayani masyarakat umum	LNPRT

Dalam SNA'93, LNPRT diperlakukan sebagai sektor institusi (pelaku ekonomi) tersendiri di luar pelaku rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri atau luar wilayah.

Dari penggolongan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan lembaga non profit dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Lembaga non profit yang menghasilkan jasa komersial

LNP pada kelompok ini adalah lembaga yang menjual jasa layanannya pada tingkat harga pasar (komersial), yaitu harga yang ditentukan atas dasar biaya produksi. Jasa yang dihasilkan oleh lembaga semacam ini secara keseluruhan berpengaruh terhadap persediaan (*supply*) jenis jasa yang bersangkutan. Menurut bentuknya LNP ini dibedakan atas :

- i. LNP yang menyediakan jasa layanan bagi masyarakat umum seperti lembaga penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya.
- ii. LNP yang menyediakan jasa layanan bagi kalangan dunia usaha seperti serikat pekerja, asosiasi bisnis, kamar dagang, dan sejenisnya.

2. Lembaga non profit yang menghasilkan jasa non komersial

LNP pada kelompok ini adalah lembaga yang menjual jasa layanan pada tingkat harga dibawah harga pasar (non-komersial), yaitu harga yang tidak didasarkan pada biaya produksi atau bahkan jasa layanan diberikan secara cuma-cuma. Menurut bentuknya LNP ini dibedakan atas :

- i. LNP yang kegiatannya sebahagian besar dibiayai pemerintah, baik yang keberadaannya terikat (pada pemerintah) maupun tidak, seperti Palang merah Indonesia (PMI), Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Dharma Wanita, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dll.
- ii. LNP yang dibentuk dan dibiayai oleh anggota masyarakat. Lembaga semacam ini disebut sebagai lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Lembaga non profit yang termasuk sebagai LNPRT dibedakan atas:

- LNP yang menyediakan jasa khususnya untuk anggota, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan sejenisnya.
- LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti LSM, organisasi sosial, lembaga bantuan kemanusiaan, lembaga pemberi bea siswa, dan sejenisnya.

Dengan demikian yang dimaksud LNPRT adalah lembaga non profit yang menghasilkan jasa sosial kemasyarakatan non komersial dengan dana dari masyarakat atau iuran anggota. Produknya dijual pada tingkat di bawah harga pasar atau bahkan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat atau anggota lembaga.

Ciri-ciri unit lembaga non profit adalah sebagai berikut :

- i. lembaga non profit umumnya lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ii. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
- iii. setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- iv. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- v. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Dengan demikian lembaga non profit sebagai induk dari LNPRT adalah lembaga yang keberadaannya bersifat formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan. Tujuan pembentukannya tidak dimaksudkan sebagai sumber pendapatan ataupun profit bagi unit yang mengontrol dan membiayainya.

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi. Tujuan, dan terdiri dari:

- i. ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, ICMI,

- ii. ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila,
- iii. ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan
- iv. ormas lainnya seperti Kosgoro, Soksi, dan Pepabri.

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti werdha, panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari :

- i. Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya.
- ii. Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti PII, IDI, dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olah raga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari :

- i. Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;
- ii. Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan;
- iii. Organisasi Olah Raga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia; dan
- iv. Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari :

- i. LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;

- ii. LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- iii. LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;
- iv. LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti LSP.

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- i. Organisasi Islam, seperti Lembaga Da'wah, Remaja Masjid, Majelis Ta'lim;
- ii. Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- iii. Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisatas dasar harga Hindu Dharma;
- iv. Perkumpulan Jamaah Masjid;
- v. Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- vi. Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari :

- i. Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- ii. Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;
- iii. Lembaga Bantuan Lainnya.

3.2.2.3. Metode Estimasi

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai pengeluaran konsumsi LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan kepada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara)⁴¹ ditambah biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan

⁴¹ Pengeluaran antara ini diperlakukan sebagai konsumsi akhir

lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metoda langsung maupun metoda tidak langsung. Metoda langsung yaitu metoda penghitungan yang didasarkan pada data hasil survei atau sensus. Sedangkan metode tidak langsung didasarkan pada pengeluaran lembaga lain (contoh RT) untuk membiayai kegiatan LNPRT.

A. Metode Langsung

Dengan menggunakan metode langsung data pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh melalui pencacahan secara sample dari survei khusus lembaga non profit rumah tangga (SKLNPRRT). Nilai yang dimaksud merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

Yang diperoleh adalah *rata-rata biaya layanan per lembaga*, yaitu : $\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$

di mana x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i

\bar{x}_i = rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i

n_i = banyaknya sampel LNPRT kode-i

Jika rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga (\bar{x}_i) dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode i (N_i), maka akan diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT kode i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$.

Nilai estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan penjumlahan nilai pengeluaran konsumsi seluruh bentuk LNPRT

$$\left(\sum_{i=1}^7 x_i \text{ atau } \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i \cdot N_i \right)$$

Perhitungan biaya layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung menggunakan bobot IHK untuk masing-masing rincian pengeluaran dengan rumus : $m_k = \frac{x_k}{a_k}$,

dimana :

m_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (atas dasar harga konstan).

x_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (atas dasar harga berlaku).

k = rincian pengeluaran = 1,2,...,n

a_k = IHK untuk rincian pengeluaran ke-k,

Sehingga total nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk masing-masing lembaga adalah:

$$M = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}$$

Dengan cara perhitungan di atas (M), maka dapat dihitung nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk setiap bentuk lembaga sebanyak sampelnya (n_1), sebagai berikut:

$$Y_i = \sum_{j=1}^{n_i} M_{ij}$$

di mana Y_i = Nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan)

M_{ij} = Biaya layanan atas dasar harga konstan lembaga ke j dari bentuk lembaga kode i

i = Kode bentuk lembaga 1,2,...,7

j = urutan lembaga dari bentuk lembaga kode i =1,2,..., n_i ,

Sedangkan nilai total pengeluaran konsumsi untuk seluruh lembaga atas dasar harga konstan adalah $\sum_{i=1}^7 Y_i$ atau $\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$ (i = kode lembaga=1,2,...,7 ; j = no urut lembaga kode i = 1,2,..., n_i).

Total biaya layanan masing-masing bentuk LNPRT atas dasar harga konstan (M_i) dibagi dengan banyaknya sampel untuk setiap bentuk lembaga i yang bersangkutan $\left(\bar{M}_i = \frac{M_i}{n_i} \right)$ akan menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan). Jika dikalikan dengan populasi masing-masing bentuk lembaga atau $(\bar{M}_i . N_i)$ hasil ini akan menghasilkan nilai estimasi pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan). Penjumlahan dari nilai pengeluaran konsumsi dari

seluruh bentuk LNPRT $\left(\sum_{i=1}^7 \overline{M}_i \cdot N_i \right)$ merupakan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT (atas dasar harga konstan).

B. Metode Tidak Langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Caranya adalah dengan menghitung besaran pengeluaran unit atau lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut. Sebagai contoh bila pengeluaran untuk LNPRT adalah sebesar n persen dari total nilai pengeluaran konsumsi RT, maka besaran pendapatan LNPRT adalah n persen dikali total pengeluaran konsumsi RT (pendekatan pengeluaran). Untuk menghitung komposisi pengeluaran LNPRT digunakan rasio dari hasil survei khusus. Dapat diasumsikan bahwa LNPRT pada dasarnya tidak bertujuan mencari untung, maka total penerimaan sama dengan total pengeluaran.

Untuk mengukur pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi LNPRT dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berikut :

- i. metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku dengan IHK yang sesuai; dan
- ii. metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan mengalikan rasio (tetap)⁴² terhadap nilai pengeluaran konsumsi RT atas dasar harga konstan.

$$Y_{LNPRT} = r \% \times C_{RT}$$

dimana:

Y_{LNPRT} = Pendapatan LNPRT

$r \%$ = proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT

C_{RT} = Pengeluaran total konsumsi rumah tangga

Dengan asumsi pendapatan LNPRT sama dengan konsumsi LNPRT, maka

$$Y_{LNPRT} = (C_{LNPRT})$$

3.3.2.4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh dari hasil survei khusus. Data tersebut dalam bentuk nilai pengeluaran atas barang dan jasa oleh lembaga serta barang dan jasa dari transfer pihak lain, yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah IHK per kelompok pengeluaran. Data ini digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan.

Untuk melakukan estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT masih diperlukan data lain, yaitu jumlah populasi LNPRT masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan 'listing' ke instansi atau lembaga pembina dari unit LNPRT yang bersangkutan, maupun dengan pengecekan langsung ke lapangan.

3.3.2.5 Keterbatasan dan Masalah Penghitungan

Masalah yang biasa ditemukan dalam perhitungan adalah:

- Adanya pengeluaran yang sangat besar bila dibandingkan dengan pengeluaran yang umum dikeluarkan lembaga. Hal ini terjadi karena masih bercampurnya pengeluaran untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan lembaga, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan ekonomis produktif.
- Terkadang sulit menentukan bentuk lembaga suatu LNPRT jika hanya melihat dari nama lembaga. Suatu lembaga dengan satu nama terkadang melakukan kegiatan lebih dari satu, seperti layanan panti asuhan yatim piatu, bantuan sosial dan pendidikan. Lembaga semacam ini sulit dipisahkan menurut bentuknya, karena lembaga biasanya hanya mempunyai satu pembukuan.
- Banyak lembaga yang tidak mempunyai catatan pembukuan yang baik, sehingga banyak pengeluaran yang ditanyakan sulit untuk dijawab.

3.3.2.6 Perlakuan Khusus

Jika lembaga yang mempunyai lebih dari satu kegiatan layanan, sedapat mungkin pengeluaran dipisahkan untuk masing-masing jenis kegiatan. Pada umumnya LNPRT macam ini mempunyai ciri kegiatan yang berbeda, sehingga mengakibatkan struktur pengeluarannya juga berbeda. Penetapan bentuk lembaga ditentukan oleh kegiatan ataupun tujuan yang paling dominan.

⁴² Proporsi tahun dasar.

3.3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

3.3.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar pemerintah.

Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah:

- a. kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Sebagai contoh, pencetakan publikasi, kartu pos dan reproduksi dari karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, dan sebagainya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga/departemen pemerintah tersebut, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**; dan
- b. kegiatan pemerintah yang menghasilkan jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.

3.3.3.2. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah meliputi :

- pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, pengeluaran yg diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dsb);
- pengeluaran konsumsi untuk kolektif, pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang dan jasa publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur & pembangunan ekonomi, R&D, dan sebagainya).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga mencakup pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang dan belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (unit vertikalnya) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa beserta perangkat dinasnya pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah provinsi mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan konsumsi pemerintah pusat yang menjadi bagian dari konsumsi pemerintah daerah provinsi. Dengan menggunakan cara yang sama, **pengeluaran konsumsi pemerintah (kabupaten/kota)** mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, ditambah dengan konsumsi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.3.3.3. Sumber Data

Dalam penyusunan pengeluaran konsumsi pemerintah, digunakan berbagai macam data seperti berikut:

- a. realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPbn) Departemen Keuangan;
- b. realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing tingkat pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa);
- c. jumlah pegawai negeri sipil yang dirinci menurut status kepegawaian, golongan, departemen/lembaga, dan provinsi yang diperoleh dari BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- d. IHPB umum tanpa ekspor, dan
- e. indeks harga konsumen.

3.3.3.4 Metode Estimasi

A. Neraca Produksi Pemerintah

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah, terlebih dahulu harus disusun **neraca produksi pemerintah**, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial), balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar) dan penjualan dari barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan. Uraian komponen-komponen neraca produksi pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. **Output** pemerintah terdiri dari output pasar dan output non pasar. **Output non pasar** adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan **output pasar** pemerintah merupakan penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang disuplai secara gratis, atau atas dasar harga yang secara ekonomi tidak berarti, kepada institusi lain atau masyarakat.
- b. **Biaya antara** adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa dan bantuan sosial yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output pemerintah.
- c. **Nilai tambah bruto** pemerintah merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. **Balas jasa pegawai** merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan **penyusutan** merupakan nilai yang disisihkan sebagai pengganti susut atau ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan bagan Neraca Produksi Pemerintah.

Tabel 3.4
Neraca Produksi Pemerintah

Input	Output
1. Biaya antara (A) (belanja barang dan bantuan sosial)	3. Output (C)
2. Nilai tambah bruto (B) = (B1)+(B2)	3.1. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Output non pasar) (D) = (C) - (E)
2.1. Penyusutan (B1)	3.2. Penjualan barang dan jasa (E)
2.2. Belanja Pegawai (B2)	
Total Input (A) + (B)	Total Output (C)

B. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi nilai barang dan jasa yang dijual. Sedangkan total input merupakan penjumlahan dari biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) dan nilai tambah bruto (belanja pegawai dan penyusutan). Mengingat dalam neraca produksi total output sama dengan total input, maka nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah yang merupakan output pasar.

Untuk pemerintah pusat, data biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) dan belanja pegawai didapat dari rincian pengeluaran APBN. Sedangkan penjualan barang dan jasa diperoleh dari rincian penerimaan APBN, khususnya pada bagian penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penjualan barang dan jasa dari semua unit pemerintah pusat. Sementara itu, penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal.

Untuk pemerintah daerah, data biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) dan belanja pegawai didapat dari rincian pada sisi pengeluaran APBD (provinsi, kabupaten/kota) dan desa. Sedangkan penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa (output pasar) didapat dari rincian pada sisi penerimaan APBD pada bagian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu rincian penerimaan lain-lain. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi mencakup biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, ditambah dengan biaya antara, belanja pegawai dan nilai penjualan barang dan jasa

pemerintah pusat yang menjadi bagian dari biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi.

C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi atas dasar harga konstan. Biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) atas dasar harga konstan didapat dengan *deflate* biaya antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tanpa ekspor. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

3.3.3.5 Contoh Penghitungan

Berikut ini diberikan contoh penghitungan pengeluaran konsumsi pemerintah untuk pemerintah daerah provinsi X, tahun 2007. Untuk itu digunakan data yang terdiri dari:

1. alokasi pengeluaran pemerintah pusat di provinsi X;
2. APBD pemerintah daerah provinsi X;
3. APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi X; dan
4. estimasi indeks jumlah pegawai negeri sipil.

A. Neraca Produksi Pemerintah daerah Kabupaten X Atas Dasar Harga Berlaku

Penghitungan komponen-komponen neraca produksi pemerintah daerah Provinsi X tahun 2007 (juta Rp) atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut:

1. biaya antara provinsi X (belanja barang dan jasa + bantuan sosial) sebesar 6.641.184 yang terdiri dari:
 - a. biaya antara seluruh pemerintah desa di provinsi X (tahun 2007 data belum tersedia);
 - b. biaya antara pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi X sebesar 2.741.983 (= 2.478.279 + 263.704) (lihat Tabel 3.11);
 - c. biaya antara pemerintah daerah provinsi X sebesar 637.186 (= 445.851 + 191.335) (lihat Tabel 3.10);
 - d. biaya antara pemerintah pusat yang menjadi bagian dari biaya antara provinsi X

- sebesar 3.262.015 (= 1.253.254 + 2.008.761) (lihat Tabel 3.9).
2. belanja pegawai provinsi X sebesar 9.293.643 yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai seluruh pemerintah desa di provinsi X (tahun 2007 data belum tersedia);
 - b. belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi X sebesar 6.229.994 (= 5.339.614 + 890.380) (lihat Tabel 3.11);
 - c. belanja pegawai pemerintah daerah provinsi X sebesar 583.394 (= 440.225 + 143.169) (lihat Tabel 3.10);
 - d. belanja pegawai pemerintah pusat yang menjadi bagian dari belanja pegawai provinsi X (lihat Tabel 3.9) = 2.480.255.
 3. Penyusutan pemerintah daerah provinsi X diestimasi sebesar 20 % dari belanja modal pemerintah daerah provinsi X. Belanja modal pemerintah daerah provinsi X mencakup belanja modal pemerintah pusat yang menjadi bagian belanja modal pemerintah daerah provinsi X, belanja modal pemerintah daerah provinsi X, belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi X, dan belanja modal pemerintah desa di provinsi X (untuk tahun 2007 data pemerintah desa belum tersedia). Dengan demikian besarnya penyusutan pemerintah daerah provinsi X sebesar 1.415.512 ($20\% \times (2.197.089 + 757.771 + 4122.699)$).
 4. Nilai tambah bruto provinsi X sebesar 10.709.155 (nilai pada poin 2 + nilai pada poin 3 atau $9.293.643 + 1.415.512$).
 5. Input/output sebesar 17.350.339 (nilai pada poin 1 + nilai pada poin 4 atau $6.641.184 + 10.709.155$).
 6. Penjualan barang dan jasa (output pasar) provinsi X sebesar 873.230 yang terdiri dari:
 - a. penjualan barang dan jasa seluruh pemerintah desa di provinsi X (tahun 2007 data belum tersedia);
 - b. penjualan barang dan jasa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi X sebesar 89.047 (lihat Tabel 3.11);
 - c. penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi X sebesar 20.323 (lihat Tabel 3.10);
 - d. penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang menjadi bagian dari penjualan barang dan jasa provinsi X sebesar 763.860 (lihat Tabel 3.9).
 7. Konsumsi pemerintah (output non pasar) provinsi X sebesar 16.477.109 (nilai pada poin 5 - nilai pada poin 6 atau $17.350.339 - 873.230$).

Berikut ini diberikan hasil penghitungan neraca produksi pemerintah daerah kabupaten X atas dasar harga berlaku seperti terlihat pada diagram berikut ini.

Tabel 3.5
Neraca Produksi Pemerintah Daerah Kabupaten X
Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 (juta rupiah)

Input		Output	
1. Biaya antara	6.641.184	3. Output	17.350.339
2. Nilai tambah bruto	10.709.155	3.1. Konsumsi pemerintah	16.477.109
2.1. Penyusutan	1.415.512	3.2. Penjualan barang dan	873.230
2.2. Belanja Pegawai	9.293.643	Jasa	
Total Input	17.350.339	Total Output	17.350.339

B. Neraca Produksi Pemerintah Provinsi X Atas Dasar Harga Konstan:

Penghitungan komponen-komponen neraca produksi pemerintah daerah provinsi X atas dasar harga konstan tahun 2007 sebagian besar bertumpu pada perhitungan neraca produksi pemerintah daerah atas dasar harga berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. biaya antara atas dasar harga konstan didapat dengan men-*deflate* biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) atas dasar harga berlaku dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) umum tanpa sektor ekspor. Pada tahun 2007, IHPB Umum tanpa sektor ekspor provinsi X sebesar 197,00 (tahun dasar/tahun 2000 = 100,00) sehingga biaya antara atas dasar harga konstan sebesar 3.371.159 ($= 6.641.184 : 1,97$);
2. nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Nilai tambah bruto pada tahun dasar sebesar 4.980.784 dan indeks jumlah pegawai tahun 2007 = 112,30 (Tabel 3 pada lampiran), sehingga nilai tambah bruto atas dasar harga konstan provinsi X sebesar 5.593.420 ($= 4.980.784 \times 112,30$);
3. jumlah input/output atas dasar harga konstan sebesar 8.964.579 (nilai pada poin 1 + nilai pada poin 2; $= 3.371.159 + 5.593.420$);
4. penjualan barang dan jasa (output pasar) atas dasar harga konstan didapat dengan mengalikan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output atas dasar harga berlaku dengan output atas dasar harga konstan. Dengan perkataan lain penjualan

barang dan jasa (output pasar) atas dasar harga konstan didapat dengan cara membagi penjualan barang dan jasa (output pasar) atas dasar harga berlaku dengan output atas dasar harga berlaku dikali dengan output atas dasar harga konstan. Dengan demikian, penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan adalah sebesar 451.181 $(=873.230 : 17.350.339) \times 8.964.579$; dan

5. konsumsi pemerintah (output non pasar) atas dasar harga konstan sebesar 8.513.398 (nilai pada poin 3 - nilai pada poin 4; $8.964.579 - 451.181$).

Berikut ini diberikan hasil perhitungan neraca produksi pemerintah daerah provinsi X beserta komponen-komponennya atas dasar harga konstan.

Tabel 3.6
Neraca Produksi Pemerintah Daerah Provinsi X
A. Atas Dasar Harga Konstan, 2007 (juta rupiah)

Input		Output	
1. Biaya antara	3.371.159	3. Output	8.964.579
2. Nilai tambah bruto	5.593.420	3.1. Konsumsi pemerintah	8.513.398
2.1. Penyusutan	739.326	3.2. Penjualan barang dan	451.181
2.2. Belanja Pegawai	4.854.094	jasa	
Total Input	8.964.579	Total Output	8.964.579

3.3.3.6 Asumsi dan Perlakuan Khusus

Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi pemerintah digunakan beberapa asumsi dan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. berdasarkan SNA '93 pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran rutin untuk keperluan militer seperti pengadaan senjata, kendaraan dan lain-lain yang utamanya untuk keperluan pertahanan dan keamanan serta perang dikategorikan sebagai konsumsi pemerintah bukan sebagai pembentukan modal pemerintah;
- b. pengeluaran konsumsi badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) tidak termasuk kedalam pengeluaran konsumsi pemerintah karena unit institusi BUMN/D dikelompokkan kedalam institusi korporasi finansial dan non finansial, sesuai dengan sektor/lapangan usahanya masing-masing.

Tabel 3.7
Lembar Kerja Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 (juta rupiah)

No	Rincian	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Antara (BA)	6.641.184	Lihat A point 1
2.	NTB	10.709.155	Lihat A point 2 dan 3
3.	Input/Output	17.350.339 Baris (1)+(2)	
4.	Penjualan Barang dan Jasa	873.230	Lihat A point 6
5.	Konsumsi Pemerintah	16.477.109 Baris (3) - (4)	

Tabel 3.8
Lembar Kerja Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas Dasar Harga Konstan, 2007 (juta rupiah)

No	Rincian	Nilai Atas Dasar Harga Berlaku	Jenis/ Nama Indeks	Nilai Indeks (Tahun dasar= 100,00)	Metode yang digunakan	Nilai atas dasar harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Biaya Antara (BA)	6.641.184	IHPB Umum Tanpa Ekspor	197,00	Deflasi	$\frac{\text{kol}(3)}{\text{kol}(5)} \times 100 = 3.371.159$
2.	NTB	10.709.155	Indeks Jumlah Pegawai Negeri Sipil	112.30	Ekstrapolasi	$4.980.784 \times \frac{\text{kol}(5)}{100} = 5.593.420$
3.	Input/Output	17.350.339 Baris (1)+(2)				(Diket. sebelumnya) Baris (1) kol (7) + Baris (2) kol(7) = 8.964.579
4.	Penjualan Barang dan jasa	873.230				$\frac{\text{brs}(4)\text{kol}(3)}{\text{brs}(3)\text{kol}(3)} \times \text{brs}(3)\text{kol}(7) = 451.181$
5.	Konsumsi Pemerintah	Baris (3) - (4) = 16.477.109				baris (3) kol (7) - baris (4) kol (7) = 8.513.398

Tabel 3.9.
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007
Provinsi X (juta rupiah)

Uraian	Nilai
(1)	(2)
▪ Belanja Pegawai	2.480.255
▪ Belanja Barang	1.253.254
▪ Belanja Modal	2.197.089
▪ Bantuan Sosial	2.008.761
▪ Penerimaan dari barang jasa ¹	763.860
▪ Nilai Tambah Bruto ²	2.919.673
▪ Konsumsi Pemerintah ³	5.417.828

¹ Diperoleh dari rasio penerimaan dari jasa dan barang neraca produksi pemerintah pusat.

² Diperoleh dari belanja pegawai ditambah penyusutan dan penyusutan diestimasi sebesar 20 % dari belanja modal.

³ Diperoleh dari NTB ditambah belanja barang dan bantuan sosial dikurangi penerimaan dari jasa dan barang.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi X, 2007 (juta rupiah)

Uraian	Nilai
(1)	(2)
	2.462.18
1. Pendapatan Daerah	4
	1.502.95
1.1 Pendapatan asli daerah	5
	1.419.25
1.1.1 Pajak daerah	0
1.1.2 Retribusi daerah	10.706
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	52.676
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	20.323
1.2 Dana perimbangan	921.811
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	264.454
1.2.2 Dana alokasi umum	657.357
1.2.3 Dana alokasi khusus	0
1.2.4 Lain-lain	0
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	37.418
1.3.1 Hibah	17.418
1.3.2 Dana darurat	0
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	0

Uraian	Nilai
(1)	(2)
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus	20.000
1.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	0
1.3.6 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0
	2.717.85
2. Belanja Daerah	9
	1.371.06
2.1 Belanja tidak langsung	8
2.1.1 Belanja pegawai	440.225
2.1.2 Belanja bunga	0
2.1.3 Belanja subsidi	0
2.1.4 Belanja hibah	0
2.1.5 Belanja bantuan social	191.335
2.1.6 Belanja bagi hasil kpd Prop/kab/Kota dan Desa	550.052
2.1.7 Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/ Kota dan Desa	179.455
2.1.8 Belanja tidak terduga	10.000
2.1.9 Lain-lain	0
	1.346.79
2.2 Belanja langsung	0
2.2.1 Belanja pegawai	143.169
2.2.2 Belanja barang dan jasa	445.851
2.2.3 Belanja modal	757.771
Surplus/(Defisit)	-255.674
3. Pembiayaan Daerah	255.674
3.1 Penerimaan pembiayaan	275.674
3.2 Pengeluaran pembiayaan	20.000

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi X, 2007 (ribu rupiah)

Uraian	Nilai
(1)	(2)
	12.738.50
1. Pendapatan Daerah	8
1.1 Pendapatan asli daerah	728.268
1.1.1 Pajak daerah	351.048
1.1.2 Retribusi daerah	255.517
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	32.656
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	89.047

Uraian	Nilai
(1)	(2)
	10.919.43
1.2 Dana perimbangan	4
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	1.036.515
1.2.2 Dana alokasi umum	8.854.620
1.2.3 Dana alokasi khusus	1.021.855
1.2.4 Lain-lain	6.444
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.090.806
1.3.1 Hibah	36.761
1.3.2 Dana darurat	4.750
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	563.245
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus	296.524
1.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	180.226
1.3.6 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	9.300
	13.529.45
2. Belanja Daerah	5
2.1 Belanja tidak langsung	6.038.097
2.1.1 Belanja pegawai	5.339.614
2.1.2 Belanja bunga	7.038
2.1.3 Belanja subsidi	28.554
2.1.4 Belanja hibah	23.336
2.1.5 Belanja bantuan sosial	263.704
2.1.6 Belanja bagi hasil kpd Prop/kab/Kota dan Desa	42.397
2.1.7 Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/ Kota dan Desa	278.836
2.1.8 Belanja tidak terduga	54.618
2.1.9 Lain-lain	0
2.2 Belanja langsung	7.491.358
2.2.1 Belanja pegawai	890.380
2.2.2 Belanja barang dan jasa	2.478.279
2.2.3 Belanja modal	4.122.699
Surplus/(Defisit)	-790.947
3. Pembiayaan Daerah	970.212
3.1 Penerimaan pembiayaan	1.114.700
3.2 Pengeluaran pembiayaan	144.488

Untuk menghitung harga konstan konsumsi pemerintah dibutuhkan dua buah indeks, yaitu indeks jumlah pegawai negeri sipil dan indeks harga perdagangan besar (IHPB) provinsi X, yang digunakan sebagai ekstrapolator belanja pegawai dan deflator biaya antara. Untuk menghitung indeks jumlah pegawai negeri sipil dibutuhkan data jumlah pegawai negeri sipil provinsi X menurut golongan kepangkatan, dan data jumlah

gaji (termasuk tunjangan struktural dan fungsional menurut golongan per bulan). Indeks yang digunakan untuk menghitung indeks jumlah pegawai negeri sipil, adalah indeks Laspeyres yang dimodifikasi seperti berikut.

$$I_j = \frac{\sum_{j=1}^4 \frac{Q_{n,j}}{Q_{0,j}} \times Q_{0,j} P_{0,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}} = \frac{\sum_{j=1}^4 Q_{n,j} P_{0,j}}{\sum_{j=1}^4 Q_{0,j} P_{0,j}}$$

dimana:

- I_j = Indeks jumlah pegawai pada tahun n , $n = 2007$
- $P_{0,j}$ = Bagian gaji golongan j terhadap total gaji pegawai pada tahun dasar, tahun dasar 2000
- $Q_{0,j}$ = Jumlah pegawai menurut golongan pada tahun dasar
- $Q_{n,j}$ = Jumlah pegawai golongan j pada tahun ke n
- j = Golongan I, II, III, IV

Tabel 3.12
Metode Estimasi Penghitungan Indeks Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Provinsi X, 2007

Golongan	$Q_{0,j}$ 2000 (orang)	$Q_{n,j}$ 2007 (orang)	$P_{0,j}$ (Rp)	$Q_{0,j} \times P_{0,j}$ (Rp juta)	$Q_{n,j} \times P_{0,j}$ (Rp juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	14.033	3.383	776.200	10.892.414.600	2.625.884.600
II	100.081	59.007	1.010.000	101.081.810.000	59.597.070.000
III	105.850	130.619	1.250.000	132.312.500.000	163.273.750.000
IV	3.943	36.992	1.500.000	5.914.500.000	55.488.000.000
Total	223.907	230.001	4.536.200	250.200.224.600	280.984.704.600

$$I_j = \frac{280.984.704.600}{250.200.224.600} \times 100\% = 112,30$$

3.3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB dalam SNN merupakan bagian dari pembentukan modal bruto (PMB).

3.3.4.1 Definisi Konsep

PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi

penjualan neto barang modal bekas. Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi belum diperhitungkan. Barang modal dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

3.3.4.2. Ruang Lingkup

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok yaitu : menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*) dan menurut institusi⁴³. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/ penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang menguasainya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut.

1. PMTB Menurut Jenis Barang

PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

- i. penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, kendaraan dan ternak;
- ii. perbaikan besar aset berwujud; dan
- iii. biaya transfer kepemilikan aset.

2. PMTB Menurut Sektor/Lapangan Usaha

PMTB menurut sektor/lapangan usaha adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tertier ini secara rinci terdiri atas sektor-sektor: pertanian; pertambangan & penggalan; industri pengolahan; listrik, gas & air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel & restoran; pengangkutan & komunikasi; bank & lembaga keuangan; pemerintahan umum serta jasa-jasa.

⁴³ Penggolongan sesuai dengan rekomendasi SNA'93

Rincian PMTB pada setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- i. di sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya;
- ii. di sektor pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di sektor pertambangan;
- iii. di sektor industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya;
- iv. di sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
- v. Di sektor bangunan/konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk di sini kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi;
- vi. di sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal beserta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai, termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya;
- vii. di sektor transpor dan komunikasi modal adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain: bus, truk, sado, bajay, becak, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk

menunjang usaha angkutan.

- viii. Di sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan;
- ix. di sektor pemerintahan, terdiri dari barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung-gedung/kantor-kantor pemerintah, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan; dan
- x. di sektor jasa-jasa, berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

3. PMTB Menurut Institusi

Penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi di sini dibedakan menurut pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) & badan usaha milik daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumah tangga) yang meliputi:

- i. pemerintah mencakup pengeluaran untuk barang modal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa, pembuatan gedung atau bangunan kantor, perumahan dinas, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, jalan & jembatan dan infrastruktur lainnya;

- ii. BUMN/D, barang modalnya antara lain: lapangan terbang, pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, pesawat terbang dan sebagainya; dan
- iii. swasta dan rumah tangga, barang modal yang dikuasai dapat berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan sebagainya.

3.3.4.3 Metode Estimasi

Baik untuk estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Disarankan untuk tingkat kabupaten menggunakan metode gabungan antara pendekatan langsung dan tidak langsung karena mengacu pada tingkat ketersediaan data dasarnya.

Pendekatan tidak langsung (commodity flow) untuk menghitung barang modal berupa bangunan. Penghitungan PMTB berupa bangunan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan cara mengalikan suatu rasio dengan output bangunan, dimana besarnya rasio adalah 0,9215.

Penghitungan barang modal berupa mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dengan pendekatan langsung. Penghitungan PMTB dengan pendekatan langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Pendekatan dengan cara ini menuntut tersedianya data PMTB yang dikuasai oleh seluruh sektor lapangan usaha secara rinci.

Penilaian PMTB adalah atas dasar harga pembeli, yaitu harga barang modal ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan, seperti biaya transport, biaya instalasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut, termasuk pula biaya bea masuk dan pajak tak langsung.

Penghitungan PMTB berupa mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya menggunakan data aktiva tetap hasil sensus ekonomi (SE) 2006 sebagai *benchmark*, ditambah data hasil survei barang modal atau laporan keuangan perusahaan sebagai ekstrapolator. Apabila angka yang menjadi PMTB *benchmark* dikalikan dengan ekstrapolator pada tahun t maka akan diperoleh PMTB berupa mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai PMTB total atas dasar harga berlaku adalah dengan menjumlahkan nilai PMTB menurut jenis barang modal atas harga berlaku baik yang di hitung dengan pendekatan langsung dan tidak langsung. Penghitungan PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi PMTB atas

dasar harga berlaku dengan indeks implisit masing-masing jenis barang modal nasional.

3.3.4.4 Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal adalah:

- i. output bangunan dari sektor konstruksi;
- ii. data usaha menengah besar (UMB) dan usaha mikro kecil (UMK) hasil sensus ekonomi 2006;
- iii. survei lapangan atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan (pendekatan langsung);
- iv. indeks implisit PMTB nasional berupa mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya.

3.3.4.5 Keterbatasan dan Masalah Dalam Penghitungan

Dalam melakukan estimasi melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- i. kesulitan dalam memperoleh laporan keuangan perusahaan apalagi kalau dibutuhkan data yang sangat rinci;
- ii. dalam prakteknya sangat sulit memperoleh informasi tentang aktiva tetap, padahal aktiva tetap ini merupakan bagian dari realisasi PMTB;
- iii. dalam data aktiva tetap perusahaan, masih termasuk unsur tanah yang secara konsep harus dikeluarkan;
- iv. rasio penggunaan *output* sektor yang menjadi barang modal cenderung statis. Sedangkan untuk mengubahnya diperlukan survei dalam skala besar.

3.3.4.6 Perlakuan Khusus

Beberapa perlakuan khusus dalam penghitungan PMTB adalah sebagai berikut:

- i. khusus bagi pembentukan modal dalam bentuk bangunan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun tetap dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan pembentukan modal meskipun pengerjaannya belum selesai, meskipun konsep pembentukan modal selalu berdasarkan pada nilai pekerjaan yang sudah diselesaikan;
- ii. berbeda dengan bangunan, mesin kapal serta pembuatan barang modal lainnya yang belum selesai pada waktu penghitungan, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pembentukan modal, tetapi sebagai inventori barang setengah jadi;

- iii. secara makro diasumsikan penjualan neto barang modal bekas sama dengan nol atau saling menghilangkan (nilai pembelian sama dengan nilai penjualan); dan
- iv. IHPB yang digunakan pada setiap sektor atau institusi pada jenis barang modal yang sama, gerakannya dianggap sejalan dan sama besar.

Tabel 3.13
Lembar Kerja Penghitungan PMTB dengan Metode Langsung

Nama Perusahaan :

No	Jenis aktiva	Penambahan	Pengurangan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aktiva tetap			
1	Hak atas tanah			
2	Bangunan	13.322.500		13.322.500
3	Perlengkapan kantor	142.889.758		142.889.758
4	Mesin dan peralatan pabrik	179.503.088		179.503.088
5	Alat angkutan	173.840.000	131.000.000	42.840.000
6	Jalan dan jembatan			
7	Tanaman menghasilkan			
8	Aktiva tetap lainnya			
	Aktiva sewa guna usaha			
1	Bangunan			
2	Mesin dan peralatan pabrik			
3	Kendaraan			
4	Lainnya			
	Aktiva dalam penyelesaian			
1	Bangunan			
2	Mesin dan peralatan pabrik			
3	Kendaraan			
4	Lainnya			
	Jumlah	629.455.346	131.000.000	498.455.346

Keterangan:

- Dalam penambahan dan pengurangan termasuk juga transfer dari dan kepada pihak lain,
- Barang modal tidak dibedakan domestik ataupun impor.

TABEL 3.14

LEMBAR KERJA PENGHITUNGAN PMTB

Jenis Barang Modal	Nilai <i>Benchmark</i>	Ekstrapolator	PMTB Atas Dasar Harga Berlaku	Deflator	PMTB Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
▪ Bangunan					
▪ Mesin dan Perlengkapan					
▪ Alat Angkutan					
▪ Lainnya					
Total					

3.3.5. Perubahan Inventori

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000 yaitu pada triwulan I tahun 2004 komponen perubahan inventori mulai diperkenalkan. Komponen perubahan inventori sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB menurut penggunaan.

3.3.5.1. Konsep dan Definisi

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

3.3.5.2. Ruang Lingkup

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai *input* antara maupun *input* akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- i. barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari: perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi/bangunan;
- ii. berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- iii. barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- iv. barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- v. ternak untuk tujuan dipotong;
- vi. barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- vii. pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- viii. stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

3.3.5.3 Metode Estimasi

Pada seri penghitungan sebelumnya, perubahan inventori dihitung dengan cara residual atau selisih atau perbedaan antara total PDRB sektoral dengan total PDRB penggunaan. Dengan demikian maka pada komponen ini selain mencakup perubahan stok atau inventori termasuk juga diskrepansi statistik. Karena perubahan inventori merupakan komponen penting dalam penghitungan investasi maka sebaiknya komponen ini dihitung secara terpisah. Dalam pengukurannya perubahan inventori merupakan satu-satunya komponen yang bisa mempunyai 2 (dua) tanda yaitu positif dan negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan (stok) yang ada.

Metodologi yang dapat digunakan dalam menghitung perubahan inventori ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan yakni dari sisi "korporasi" atau unit usaha sebagai pendekatan "langsung" dan dari sisi "komoditi" sebagai pendekatan tidak langsung. Dilihat dari sisi manfaatnya pendekatan secara langsung akan

menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditi hanya dapat dilakukan jika data tentang posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan. Proses penghitungan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pendekatan Langsung

Dengan pendekatan langsung memungkinkan untuk diperoleh nilai posisi inventori pada waktu-waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Sumber data utama yang dapat digunakan adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku maka diperlukan data inventori pada tahun-tahun yang berurutan. Langkah-langkah penghitungan perubahan inventori dari laporan keuangan, yaitu :

- menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan dengan mendeflate stok awal dan akhir persediaan dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi inventori tahun t dengan tahun t-1; dan
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflasi perubahan inventori harga konstan dengan data IHPB rata-rata tahun.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung atau yang sering kali disebut juga dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*)⁴⁴. Data utama yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori.

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan rata-rata harga pembelian, atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan inventori harga konstan dihitung dengan mendeflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, atau mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga tahun dasar.

⁴⁴ Penghitungan inventori dengan pendekatan komoditi telah dilakukan oleh Frank de Leeuw.

3.3.5.4. Sumber Data

Sumber data perubahan inventori:

- i. data komoditi pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- ii. data komoditas perkebunan;
- iii. laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait;
- iv. indeks harga implisit PDB sektoral terpilih, dan
- v. indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

3.3.5.5. Keterbatasan dan Masalah Dalam Penghitungan

Keterbatasan dan masalah dalam perhitungan Perubahan Inventori adalah sebagai berikut:

- i. data inventori yang dibutuhkan adalah yang dalam bentuk posisi pada satu saat dalam waktu yang berurutan ;
- ii. tidak semua komoditas inventori mempunyai data volume dan harga, hanya beberapa komoditas perkebunan, ternak dan pertambangan;
- iii. data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume biasanya tidak selalu disertai dengan data harganya. Karena data harga inventori tidak tersedia maka diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDB yang sesuai;
- iv. diperlukan adanya pelengkap (*mark-up*) untuk melengkapi estimasi bagi sektor-sektor yang datanya tidak tersedia; dan
- v. disarankan untuk tingkat kabupaten menggunakan pendekatan langsung dalam menghitung perubahan inventori.

Dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan selanjutnya dibuatkan lembar kerja konsolidasi yang merupakan penjumlahan seluruh populasi perusahaan/usaha (produsen) di suatu daerah.

Tabel 3.15
Lembar Kerja Penghitungan Perubahan Persediaan Sektor-sektor yang Diketahui
Posisi Persediaan (Quantum dan Harga Rata-rata Tahunan)

Sektor:
Tahun:

Jenis komoditi	Stok awal (unit)	Stok akhir (unit)	Perubahan persediaan (3)-(2)	Harga pada tahun t	Harga pada tahun dasar	Perubahan persediaan Atas Dasar Harga Berlaku (4)x(5)	Perubahan persediaan Atas Dasar Harga Konstan (4)x(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
n.							
Jumlah							

Tabel 3.16
Lembar Kerja Penghitungan Perubahan Persediaan Sektor-sektor
Berdasarkan Laporan Keuangan

Tahun:

Sektor/ Sub Sektor	Nilai buku posisi persediaan tahun t-1	Nilai buku posisi persediaan tahun t	IHPB/ Indeks implisit triw ke-4 tahun t-1	IHPB/ Indeks implisit triw ke-4 tahun t	Posisi persediaan Atas Dasar Harga Konstan (2):(4)	Posisi persediaan tahun t Atas Dasar Harga Konstan (3):(5)	Perubahan persediaan Atas Dasar Harga Konstan (7)-(6)	IHPB/ Indeks implisit triw ke-4 tahun t	Perubahan pesediaan Atas Dasar Harga Berlaku (8)x(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perdagangan									
Perhotelan									
Restoran									
Transportasi									
...									
...									
...									
Jasa-jasa									
Jumlah									

3.3.6. Ekspor dan Impor

3.3.6.1 Konsep dan Definisi

Transaksi dengan luar negeri/luar wilayah mencakup perdagangan barang dan jasa, arus pendapatan faktor produksi, dan instrumen finansial. Perdagangan barang dan jasa meliputi antar-wilayah/daerah dan antar negara. Perdagangan antar daerah menjelaskan tentang proses atau alur distribusi produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut. Perdagangan antar-negara menunjukkan ketergantungan ekonomi suatu wilayah pada negara lain juga menyebabkan terjadinya aliran devisa (masuk maupun ke luar).

Pembedaan transaksi antar-wilayah ini utamanya dibatasi oleh konsep wilayah ekonomi yang terdiri dari dua unsur yaitu “residen” dan “kegiatan ekonomi”. Pengelompokan **residen dan non-residen**⁴⁵ berkaitan dengan kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sebagai residen atau non-residen tersebut meliputi penduduk atau rumah tangga, perusahaan atau korporasi, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga nirlaba atau lembaga-lembaga internasional lainnya seperti ILO, UNHCR, World Bank (Bank Dunia), IMF dan lain sebagainya.

1. Antar-negara (Ekspor dan Impor)

Transaksi perdagangan antar-negara ini dicirikan melalui 2 (dua) aktivitas yang berlawanan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri (arus barang dan jasa dari unit residen pada unit non residen), sebaliknya disebut impor apabila produk tersebut masuk ke dalam wilayah ekonomi domestik (arus barang dan jasa dari unit non residen pada unit residen). Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi yang dilakukan antara unit-unit institusi atau pelaku ekonomi suatu negara dengan unit-unit ekonomi negara lain⁴⁶.

⁴⁵ Mengacu pada konsep SNA '93.

⁴⁶ Menurut *System of National Accounts* (SNA) 1993, pelaku ekonomi (*economic entities*) yang memiliki harta benda sendiri (*asset*), mampu menanggung hutang (*incurring liabilities*) dan melakukan aktivitas ekonomi dengan unit-unit lainnya disebut sebagai unit institusi (*institutional units*).

2. Antar-daerah

Ekspor antar wilayah adalah arus masuk barang dan jasa suatu wilayah dari wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi dengan luar negeri). Sedangkan impor antar wilayah adalah arus keluar barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah-wilayah domestik lainnya.

3.3.6.2 Ruang Lingkup

1. Antar-negara

Transaksi antar-negara atau dengan luar negeri adalah penjualan berbagai jenis produk barang dan jasa di satu sisi serta pembeliannya di sisi lain. Kategori transaksi ekonomi⁴⁷ yang baku menurut sistem neraca nasional (SNN) tersebut di antaranya meliputi:

- perdagangan barang dan jasa;
- jasa pengangkutan (transportasi);
- jasa pariwisata;
- jasa komunikasi;
- jasa konstruksi;
- jasa asuransi;
- jasa financial;
- jasa pengelolaan komputer dan informasi;
- royalti dan lisensi serta; dan
- jasa bisnis lainnya.

Karena sumber data utama transaksi eksternal yang digunakan selama ini masih berasal dari Neraca Pembayaran Luar Negeri⁴⁸, maka rincian cakupannya mengikuti kategori dalam SNN sebagaimana dijelaskan berikut.

i. Barang

Ekspor barang dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok besar, masing-masing minyak dan nonminyak. Kemudian ekspor minyak dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

⁴⁷ Mengikuti penggolongan dalam *Balance of Payment V* dan SNA'93.

⁴⁸ Disusun oleh Bank Indonesia.

- minyak mentah;
- hasil-hasil minyak; dan
- gas.

Sedangkan untuk ekspor non-minyak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori utama, yaitu:

- hasil pertanian;
- hasil industri;
- hasil tambang; dan
- hasil dari sektor lainnya.

Kemudian ekspor barang secara lebih rinci dikelompokkan menjadi 2 digit HS (*harmonized system*) atau menjadi sekitar 99 komoditas.

Sementara itu impor barang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu:

- barang konsumsi;
- bahan baku; dan
- barang modal.

Secara rinci impor barang juga dikelompokkan menjadi 2 (dua) digit HS atau sekitar 99 sektor (komoditas).

ii. Jasa-jasa

Mencakup seluruh transaksi ekspor dan impor produk jasa yang secara garis besar digolongkan dan diuraikan berikut ini

1. Jasa pengangkutan (transportasi) barang dan penumpang

Mencakup kegiatan pengangkutan barang milik non-residen oleh residen di negara non-residen dicatat sebagai ekspor jasa negara residen. Sebaliknya kegiatan jasa transportasi oleh non-residen yang dikonsumsi oleh residen dicatat sebagai impor jasa negara residen.

Apabila kegiatan pengangkutan penumpang diselenggarakan oleh residen dan dikonsumsi oleh non-residen maka dicatat sebagai ekspor jasa pengangkutan (transportasi); sedangkan kegiatan pengangkutan non-residen yang dikonsumsi oleh residen dicatat sebagai impor jasa negara si residen tersebut (di wilayah domestik). Begitu pula dengan kegiatan transportasi internasional oleh residen dengan

menggunakan pesawat non-residen maka akan dicatat pula sebagai impor jasa. Pelayanan tiket penumpang, pelayanan makan dan minum di atas kapal, biaya bagasi dan biaya barang yang dibawa termasuk pula sebagai bagian dari jasa angkutan penumpang; namun biaya carter kendaraan (kapal) atau sewa alat angkutan, serta biaya pelabuhan (laut/udara) dicakup dalam jasa angkutan lainnya.

2. Kegiatan pariwisata (tourism)

Diartikan lebih jauh sebagai kegiatan kunjungan untuk tujuan rekreasi, bisnis, serta pribadi. Semua pembelian barang dan jasa selama berada di negara yang dikunjungi dicakup sebagai transaksi ekspor negara (wilayah) tersebut. Pembelian barang dicakup sebagai ekspor barang dan pembelian jasa dicatat sebagai ekspor jasa. Penduduk residen yang pergi ke luar negeri dan mengkonsumsi barang dan jasa di negara yang dikunjungi dicatat sebagai impor negara residen tersebut.

3. Telekomunikasi, Pos dan Giro

Mencakup penggunaan telepon, telex, faksimili, dan sejenisnya oleh non-residen baik perorangan, perusahaan, maupun perwakilan negara tersebut di dalam wilayah domestik dicatat sebagai ekspor jasa negara residen. Begitu pula dengan kegiatan penyewaan transponder satelit komunikasi; pelayanan jasa pos, telegram, radio dan tv kabel yang diselenggarakan oleh perusahaan negara residen tersebut. Sebaliknya kegiatan dan transaksi serupa yang diselenggarakan oleh non-residen dan digunakan oleh residen dicatat sebagai transaksi impor jasa.

4. Jasa Keuangan dan Jasa Asuransi

Asuransi pengiriman barang baik barang dagangan maupun pertanggunganan barang lainnya yang dilakukan oleh residen dan non-residen atau sebaliknya dicatat sebagai asuransi pengangkutan barang; sedangkan asuransi kerugian seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, yang tidak berkaitan dengan pengangkutan barang dicatat sebagai asuransi lainnya. Jasa perbankan oleh residen terhadap non-residen atau kegiatan sejenis oleh non-residen bagi residen dalam rangka kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dikategorikan sebagai jasa keuangan; sedangkan penerbitan L/C (*Letter of Credit*), biaya transfer uang, komisi pengurusan dokumen, serta biaya jasa pelayanan keuangan lainnya dikategorikan sebagai jasa keuangan lainnya.

5. Jasa-jasa lainnya

Meliputi jasa konstruksi, jasa instalasi/ pemasangan peralatan, jasa lisensi, serta jasa lainnya.

2. Antar-wilayah

Mencakup transaksi perdagangan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing daerah dengan daerah lainnya. Produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang kemudian diperdagangkan dengan daerah lain bisa berupa produk yang sejenis dan bisa juga yang berbeda. Meskipun demikian masing-masing daerah biasanya juga mempunyai produk yang spesifik yang kadangkala menjadi andalan atau unggulan daerah tersebut.

i. Barang

Adalah berbagai jenis produk barang dan jasa yang diperdagangkan antar-wilayah baik ke luar maupun masuk, oleh pelaku-pelaku ekonomi produksi. Secara garis besar jenis barang dapat dibedakan menjadi:

- Produk pertanian
 - Tanaman bahan pangan, seperti padi, jagung, ketela, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran
 - Tanaman perkebunan, seperti kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, teh, kina, tanaman obat, dan tanaman bumbu
 - Kehutanan, seperti kayu, cendana, rotan, damar, arang
 - Peternakan, seperti ayam, sapi, kerbau, kambing, dan domba
- Produk pertambangan dan penggalian
 - Pertambangan, seperti minyak bumi, gas, emas, nikel, batubara, perak, bauksit, dan tembaga
 - Penggalian, seperti pasir, batukali, kapur, dan gamping
- Produk industri pengolahan (manufaktur)
 - Hasil olahan makan dan minuman jadi dan cakupan lainnya
 - Tekstil dan barang-barang terbuat dari tekstil
 - Mesin-mesin dan perlengkapannya
 - Alat (moda) transportasi
 - Barang-barang elektronik
 - Barang-barang perhiasan

- Barang-barang jenis lainnya
- Listrik, Gas (kota) dan Air bersih
 - Energi listrik yang dihasilkan dari tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, dan jenis tenaga lainnya.
 - Gas kota yang disalurkan atau didistribusikan ke konsumen melalui instalasi dan jaringan pipa.
 - Air bersih yang disalurkan atau didistribusikan ke konsumen melalui instalasi dan jaringan pipa maupun media angkutan lainnya.

- **Konstruksi/Bangunan**

Merupakan jasa layanan konstruksi yang mencakup jasa pembuatan konstruksi atau bangunan, jasa pemeliharaan/perawatan bangunan, jasa perancangan konstruksi/bangunan, dan jasa konstruksi lainnya.

Deskripsi atau penjelasan teknis mengenai kegiatan serta produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut bisa dilihat lebih rinci pada penjelasan sektor lapangan usaha.

Ekspor barang dinyatakan dalam harga *free on board (fob)*. Harga f.o.b. adalah harga barang sampai di atas kapal negara pengeksport, yang meliputi harga barang (bisa produsen bisa pembeli), pajak ekspor dan sejenisnya, biaya pengangkutan sampai ke batas negara tersebut, biaya asuransi pengangkutan sampai ke batas negara tersebut, biaya asuransi pengangkutan sampai ke atas kapal, jasa keberantaraan (komisi), biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer, biaya pengepakan, biaya pemuatan barang ke atas kapal/pesawat udara serta alat transportasi lainnya. Sebaliknya impor barang juga dinyatakan dalam harga f.o.b.⁴⁹

3.3.6.3. Metode estimasi

A. Antar-negara

Nilai ekspor dan impor atas berbagai produk barang dan jasa yang ke luar maupun masuk suatu negara (wilayah) adalah jumlah hasil kali antara volume atau kuantum setiap barang dan jasa dengan masing-masing harganya. Hal ini juga berlaku bagi penilaian

⁴⁹ Sebelumnya menggunakan konsep harga c.i.f (*cost insurance freight*). Harga c.i.f. adalah harga barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi harga f.o.b., dan biaya pengangkutan dari batas negara pengeksport ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya asuransi pengirim.

pembelian langsung (*direct purchase*)⁵⁰. Sebagai contoh pengisian bahan bakar pesawat milik maskapai penerbangan internasional di dalam negeri (ekspor barang dan jasa), atau sebaliknya pengisian bahan bakar oleh maskapai penerbangan nasional di luar negeri (impor barang dan jasa). Pada dasarnya transaksi barang dan jasa dicatat pada saat kepemilikan barang tersebut berpindah dari negara asal ke negara tujuan, atau pada saat jasa tersebut diterima atau dinikmati oleh penduduk negara tujuan.

Tahapan dalam melakukan estimasi:

A.1. ekspor barang dan jasa

Langkah awal untuk mengestimasi nilai ekspor barang adalah dengan mengumpulkan data ekspor barang dari Statistik Ekspor BPS yang nilainya dalam satuan dolar Amerika dalam dua digit HS (sekitar 100 komoditas). Selanjutnya nilai ekspor barang dalam dolar AS tersebut disederhanakan menjadi 33 sektor ekonomi. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar AS tersebut dengan kurs harga ekspor tertimbang.

Langkah selanjutnya adalah memperkirakan nilai ekspor yang berasal dari pembelian langsung. Nilai ekspor pembelian langsung ini juga harus dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikannya dengan nilai kurs dolar ekspor secara tertimbang. Kemudian nilai pembelian ekspor secara langsung tersebut ditambahkan dengan nilai pembelian secara tidak langsung menjadi total nilai ekspor barang. Untuk ekspor jasa, data dikumpulkan dari Neraca Pembayaran Luar Negeri (yang dike luarkan oleh BI dan IMF), di mana nilainya juga masih dalam satuan dolar AS. Untuk menjadikannya ke dalam rupiah digunakan nilai kurs ekspor tertimbang. Total ekspor dalam 33 sektor diperoleh dengan cara menjumlahkan ekspor barang yang sudah memperhitungkan pembelian langsung ditambah dengan ekspor jasa.

Nilai ekspor yang masih dalam satuan rupiah (hasil konversi nilai ekspor dalam dolar AS menjadi rupiah) tersebut merupakan nilai ekspor atas dasar harga berlaku. Untuk menjadikannya ke dalam harga konstan, nilai ekspor atas harga berlaku tersebut harus *dideflate* dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU) ekspor sebagai deflatornya. Indeks Harga Per Unit (IHPU) digunakan untuk *mendeflate* nilai ekspor maupun atas harga

⁵⁰ Pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga non-residen termasuk dalam ekspor barang dan jasa, dan pembelian langsung oleh rumah tangga residen di luar negeri termasuk dalam impor barang dan jasa.

berlaku menjadi nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan.

A.2. impor barang dan jasa

Untuk melakukan estimasi nilai impor, pada dasarnya sama dengan proses estimasi nilai ekspor. Baik nilai ekspor maupun nilai impor dinilai berdasarkan harga barang di atas kapal negara peng-eksportnya sehingga dalam konteks ini biaya-biaya lainnya diabaikan. Untuk nilai impor jasa yang juga dalam satuan dolar AS diperoleh dari data BOP (*Balance of Payment*). Selanjutnya nilai impor yang dalam dolar AS tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikannya dengan kurs impor tertimbang. Nilai hasil perkalian tersebut merupakan nilai dalam rupiah atas dasar harga berlaku.

Nilai impor yang masih dalam satuan rupiah (hasil konversi nilai impor dalam dolar AS menjadi rupiah) tersebut merupakan nilai impor atas dasar harga berlaku. Untuk menjadikannya ke dalam harga konstan, nilai impor atas dasar harga berlaku tersebut harus di *deflate* dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU) impor sebagai deflatornya. Indeks harga per unit (IHPU) ini digunakan untuk mende*flate* nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku menjadi nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan.

B. Antar-daerah

Pendekatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi perdagangan antar-wilayah atau daerah ini agak sedikit berbeda dengan penilaian dalam transaksi ekspor dan impor. Meskipun harga dari barang yang diperdagangkan antar-daerah juga dipengaruhi oleh nilai dolar baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi di sini penggunaan indeks harga perdagangan besar (IHPB) lebih direkomendasikan. Berikutnya, bagi transaksi jasa yang sejenis bisa digunakan indeks harga konsumen (IHK).

Tujuan penilaian ekspor dan impor dalam rupiah adalah untuk menjadikan nilai transaksi ekspor dan impor menjadi standar (baku) dari satuan dolar AS ke dalam satuan satuan rupiah. Untuk itu diperlukan nilai kurs atau nilai penyetaraan. Kurs nilai dolar AS terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS dari Bank Indonesia yang sudah ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan untuk impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS dari Bank Indonesia yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan.

Proses penghitungan kurs tertimbang diawali dengan pengumpulan data kurs dolar AS harian, baik kurs jual maupun kurs beli dari publikasi Bank Indonesia. Setelah kurs harian tersebut diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menjadikan kurs tadi dalam

bentuk rata-rata satu bulan. Kurs jual dan kurs beli harus dipisah, dengan kata lain harus dibuat rata-rata kurs beli bulanan dan rata-rata kurs jual bulanan. Ukuran rata-rata untuk satu bulan yang dipakai adalah rata-rata hitung biasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

dimana:

μ = Rata-rata kurs satu bulan

X_i = Kurs hari ke- i dalam satu bulan

N = Banyaknya hari yang kursnya tercatat dalam satu bulan

Kurs beli digunakan untuk menghitung kurs ekspor tertimbang, sedangkan kurs jual untuk menghitung kurs impor tertimbang. Penimbang untuk kurs ekspor adalah nilai ekspor dalam dolar AS bulanan yang diperoleh dari publikasi Statistik Ekspor BPS. Penimbang untuk kurs impor adalah nilai impor dalam dolar AS yang diperoleh dari Statistik Impor BPS. Hasil akhir dari penghitungan kurs, baik kurs ekspor maupun kurs impor disajikan dalam dua jenis yaitu, kurs tahunan dan kurs triwulanan. Penghitungan kurs ekspor dan impor yang sudah ditimbang dengan nilainya masing-masing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\phi = \frac{\sum_{i=1}^N W_i \mu_i}{\sum_{i=1}^N W_i}$$

dimana:

ϕ = Kurs rata-rata tertimbang tahunan

μ_i = Kurs rata-rata bulan ke- i

W_i = Nilai ekspor atau impor bulan ke- i

Dalam pengukuran PDRB nilai transaksi ekspor dan impor dapat disajikan dalam empat cara:

- a. nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku dalam dolar AS;
- b. nilai ekspor dan impor atas dasar konstan dalam dolar AS;
- c. nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku dalam rupiah; dan
- d. nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan dalam rupiah.

Dengan demikian untuk kepentingan tersebut dibutuhkan suatu indeks yang sudah mempertimbangkan pengaruh nilai kurs untuk menyajikan nilai ekspor dan impor atas

dasar harga konstan dalam rupiah, yakni indeks harga per unit (IHPU).

Dasar pertimbangan pemakaian IHPU berkaitan dengan:

- a. nilai ekspor dan impor paling tidak menggunakan dua standar mata uang, yaitu dolar AS dan rupiah, dan
- b. untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang dipakai adalah nilai atas dasar harga konstan.

Untuk membuat estimasi IHPU, pertama kali dibutuhkan nilai ekspor dan impor dalam dolar AS, *kedua*, kurs ekspor dan impor terhadap rupiah. Tahap awal dari proses penghitungan IHPU adalah menentukan indeks nilai (*value index*) dolar AS yang diperoleh dari nilai ekspor atau impor dalam dolar AS dibagi dengan nilai ekspor atau impor dalam dolar AS pada tahun dasar dikali dengan 100. Langkah selanjutnya adalah menentukan masing-masing indeks, indeks kurs ekspor dan indeks kurs impor dengan cara membagi dengan kurs ekspor dan impor tahun dasar dikalikan dengan 100. IHPU dalam rupiah baik untuk ekspor maupun impor diperoleh dengan cara mengalikan indeks nilai dolar AS ekspor atau indeks nilai dolar AS impor tahun bersangkutan dengan indeks kurs ekspor atau indeks impor tahun bersangkutan dibagi 100.

3.3.6.4. Sumber Data

Berbagai sumber data dapat digunakan sebagai referensi dalam penghitungan transaksi perdagangan antar-negara dan antar-daerah.

A. Antar-negara

Untuk membuat estimasi nilai ekspor dan impor PDB digunakan bermacam jenis data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Statistik Ekspor dan Impor yang diterbitkan oleh BPS, Neraca Pembayaran, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun *International Monetary Fund* (IMF), kemudian data dari Departemen Pertambangan dan Energi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan masing-masing sumber data tersebut.

- a. Publikasi Statistik Ekspor dan Impor Barang, BPS
Dari publikasi ini, diperoleh data nilai ekspor dan impor barang dalam dolar AS.
- b. Neraca Pembayaran BI dan IMF
Dari publikasi ini dapat diperoleh data tentang transaksi ekspor dan impor jasa dalam satuan dolar AS, serta kurs dolar AS.

B. Antar-daerah

Data barang yang ke luar dari maupun yang masuk ke suatu daerah bisa berasal dari pencatatan administrator pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara (bandara) maupun darat/terminal apabila memungkinkan. Selain itu jembatan timbang juga bisa menjadi alternatif sumber data lainnya apabila kegiatan perdagangan antar-daerah yang melalui lintas daratan sulit untuk diperoleh.

Survei-survei khusus baik yang bersifat pengumpulan data primer maupun data sekunder merupakan pilihan yang relatif lebih baik meskipun implikasinya cukup besar, baik yang berkaitan dengan penyediaan dana, waktu, sumber daya manusia maupun pemilihan responden.

3.3.6.5. Keterbatasan dan Masalah Dalam Penghitungan

Pada prinsipnya konsep transaksi perdagangan baik antar-negara maupun antar-daerah ini mempunyai kesamaan dalam tata cara pengukuran nilai transaksi maupun perilaku pelaku pelakunya. Masalah pokok pertama yang akan dihadapi adalah dalam melakukan identifikasi jenis barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di daerah tersebut, apakah berasal dari produk daerah tersebut, atau berasal dari impor atau yang berasal dari wilayah lain. Kesulitan lain juga akan timbul apabila masyarakat (baik rumah tangga maupun bukan rumah tangga) tidak dapat menjawab tentang volume dan harga konsumsinya diluar daerah.

Cara singkat yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mendeteksi kegunaan barang yang ke luar dari maupun yang masuk ke wilayah tersebut, apakah untuk tujuan konsumsi, proses produksi, Investasi, atau hanya numpang lewat saja. Masyarakat termasuk pula perusahaan merupakan sumber data potensial yang dapat dipercaya sejauh kerja sama dengan mereka dapat dibina dan ditingkatkan. Pendekatan lain adalah dengan melakukan pemberdayaan atau perbaikan sistem pencatatan administrasi pemerintah melalui dinas-dinasnya di daerah.

A. Antar-negara

Perkiraan nilai ekspor dan impor barang dan jasa di tingkat daerah masih sulit dilakukan karena kurang lengkapnya informasi yang tersedia, sedangkan apabila tersedia, kualitas datanya pun masih diragukan. Hampir dapat dipastikan bahwa banyak daerah yang tidak mempunyai data tentang transaksi ekspor maupun impor ini. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut.

Secara umum, ada data yang tidak mudah tersedia di daerah dibandingkan data nasional. Misalnya data ekspor dan impor barang lewat darat, jasa pengangkutan, dan jasa pariwisata. Jika data tersedia, biasanya data tersebut merupakan hasil survei atau catatan administrasi instansi/lembaga di tingkat pusat yang hanya tersedia untuk lingkup nasional.

Beberapa kegiatan ekonomi penting yang ada di wilayah biasanya mempunyai sistem pencatatan tersendiri tetapi sulit untuk diakses. Contohnya perusahaan minyak Caltex yang mempunyai pelabuhannya sendiri dengan status khusus.

Selain itu penggunaan konsep residen juga menjadi kendala lain dalam penyusunan statistik PDRB ini, yaitu terkait dengan perbedaan prinsip antara konsep tersebut dengan konsep penduduk.

Sistem pencatatan administrasi kegiatan ekspor dan impor di suatu pelabuhan kadangkala juga mencakup kegiatan daerah lainnya, sehingga mungkin terjadi pencatatan dua kali atau bahkan tidak tercatat sama sekali.

B. Antar-daerah

Dalam penghitungan impor antar-daerah terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- i. frekuensi pelaksanaan survei-survei khusus dan penelitian mendalam mengenai arus barang yang melalui darat, serta yang melintasi beberapa kabupaten atau wilayah sangat jarang dilakukan;
- ii. semakin kecil suatu wilayah, seperti halnya kabupaten atau kota, maka semakin terbuka kegiatan ekonominya. Akibatnya, transaksi ekonomi antara kabupaten atau kota menjadi semakin bertambah kompleks dan rumit;
- iii. belum ada instansi atau dinas teknis yang bertanggung jawab mengumpulkan data secara reguler dan lengkap mengenai transaksi ekonomi antar-kabupaten atau kota; dan
- iv. penutupan jembatan timbang pada perbatasan provinsi, menyebabkan upaya memperkirakan nilai transaksi eksternal (termasuk ekspor dan impor barang) melalui darat semakin sulit dilakukan;

Barang-barang transit yang khususnya yang dibawa dengan menggunakan transportasi darat melalui suatu daerah juga dapat menjadi kendala dalam penghitungan PDRB wilayah tersebut.

3.3.6.6. Perlakuan Khusus

Dengan memperhatikan berbagai penjelasan di atas maka upaya untuk melakukan estimasi perdagangan eksternal baik antar-negara maupun antar-daerah tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,:

- a. statistik ekspor dan impor (antar-negara) perlu diestimasi dengan menggunakan konsep penduduk sebagai proksi dari konsep residen. Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat dari kegiatan ekspor dan impor inilah dapat diturunkan informasi tentang surplus-defisitnya suatu daerah, selain juga gambaran ketergantungan satu daerah terhadap daerah lainnya;
- b. perdagangan antar-daerah dapat dihitung secara bersamaan dengan proses penghitungan *output* sektoral yang tingkat ketersediaan datanya relatif lebih baik. Pendekatan terhadap produsen ini akan menurunkan data tentang ekspor maupun perdagangan ke luar wilayah dengan mutu yang lebih baik. Meskipun kegiatan perdagangan antar-daerah ini tidak menciptakan devisa tetapi keberadaan dan kelangsungannya turut membentuk dan menjaga jaringan kerja ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- c. kegiatan yang bersifat multi baik itu multinasional, multi-regional, multi-aktivitas, multi-produk dan multi-guna, dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan data alokasi bagi komponen penggunaan PDRB tertentu. Sebagai contoh kegiatan kantor pusat yang umumnya berlokasi di kota-kota besar, sebagian pendapatan maupun konsumsinya dapat dialokasikan ke seluruh kantor cabangnya yang berlokasi di daerah-daerah lain;
- d. pelabuhan-pelabuhan yang melakukan aktivitas perdagangan eksternal (termasuk ekspor dan impor) yang merupakan penggabungan dari beberapa daerah seharusnya memperhitungkan kontribusi perdagangan daerah-daerah lainnya dalam pelabuhan tersebut. Dengan demikian data PDRB di setiap daerah dapat tetap terjaga kualitas serta konsistensinya.

Tabel 3.17
Lembar Kerja Penghitungan Ekspor Barang
Data dari *Subject Matter*
(Berupa Nilai Ekspor menurut Jenis Barang 2 Digit HS, dalam US \$)

HS	Kelompok Komoditi	2007
(1)	(2)	(3)
01	Binatang hidup	12.843.598
02	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan	4.016.178
03	Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya	428.619.820
.	.	.
97	Karya seni, barang kolektor dan barang antik	2.088.819
98	Kendaraan bermotor komponennya dlm keadaan terbongkar tdk lengkap	1.015.420
TOTAL NON MIGAS		26.236.298.628
TOTAL MIGAS		7.384.831.774
TOTAL EKSPOR MIGAS dan NON MIGAS		33.621.130.402

Tabel 3.18
Agregasi dari 99 Sektor HS 2 Digit
Menjadi Nilai Triwulanan menurut 18 Sektor

HS	Kelompok Komoditi	2007
(1)	(2)	(3)
01	Tanaman bahan makanan	125.953.782
	a. Sayuran & buah-buahan	90.805.039
	b. Biji-bijian	25.380.008
	c. Gaplek	9.768.735
02	Tanaman Perkebunan	556.684.625
	a. Tanaman perkebunan	329.277.873
	b. Kakao	227.406.752
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	69.182.014
.	.	.
18	Industri barang lainnya	1.275.273.226
TOTAL EKSPOR MIGAS dan NON MIGAS		33.621.130.402

Perkiraan *direct purchase* adalah 1,67% dan ekspor ilegal adalah 8,03% dari nilai ekspor barang menurut komoditi (berdasarkan hasil penyusunan tabel input-output Indonesia 2005).

Tabel 3.19
Perkiraan *Direct Purchase* dan Ekspor Ilegal Atas Dasar Harga Berlaku

HS	Kelompok Komoditi	2007
(1)	(2)	(3)
01	Tanaman bahan makanan	12.217.517
	a. Sayuran & buah-buahan	8.808.089
	b. Biji-bijian	2.461.861
	c. Gaplek	947.567
02	Tanaman Perkebunan	53.998.409
	a. Tanaman perkebunan	31.939.954
	b. Kakao	22.058.455
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	6.710.655
.	.	.
.	.	.
.	.	.
18	Industri barang lainnya	123.701.503
TOTAL EKSPOR MIGAS dan NON MIGAS		3.261.249.649

Perkiraan nilai ekspor ditambah dengan *direct purchase* dan ekspor ilegal.

Tabel 3.20
Total Nilai Ekspor Atas Dasar Harga Berlaku

HS	Kelompok Komoditi	Nilai Ekspor (US \$)	Nilai Ekspor (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Tanaman bahan makanan	138.171.299	1.210.077,98
	a. Sayuran & buah-buahan	99.613.128	872.392,85
	b. Biji-bijian	27.841.869	243.833,80
	c. Gaplek	10.716.302	93.851,34
02	Tanaman Perkebunan	610.683.034	5.348.245,98
	a. Tanaman perkebunan	361.217.827	3.163.477,09
	b. Kakao	249.465.207	2.184.768,88
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	75.892.669	664.653,58
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
18	Industri barang lainnya	1.398.974.729	12.251.954,87
TOTAL EKSPOR MIGAS dan NON MIGAS		36.882.380.051	323.008.876,83

Keterangan: nilai kurs 1 US\$= Rp. 8.757,81

Tabel 3.21
Total Nilai Ekspor Atas Dasar Harga Konstan

HS	Kelompok Komoditi	Nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	IHPB 2007	Nilai ekspor Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Tanaman bahan makanan	1.210.077,98		733.115
	a. Sayuran & buah-buahan	872.392,85	156,84	556.249
	b. Biji-bijian	243.833,80	208,36	117.025
	c. Gaplek	93.851,34	156,84	59.841
02	Tanaman Perkebunan	5.348.245,98		2.781.350
	a. Tanaman perkebunan	3.163.477,09	182,57	1.732.795
	b. Kakao	2.184.768,88	208,36	1.048.555
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	664.653,58	172,49	385.340
.
.
.
TOTAL EKSPOR MIGAS dan NON MIGAS		323.008.876,83		188.431.270

Tabel 3.22
Lembar Kerja Penghitungan Impor Barang
Data dari Subject Matter
(Berupa Nilai Impor Menurut Jenis Barang 2 Digit HS, dalam US \$)

HS	Kelompok Komoditi	2007
(1)	(2)	(3)
01	Binatang hidup	84.934.702
02	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan	46.050.201
03	Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya	32.951.687
.	.	.
.	.	.
.	.	.
97	Karya seni, barang kolektor dan barang antik	421.959
98	Kendaraan bermotor komponennya dlm keadaan terbongkar tdk lengkap	126.006.170
Total non migas		16.408.074.377
Total migas		6.817.586.051
Total migas dan non migas		23.225.660.428

Tabel 3.23
Agregasi Dari 99 Sektor HS 2 Digit
Menjadi Nilai Triwulanan menurut 18 Sektor

HS	Kelompok Komoditi	2007
(1)	(2)	(3)
01	Tanaman bahan makanan	334.418.792
	a. Sayuran & buah-buahan	105.555.214
	b. Biji-bijian	228.863.578
	c. Gaplek	672.188.324
02	Tanaman Perkebunan	366.521.168
	a. Tanaman perkebunan	334.418.792
	b. Kakao	105.555.214
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	228.863.578
.	.	.
.	.	.
18	Industri barang lainnya	423.298.218
	Total migas dan non migas	23.225.660.428

Perkiraan *direct purchase* adalah 4,91% dan impor ilegal adalah 6,44% dari nilai impor barang menurut komoditi (berdasarkan hasil penyusunan tabel input-output Indonesia 2005), sedangkan nilai *insurance* dan *freight* diperoleh dari dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

Tabel 3.24
Perkiraan *Direct Purchase* dan Impor Ilegal Atas Dasar Harga Berlaku

HS	Kelompok Komoditi	Direct Purc. & Impor Ilegal	Insurance & Freight
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Tanaman bahan makanan	12.217.517	36,14
	a. Sayuran & buah-buahan	8.808.089	11,41
	b. Biji-bijian	2.461.861	24,73
	c. Gaplek	947.567	72,64
02	Tanaman Perkebunan	53.998.409	39,61
	a. Tanaman perkebunan	31.939.954	36,14
	b. Kakao	22.058.455	11,41
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	6.710.655	24,73
.	.	-	-
.	.	-	-
.	.	-	-
18	Industri barang lainnya	123.701.503	45,75
	Total impor migas dan non migas	3.261.249.649	2.510

Perkiraan nilai impor ditambah dengan *direct purchase* dan impor ilegal, dikurangi dengan nilai *insurance* dan *freight*.

Tabel 3.25
Total Nilai Impor Atas Dasar Harga Berlaku

HS	Kelompok Komoditi	Nilai Impor (US \$)	Nilai Impor (Juta Rp)
01	Tanaman bahan makanan	346.636.309	3.035.774.93
	a. Sayuran & buah-buahan	114.363.303	1.001.572.08
	b. Biji-bijian	231.325.439	2.025.904.24
	c. Gaplek	673.135.891	5.895.196.24
02	Tanaman Perkebunan	420.519.577	3.682.830.56
	a. Tanaman perkebunan	366.358.746	3.208.500.29
	b. Kakao	127.613.669	1.117.616.27
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	235.574.233	2.063.114.37
.	.	.	.
.	.	.	.
18	Industri barang lainnya	546.999.721	4.790.519.63
Total impor migas dan non migas		26.486.910.077	231.967.325.94

Keterangan: nilai kurs impor tertimbang 1 US\$= Rp. 8.757,81

Tabel 3.26
Total Nilai Impor Atas Dasar Harga Konstan

HS	Kelompok Komoditi	Nilai impor Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	IHPB 2007	Nilai impor Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Tanaman bahan makanan			
	a. Sayuran & buah-buahan	1.001.572,08	156,81	638.594,80
	b. Biji-bijian	2.025.904,24	208,36	972.306,58
	c. Gaplek	5.895.196,24	156,84	3.758.732,62
02	Tanaman Perkebunan			
	a. Tanaman perkebunan	3.208.500,29	182,57	1.757.408,28
	b. Kakao	1.117.616,27	208,36	536.387,15
03	Peternakan dan hasil-hasilnya	2.063.114,37	172,49	1.196.077,67
.
.
Total impor migas dan non migas		231.967.325,94		

<http://www.bps.go.id>

BAB IV RANCANGAN TABULASI

Salah satu tujuan penyusunan data PDRB menurut penggunaan adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan perilaku dan transaksi sisi permintaan (*demand side*). Permintaan (*demand*) yang mengandung arti penggunaan (*used*) di satu sisi atau pengeluaran (*expenditure*) di sisi yang lain memberikan gambaran tentang permintaan akhir atas berbagai produk barang dan jasa, oleh berbagai institusi. Konsep **penggunaan** ini menjelaskan tentang bagaimana barang dan jasa yang ada di wilayah domestik digunakan; sedangkan konsep **pengeluaran** lebih menjelaskan tentang pelaku (konsumen akhir) serta perilakunya atas penggunaan produk tersebut.

Permintaan terhadap produk tersebut mengandung 3 (tiga) makna, *pertama*, untuk memenuhi permintaan akhir (*final demand*) dalam artian produk tidak untuk tujuan diproses lebih lanjut; *kedua*, untuk tujuan investasi fisik (PMTB dan perubahan inventori), dan *ketiga* untuk tujuan diekspor ke wilayah lain. Dari semua barang dan jasa yang dikonsumsi pada masing-masing komponen termasuk pula yang berasal dari impor (luar wilayah/luar negeri). Untuk mengukur data PDRB tersebut diperlukan waktu dan proses yang lama sehingga organisasi data menjadi hal yang amat penting. Organisasi adalah proses menata ulang data PDRB baik dari mulai proses *input* (data dasar), proses penghitungan, penyajian hasil dan analisis. Dengan demikian maka penyederhanaan data dalam bentuk tabel memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam memahami data PDRB dari proses awal sampai dengan hasilnya.

Tabulasi merupakan proses lanjut dalam upaya menyajikan informasi atau data PDRB tersebut, baik yang berupa kompilasi **data dasar**, **data olahan** maupun **data analisis** ke dalam format tabel. Proses tabulasi data PDRB dibedakan ke dalam 3 (tiga) tahapan. *Pertama* adalah perancangan tabel-tabel yang berkaitan dengan proses pengolahan data dasar⁵¹ PDRB menurut penggunaan⁵². *Kedua*, perancangan tabel-tabel bagi proses rekapitulasi hasil pengolahan data dasar PDRB, dan *ketiga* perancangan tabel-tabel analisis bagi kajian lanjut data PDRB. Ketiga tahapan proses tabulasi tersebut membentuk sistem pengolahan dan penyajian data PDRB, khususnya menurut penggunaan (permintaan akhir)

51 Data dasar adalah volume, harga, indeks harga maupun rasio-rasio tertentu.

52 Lihat pada lembar kerja/pengolahan pada masing-masing komponen.

secara terpadu, antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling melengkapi. Format tabel pada proses yang pertama telah dituangkan dalam prosedur pengukuran pada masing-masing komponen PDRB, sedangkan tahap kedua dan ketiga (proses rekapitulasi dan analisis) akan dibahas lebih lanjut berikut ini.

Sebagai bagian dari proses penyajian dan analisis data PDRB maka data PDRB yang begitu banyak dan bervariasi jenis maupun satuannya, akan dirancang secara kompak dan terpadu ke dalam bentuk tabel-tabel. Sesuai dengan penjelasan di atas maka tabel-tabel tersebut akan dibedakan menurut **tabel olahan**, **tabel rekapitulasi** dan **tabel analisis**. Tabel olahan adalah tabel-tabel dasar yang berisikan proses pengolahan awal data dasar menjadi data PDRB menurut penggunaan. Kemudian tabel rekapitulasi merupakan rangkuman dari data pada tabel-tabel olahan yang akan menghasilkan data pokok PDRB, yang mencakup perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar konstan. Tabel-tabel rekap tersebut juga akan dilengkapi dengan data turunannya yang umumnya disajikan dalam bentuk ukuran proporsi (pangsa) maupun indeks (berantai maupun perkembangan); sedangkan tabel-tabel analisis berisikan data pokok PDRB dapat dipadukan dengan data atau informasi lainnya seperti PDRB, data penduduk, tenaga kerja dan rumah tangga (*cross variable*).

4.1. Tabel-tabel Kerja

Sebagai bagian dari proses pengolahan data secara terpadu maka perancangan tabel di sini akan lebih ditekankan pada teknik penyajian data dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Ada 3 (tiga) aspek utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan format tabel, yaitu aspek mengenai jenis dan kategori variabel, aspek waktu dan aspek lokasi. Aspek jenis dan kategori variabel menggolongkan data secara lebih rinci sesuai dengan tujuan analisis, misal konsumsi rumah tangga yang dibedakan menurut kategori makanan dan bukan-makanan (bahkan dapat dirinci lebih jauh lagi sesuai kebutuhan). Kemudian aspek waktu akan membedakan data menurut pembatasan periode, misalnya tahunan, semesteran, triwulanan atau periode pembangunan tertentu. Selanjutnya aspek lokasi dimaksudkan untuk melihat sebaran variabel menurut wilayah misalnya menurut provinsi, kabupaten, wilayah lain. Manfaat merinci variabel ke dalam ketiga aspek utama tersebut adalah untuk memahami dan mempelajari tentang kondisi, fenomena atau *symptom* ekonomi yang terjadi, secara lebih tepat dan akurat.

Ketiga aspek tersebut dapat disajikan secara bersama-sama, kombinasi yang dipilih menjadi latar dasar penyusunan format tabel rekapitulasi data pokok PDRB. Apabila ketiga aspek dipakai serentak maka salah satu aspek muncul di judul tabel, aspek yang lain muncul di judul kolom dan di judul baris dalam membentuk kompartimen tabel tersebut. Susunan kategori dalam lajur kolom maupun lajur baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis atau pun selera, dengan tetap memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku umum dalam pembuatan tabel. Sebagai contoh, di provinsi ABCDE (lihat Tabel 1) nilai konsumsi rumah tangga dapat dirinci lebih lanjut menurut:

- jenis konsumsi yang terbagi atas makanan dan bukan-makanan;
- lokasi yang terdiri dari 5 kabupaten; dan
- waktu yang mencakup periode 6 tahun, 2000 sampai dengan 2005.

Secara garis besar desain dan struktur tabel dapat dibuat sebagai berikut:

- a. apabila kategori variabel muncul di judul tabel maka waktu menjadi judul kolom, sedangkan lokasi menjadi judul baris dan/atau sebaliknya (lihat contoh pada Tabel 2 dan 3);
- b. apabila waktu ada di judul tabel, maka kategori variabel dapat menjadi judul kolom sedangkan lokasi menjadi judul baris, dan/atau sebaliknya; dan
- c. apabila lokasi menjadi judul tabel, maka kategori variabel dapat menjadi judul kolom sedangkan waktu menjadi judul baris dan/atau sebaliknya.

4.1.1. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel 4.1
Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2003-2007

Kabupaten/kota	2003	2004	2005	2006	2007
Kabupaten A					
Kabupaten B					
Kabupaten C					
Kabupaten D					
Kabupaten E					
Total Kabupaten					
Provinsi					

Tabel 4.2
Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2007⁵³

Kabupaten/kota	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten A			
Kabupaten B			
Kabupaten C			
Kabupaten D			
Kabupaten E			
Total Kabupaten			
Provinsi			

Tabel 4.3
Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2003-2007

Tahun	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			

Format dan struktur tabel tersebut dapat pula digunakan baik untuk tabel kerja maupun tabel rekap PDRB. Dalam prosesnya, sangat mungkin terbentuk ratusan tabel-tabel pokok berikut tabel turunannya, dengan struktur dan format yang berbeda, tergantung pada banyaknya kategori variabel, waktu maupun lokasi. Dengan demikian maka data PDRB dapat dibuat secara beragam tergantung pada kepentingan analisis.

⁵³ Data titik dan sebagai tahun dasar.

Dari tabel 4.1 dapat juga diturunkan tabel indeks perkembangan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan distribusi konsumsi rumah tangga seperti pada tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 berikut.

Tabel 4.4
Indeks Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan
Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (2000 = 100,00 persen), 2003-2007

Kabupaten/Kota	2000	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten A	100,00					
Kabupaten B	100,00					
Kabupaten C	100,00					
Kabupaten D	100,00					
Kabupaten E	100,00					
Total Kabupaten	100,00					
Provinsi	100,00					

Tabel 4.5
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan
Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2003-2007

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten A					
Kabupaten B					
Kabupaten C					
Kabupaten D					
Kabupaten E					
Total Kabupaten					
Provinsi					

Tabel 4.6
Distribusi Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan
Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2003-2007

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten A					
Kabupaten B					
Kabupaten C					
Kabupaten D					
Kabupaten E					
Total Kabupaten					
Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel 4.2 dapat diturunkan tabel proporsi/struktur konsumsi rumah tangga, seperti pada tabel 4.7, 4.8, dan 4.9 berikut.

Tabel 4.7
Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga
Provinsi ABCDE Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kategori Konsumsi (persen), 2007⁵⁴

Kabupaten/Kota	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten A			100,00
Kabupaten B			100,00
Kabupaten C			100,00
Kabupaten D			100,00
Kabupaten E			100,00
Total Kabupaten			100,00
Provinsi			100,00

54 Data titik.

Tabel 4.8
Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2007⁵⁵

Kabupaten/Kota	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten A			
Kabupaten B			
Kabupaten C			
Kabupaten D			
Kabupaten E			
Total Kabupaten	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.9
Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Konsumsi
(persen), 2007⁵⁶

Kabupaten/kota	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten A			
Kabupaten B			
Kabupaten C			
Kabupaten D			
Kabupaten E			
Total Kabupaten			100,00

Selanjutnya dari tabel 4.3 dapat diturunkan tabel perkembangan konsumsi rumah tangga provinsi ABCDE atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota seperti pada tabel 4.10, 4.11 dan 4.12.

55 Data titik.

56 Data titik.

Tabel 4.10
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Konsumsi
(persen), 2003-2007

Tahun	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	100,00	100,00	100,00
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			

Tabel 4.11
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2003-2007

Tahun	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			

Tabel 4.12
Proporsi/Struktur Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Konsumsi (persen), 2003-2007

Tahun	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan makanan	Total konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2003			100,00
2004			100,00
2005			100,00
2006			100,00
2007			100,00

4.1.2. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan

Tabel 4.13
Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2003-2007

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten A					
Kabupaten B					
Kabupaten C					
Kabupaten D					
Kabupaten E					
Total Kabupaten					
Provinsi					

Tabel 4.14.
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2003-2007

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten A					
Kabupaten B					
Kabupaten C					
Kabupaten D					
Kabupaten E					
Total Kabupaten					
Provinsi					

Tabel 4.15
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi ABCDE
Atas Dasar Harga Konstan (persen), 2003-2007

Tahun	Kategori Konsumsi		
	Makanan	Bukan Makanan	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			

Selain dari tabel 4.1 sampai dengan 4.15 masih banyak tabulasi lain yang bisa diturunkan dan disumbangkan dari komponen konsumsi rumah tangga.

4.2. Tabel-tabel Rekapitulasi

Setelah tabel-tabel kerja terbentuk maka langkah selanjutnya adalah membangun tabel-tabel rekapitulasi PDRB yang datanya bersumber dari tabel kerja tersebut. Tabel-tabel rekapitulasi menampilkan struktur maupun jenis data PDRB yang berisikan data pokok maupun data turunan PDRB, ditujukan baik untuk perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian maka tabel-tabel rekap PDRB ini akan membedakan penyajian data PDRB dalam 2 (dua) bentuk jenis data yaitu *data pokok* serta *data turunan*. Data pokok terdiri atas rincian besaran nilai PDRB (atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan) menurut masing-masing komponen penggunaan/ permintaan seperti konsumsi rumah tangga (KRT), konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (KLNPR), konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori dan ekspor serta impor, pada suatu rentang waktu tertentu. Data *turunan* PDRB diperoleh dari hasil pengolahan/ penghitungan lebih lanjut dari data pokok yang disajikan dalam bentuk proporsi (distribusi persentase), indeks perkembangan, indeks implisit (harga), indeks berantai serta laju pertumbuhan (riil), serta turunan lain yang relevan.

Tabel-tabel rekapitulasi pokok PDRB maupun turunannya, menurut masing-masing komponen penggunaan dibedakan menurut transaksi atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dengan format tabel serta struktur datanya seperti pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16
PDRB Menurut Komponen Penggunaan Provinsi/Kabupaten ABCDE,
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2003-2007

Komponen Penggunaan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Perbedaan (Diskrepansi) Statistik					
7. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁵⁷					
8. <u>Minus</u> Impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Jumlah PDRB Menurut Penggunaan					

Tabel-tabel di atas berisikan data tentang nilai penggunaan atau permintaan akhir PDRB atas dasar harga berlaku menurut masing-masing komponen dalam satuan rupiah. Perhatikan bahwa, selain transaksi domestik terdapat pula transaksi dengan wilayah lain (luar negeri dan wilayah lain di dalam negeri) yang disebut sebagai transaksi eksternal. Pada umumnya semua transaksi pada masing-masing komponen PDRB tersebut bertanda **positif** kecuali untuk perubahan inventori (bisa positif atau negatif).

Perlu diperhatikan bahwa tanda negatif pada komponen impor memiliki makna yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh karena di dalam produk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masing-masing komponen masih terkandung unsur impor, sehingga untuk melihat peran komoditas atau produk domestik, maka nilai impor harus dihilangkan dari seluruh perhitungan. Produk barang dan jasa yang berasal dari impor tersebut bisa digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi antara maupun konsumsi akhir.

Perbedaan atau diskrepansi statistik merupakan perbedaan antara jumlah nilai PDRB menurut permintaan (penggunaan) adalah dengan jumlah PDRB menurut penyediaannya (sektoral). Apabila elemen tersebut bertanda **positif** berarti total nilai PDRB menurut lapangan usaha lebih tinggi dari PDRB menurut penggunaan, sebaliknya apabila bertanda **negatif** total nilai PDRB menurut lapangan usaha lebih rendah daripada PDRB menurut penggunaan.

⁵⁷ Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kedua total nilai PDB tersebut berbeda, *pertama*, karena faktor pendekatan atau basis pengukuran (sisi produsen atau sisi konsumen); *kedua*, metode pengukuran yang ditetapkan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan); *ketiga*, sumber data (data primer maupun data sekunder); *keempat*, waktu pencatatan (bilamana transaksi tersebut direkam); *kelima*, sistem penilaian (harga produsen atau harga pembelian), dan *keenam*, asumsi yang digunakan yang melatar belakangi penyusunan masing-masing pendekatan pengukuran tersebut.

Tabel 4.17
PDRB Menurut Komponen Penggunaan Provinsi/Kabupaten ABCDE,
Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah), 2003-2007

Komponen Penggunaan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Perbedaan (Diskrepansi) Statistik					
7. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁵⁸					
8. <u>Minus</u> Impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Jumlah PDRB Menurut Penggunaan					

Tabel-tabel di atas berisikan data tentang nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut masing-masing komponen penggunaan atau permintaan akhir. Untuk kemudahan proses pengolahan maupun analisis seharusnya format semua tabel dibuat sama, baik secara baris maupun kolom, begitu pula dengan penetapan tahun awal penyajian data. Kedua tabel yang disajikan dalam satuan rupiah tersebut merupakan sumber pokok bagi terbentuknya data turunan maupun indikator-indikator PDRB, termasuk di dalamnya data agregat PDRB.

Langkah berikutnya adalah dengan memproses lanjut data PDRB menurut komponen penggunaan sebagaimana dicantumkan dalam tabel-tabel pokok di atas,

⁵⁸ Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

menjadi data turunan yang meliputi:

- a. pangsa (*share*) menurut masing-masing komponen, yang diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku;
- b. perkembangan menurut masing-masing komponen, yang diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku;
- c. pertumbuhan riil (*real growth*) menurut masing-masing komponen, yang diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan; dan
- d. indeks harga implisit (*Implicit Price Index*) menurut masing-masing komponen, yang diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan secara bersama sama.

Dirancangny data turunan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan tahap analisis lanjut serta memahami data PDRB secara lebih praktis, ringkas, kompak dan konsisten. Penyajian data dalam bentuk ukuran proporsi, rasio maupun indeks akan lebih memudahkan para pemakai data untuk memahami makna data PDRB yang biasanya disajikan dalam satuan nilai yang relatif besar. Penyederhanaan ukuran juga akan berdampak terhadap teknik visualisasi.

Tabel 4.18 menjelaskan tentang pangsa (*share*) atau peran masing-masing komponen penggunaan dalam membentuk PDRB secara keseluruhan, yang datanya dinyatakan dalam satu satuan persentase. Data dalam tabel tersebut mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing komponen penggunaan dalam membentuk sistem dan tatanan perekonomian wilayah/daerah, kerangka tersebut secara otomatis menunjukkan pula struktur konsumsi atau penggunaan akhir berbagai produk barang dan jasa dalam wilayah tersebut. Angka yang dinyatakan dalam satuan persentase tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing komponen penggunaan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu yang sama, kemudian mengkalikan dengan 100. Dalam kaitan ini total nilai yang digunakan adalah nilai PDRB menurut penggunaan atau permintaan akhir.

Tabel 4.18
Pangsa/Peran PDRB Menurut Komponen Penggunaan
Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2003-2007

Komponen Penggunaan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁵⁹					
7. <u>Minus</u> Impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Jumlah PDRB Menurut Penggunaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rumus penghitungannya adalah:

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j} \times 100$$

P_{ij} = pangsa/ peran komponen penggunaan ke-i tahun ke-j terhadap PDRB

X_{ij} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j adhb

X_j = nilai PDRB tahun ke-j adhb

i = 1,2,3,...,7

1 = konsumsi pengeluaran rumah tangga

2 = pengeluaran konsumsi LNPRT

3 = konsumsi pemerintah

.

.

.

7 = impor

Dari tabel 4.18 akan dapat dilihat komponen-komponen yang mendominasi permintaan akhir bahkan juga akan nampak ke mana destinasi atau tujuan penggunaan

⁵⁹ Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

berbagai jenis produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah, apakah untuk memenuhi kebutuhan domestik atau untuk luar wilayah (termasuk luar negeri). Apabila tabel tersedia untuk suatu data runtun waktu (*time series*), akan dapat dilihat perubahan pangsa yang terjadi antar-waktu, sehingga diketahui adanya perubahan perilaku konsumsi akhir oleh pelaku-pelaku konsumsi.

Untuk melihat perkembangan hasil proses produksi dalam satu kurun waktu dapat digunakan ukuran indeks perkembangan ataupun rasio nisbahnya. Angka indeks diperoleh dengan cara membagi data PDRB tiap tahun dengan nilai tahun dasar atau tahun referensi yang berfungsi sebagai titik analisis perbandingan waktu, misalnya tahun 2003 terhadap tahun 2000. Selain itu angka indeks tersebut juga menggambarkan besarnya perubahan konsumsi akhir masyarakat baik dalam bentuk volume maupun harga produk (barang dan jasa) sesuai dengan tujuan penggunaan masing-masing komponennya.

Tabel 4.19
Indeks Perkembangan PDRB Menurut Komponen Penggunaan
Provinsi/Kabupaten ABCDE Atas Dasar Harga Konstan (2000= 100,00 persen),
2003-2007

Komponen Penggunaan	Tahun					
	2000	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00					
2. Konsumsi LNPRT	100,00					
3. Konsumsi Pemerintah	100,00					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00					
5. Perubahan Inventori	100,00					
6. Ekspor	100,00					
- Luar negeri	100,00					
- Antar-daerah ⁶⁰	100,00					
7. <u>Minus</u> Impor	100,00					
- Luar negeri	100,00					
- Antar-daerah	100,00					
Jumlah PDRB menurut Penggunaan	100,00					

Rumus penghitungannya adalah:

$$IP_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_{it_0}} \times 100$$

- IP_{ij} = indeks perkembangan komponen penggunaan ke-i tahun ke-j
 X_{ij} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j atas dasar harga berlaku
 X_{it_0} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun dasar atas dasar harga berlaku
 i = 1,2,3,...,8
 1 = konsumsi pengeluaran rumah tangga
 2 = pengeluaran konsumsi LNPRT
 3 = konsumsi pemerintah
 .
 .
 8 = PDRB

Data pada tabel tersebut menjelaskan tentang perkembangan nilai PDRB dalam suatu kurun waktu, menurut masing-masing komponen maupun secara keseluruhan (total). Dengan data tersebut dapat menunjukkan komponen-komponen PDRB yang mengalami perkembangan secara cepat atau yang lambat atau juga yang tidak berkembang (*stagnant*). Selain itu juga dapat diketahui apakah arah kecenderungan penggunaan berbagai produk barang dan jasa serupa atau tidak dengan arah perkembangan PDRB penggunaan dari satu tahun dasar terhadap tahun-tahun lainnya ($t_0 = 100$).

Pada umumnya angka indeks masing-masing tahun berjalan setelah tahun dasar selalu lebih besar dari 100, sedangkan sebelum tahun dasar selalu berada di bawah angka 100. Apabila angka indeks berada di atas angka 100 berarti telah terjadi penambahan atau kenaikan volume dan/atau harga dari produk barang dan jasa yang dikonsumsi.

Jenis indeks berikutnya adalah indeks berantai PDRB (lihat Tabel 20). Indeks ini menjelaskan tentang perubahan nilai konsumsi barang dan jasa pada satu tahun terhadap tahun sebelumnya secara berurutan (bukan tahun dasar). Data pokok yang digunakan adalah PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan. Meskipun bukan hal yang bersifat umum tetapi jenis indeks ini dapat juga diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku.

60 Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

Tabel 4.20
Indeks Berantai PDRB Menurut Penggunaan/Permintaan Akhir
Provinsi/Kabupaten ABCDE, Atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2003-2007

Komponen Penggunaan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁶¹					
7. <u>Minus Impor</u>					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Jumlah PDRB menurut Penggunaan					

Indeks berantai diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut penggunaan dari masing-masing komponen maupun totalnya pada suatu tahun dengan komponen yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100.

Rumus penghitungannya adalah:

$$IB_{ij} = \frac{Y_{ij}}{Y_{i(j-1)}} \times 100$$

IB_{ij} = indeks berantai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j

Y_{ij} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j adhk

Y_{i(j-1)} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-(j-1) adhk

i = 1,2,3,...,8

1 = konsumsi pengeluaran rumah tangga

2 = pengeluaran konsumsi LNPRT

3 = konsumsi pemerintah

.

.

.

8 = PDRB

Data hasil perhitungan tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan PDRB menurut penggunaan antar-tahun secara berturutan, baik menurut masing-masing komponen maupun secara keseluruhan. Kemudian untuk menghitung pertumbuhan PDRB secara

⁶¹ Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

nyata atau yang disebut sebagai pertumbuhan “riil”, angka indeks tersebut masih harus dikurangi dengan 100. Sesuai dengan prinsip dasar ekonomi, maka pertumbuhan PDRB secara total dengan kata lain disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Ukuran pertumbuhan riil yang diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan ini merupakan inti bahasan penghitungan PDRB baik menurut lapangan usaha maupun penggunaan.

Selain indikator-indikator yang dihitung dari masing-masing komponen PDRB, data PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menghitung indeks implisit. Indeks tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran tentang **tingkat perkembangan** harga seluruh produk barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir, artinya perubahan tingkat harga yang terjadi dari satu tahun dasar ke tahun berjalan tertentu, secara kumulatif. Indeks ini kadang-kadang disebut pula sebagai deflator PDRB (*GRDP deflator*).

Tabel 4.21
Indeks Implisit PDRB Menurut Komponen Penggunaan/Permintaan Akhir
Provinsi/Kabupaten ABCDE, 2003-2007(Persen)

Komponen Penggunaan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁶²					
7. <u>Minus</u> Impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
PDRB Menurut Penggunaan					

Indeks harga implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, kemudian dikalikan dengan 100. Hal yang sama juga dilakukan terhadap masing-masing komponen penggunaan. Besaran indeks ini akan identik dengan rata-rata dari berbagai indeks harga yang digunakan dalam pengukuran PDRB.

Rumus penghitungannya adalah:

$$I_{ij} = \frac{X_{ij}}{Y_{ij}} \times 100$$

- I_{ij} = indeks implisit komponen penggunaan ke-i tahun ke-j
 X_{ij} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j adhk
 Y_{ij} = nilai komponen penggunaan ke-i tahun ke-j adhb
 i = 1,2,3,...,8
1 = konsumsi pengeluaran rumah tangga
2 = pengeluaran konsumsi LNPRRT
3 = konsumsi pemerintah
. . .
8 = PDRB

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hasil perhitungan tersebut akan memberikan gambaran tentang indeks perkembangan (harga), atau besaran yang menunjukkan terjadinya perubahan harga dalam satu kurun waktu, secara kumulatif. Perubahan indeks perkembangan yang terjadi di antara 2 (dua) waktu secara berturut-turut memberikan indikasi terjadinya tingkat **inflasi**, khususnya pada sisi penggunaan atau permintaan PDRB.

Selanjutnya susunan maupun struktur tabel dapat pula mengikuti *layout* atau rancangan tabulasi sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel kerja. Adanya kepentingan analisis yang berbeda menyebabkan struktur tabel harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam membaca atau mengartikan berbagai data yang disajikan (kuantitatif khususnya). Pada akhirnya, baik tabel pokok PDRB maupun table-tabel rekapitulasi akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keadaan perekonomian suatu daerah (kabupaten maupun kota) secara lebih rinci, ringkas dan konsisten dilihat dari aspek permintaan. Dari tabel pokok maupun tabel turunan tersebut dapat dibuat analisis lebih lanjut mengenai pelaku, perilaku maupun transaksi ekonomi yang terjadi dalam wilayah-wilayah tertentu.

62 Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

4.3. Tabel-tabel Analisis

Rancangan tabel-tabel analisis yang akan diperkenalkan di sini berisikan data pilihan dari tabel pokok maupun tabel turunan PDRB untuk kepentingan kajian lebih lanjut. Pada prinsipnya semua jenis data tersebut dapat langsung dianalisis sesuai dengan kebutuhan, meskipun ada beberapa di antaranya yang tidak ditampilkan karena alasan teknis dan praktis. Data pokok yang diproses lanjut menjadi data analisis ini dapat pula dilengkapi dengan variabel lain yang mempunyai korelasi dengan data PDRB. Perangkat data tersebut dapat dijadikan sebagai indikator-indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro, dengan menggunakan ukuran serta kaidah-kaidah yang bersifat universal.

PDRB dari sisi produsen atau sektoral dan menurut penggunaan atau permintaan dibedakan dalam tata-cara pengukuran dan sumber datanya. Dengan demikian maka pendekatan analisis dari kedua sisi pandang PDRB tersebut tentunya juga agak sedikit berbeda. Jika analisis PDRB sisi sektoral lebih menekankan pada masalah penciptaan nilai tambah⁶³ oleh berbagai sektor, maka dari sisi penggunaan di sini lebih menekankan pada masalah permintaan (akhir) terhadap berbagai produk barang dan jasa oleh masyarakat domestik maupun luar negeri.

PDRB menurut penggunaan (*expenditure side*) atau yang disebut pula sebagai PDRB menurut permintaan ini (*demand side*) sebenarnya memberikan gambaran serupa tentang hubungan antara pelaku, perilaku permintaan (akhir) serta struktur penggunaannya. Sementara penggunaan produk di satu sisi dengan permintaan produk di sisi yang lain lebih menggambarkan tentang hubungan keseimbangan transaksi ekonomi antara sisi penyediaan (*supply*) dengan sisi permintaan (*demand*). Penggunaan PDRB dilihat dari sisi penyediaan menunjukkan berapa bagian dari produk domestik yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat dan berapa bagian untuk memenuhi permintaan antara.

Penggunaan konsumsi akhir yang direalisasikan oleh pelaku-pelaku ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, produsen serta luar negeri di dalam wilayah domestik ini terdiri dari:

- konsumsi akhir barang dan jasa oleh unit-unit atau institusi rumah tangga, lembaga nirlaba (LNPR) serta pemerintah;

⁶³ Dari sisi yang berbeda diartikan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya.

- investasi fisik yang mencakup pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta perubahan inventori (cadangan) oleh seluruh unit institusi;
- ekspor barang dan jasa dengan pihak luar negeri.

Selain itu di dalam komponen PDRB penggunaan ini juga masih terkandung berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari impor. Untuk mengukur kemampuan atau peran ekonomi domestik maka komponen impor tersebut harus dihilangkan, caranya dengan mengurangi total nilai impor dari total nilai permintaan akhir. Selanjutnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan analisis region (provinsi) tentang ketergantungan wilayah tersebut dengan wilayah lain maka transaksi impor tersebut harus diperluas, yaitu dengan memisahkan antara transaksi dalam negeri (antar-daerah) dan dengan luar negeri (internasional).

Pada akhirnya untuk kepentingan analisis wilayah maka berbagai elemen/ unsur data PDRB menurut penggunaan ini akan dirangkum dan disajikan dalam berbagai macam tabel analisis yang diuraikan berikut.

4.3.1. Nilai Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Akhir

Parameter ini menjelaskan tentang besaran nilai pengeluaran keseluruhan barang dan jasa (domestik) yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir oleh masyarakat (termasuk yang berasal dari impor). Konsumsi akhir adalah pengeluaran masyarakat untuk penggunaan habis berbagai jenis barang dan jasa, yang tujuannya tidak untuk diproses lebih lanjut. Masyarakat yang berfungsi sebagai pelaku konsumsi akhir meliputi institusi rumah tangga (RT), lembaga non-profit pelayan rumah tangga (LNPRRT), dan pemerintah (lihat Tabel 22). Seluruh transaksi konsumsi atau permintaan akhir tersebut dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku (*current market price*).

Tabel 4.22
Nilai dan Porsi Permintaan Akhir Produk Barang dan Jasa
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007

Komponen Penggunaan Akhir	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga					
- Nilai (juta rupiah)					
- Proporsi (persen)					
2. Konsumsi LNPRT					
- Nilai (juta rupiah)					
- Proporsi (persen)					
3. Konsumsi Pemerintah					
- Nilai (juta rupiah)					
- Proporsi (persen)					
Jumlah PDRB menurut Penggunaan Akhir					
- Nilai (juta rupiah)					
- Proporsi (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur komponen permintaan akhir tersebut di atas menjelaskan tentang dominasi penggunaan barang dan jasa yang berasal dari produk domestik, baik secara nilai maupun secara persentase. Proporsi tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai masing-masing komponen permintaan terhadap total nilai PDRB (100). Data titik menunjukkan perbandingan kontribusi permintaan dari masing-masing komponen, sedangkan data runtun waktu (*time series*) menunjukkan adanya peralihan/ pergeseran pada tatanan pola atau struktur konsumsi yang terjadi antara komponen penggunaan dalam satu periode waktu tertentu.

4.3.2. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) atas Berbagai Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi oleh Masyarakat

Indeks implisit PDRB ini menggambarkan tentang perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi akhir secara kumulatif, mulai dari tahun dasar sampai dengan tahun tertentu (indeks perkembangan). Data ini menjelaskan tentang perubahan harga pembelian barang dan jasa dalam satu periode waktu dibandingkan tahun dasar. Perubahan harga antar-tahun yang umumnya disebut sebagai **inflasi** ini digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan harga produk yang harus dibayar oleh konsumen (akhir) tersebut. Angka inflasi dihitung dari angka pertumbuhan indeks implisit PDRB dikurangi dengan 100.

Indeks harga yang terjadi di antara dua waktu (tahun) secara berurutan disebut sebagai **inflasi atau deflasi**. Selain harga eceran (konsumen) dimungkinkan harga barang dan jasa tersebut dinilai menurut harga produsen, khususnya pada produk-produk tertentu (contoh harga barang modal).

Tabel 4.23
Tingkat Inflasi Komponen Permintaan/Konsumsi Akhir Produk
Barang dan Jasa, Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (persen), 2003-2007

Komponen Penggunaan Akhir	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga					
2. Konsumsi LNPRT					
3. Konsumsi Pemerintah					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto					
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah ⁶⁴					
7. <u>Minus</u> Impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah Antar-daerah (domestik)					
Jumlah PDRB Menurut Penggunaan					

4.3.3. Konsumsi Rumah Tangga Per RT (Rata-rata Setiap Rumah Tangga)

Bagian terbesar dari PDB menurut penggunaan ini secara nasional ditujukan untuk memenuhi permintaan konsumsi rumah tangga (lebih dari 60 persen). Dan data ini dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran dalam hal pemerataan konsumsi dengan menggunakan ukuran rata-rata⁶⁵ nilai konsumsi per rumah tangga. Untuk kepentingan tersebut dapat digunakan nilai konsumsi rumah tangga, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

⁶⁴ Antar-provinsi, antar-kabupaten maupun antar-wilayah lainnya.

⁶⁵ Ukuran rata-rata merupakan ukuran yang menjelaskan tentang representasi atau keterwakilan sekelompok variabel (data). Rata-rata yang biasanya digambarkan dalam bentuk bilangan konkrit ini bukan merupakan ukuran yang sebenarnya (aktual).

Tabel 4.24
**Total Konsumsi RT dan Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga Provinsi/
Kabupaten/Kota ABCDE (rupiah), 2003-2007**

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Total Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku					
• Total Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan					
• Jumlah Rumah Tangga					
• Konsumsi per Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku					
• Konsumsi per Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan					

Konsumsi per-rumah tangga menjelaskan tentang rata-rata pengeluaran per-unit rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir seluruh anggota rumah tangga. Apabila pengeluaran rata-rata per-rumah tangga atas dasar harga berlaku menjelaskan tentang perubahan konsumsi baik secara kuantitas (volume) maupun harga, maka rata-rata pengeluaran per-RT atas dasar harga konstan menjelaskan tentang perubahan konsumsi secara kuantitas atau volumenya saja. Dengan ukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui komposisi konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan riil yang terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga menggambarkan perubahan konsumsi masyarakat secara kuantitas. Jadi, apabila jumlah penduduk meningkat maka seharusnya konsumsi rumah tangga juga meningkat atau dengan kata lain, peningkatan konsumsi rumah tangga di antaranya disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah penduduk. Begitu pula dengan pengertian pada komponen lainnya. Apabila rasio menunjukkan tanda positif berarti terjadi penambahan atau peningkatan volume, sebaliknya apabila rasio bertanda negatif terjadi penurunan.

4.3.4. Konsumsi RT Per Kapita (Rata-rata Setiap Penduduk)

Data ini digunakan sebagai indikator kemakmuran potensial bagi setiap penduduk dalam siklus perilaku konsumsinya. Karena merupakan bagian dari anggota rumah tangga maka rata-rata konsumsi per-kapita ini tidak perlu dibuat menurut strukturnya. Sebagaimana pengukuran dalam konsumsi per-rumah tangga, maka untuk kepentingan tersebut dapat digunakan nilai konsumsi rumah tangga baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan (lihat Tabel 25).

Tabel 4.25
Total Konsumsi Rumah Tangga dan Rata-rata Konsumsi Per penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (rupiah), 2000-2003

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku					
• Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan					
• Jumlah Penduduk (jiwa)					
• Konsumsi per-penduduk Atas Dasar Harga Berlaku					
• Konsumsi per-penduduk Atas Dasar Harga Konstan					

Konsumsi rumah tangga per penduduk menjelaskan tentang rata-rata potensial pengeluaran per penduduk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Apabila pengeluaran rata-rata per penduduk atas dasar harga berlaku menjelaskan tentang perubahan konsumsi baik secara kuantitas (volume) maupun harga, maka rata-rata pengeluaran per-penduduk atas dasar harga konstan menjelaskan tentang perubahan konsumsi secara kuantitas atau perubahan volume saja.

4.3.5. Rasio Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB

Konsumsi pemerintah mempunyai peran yang relatif penting dalam mendukung keberlangsungan proses ekonomi, termasuk di dalamnya dalam peningkatan atau penurunan produksi yang pada akhirnya akan membentuk data PDRB⁶⁶.

Tabel 4.26
Rasio Konsumsi Pemerintah Terhadap Total PDRB
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, Tahun 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)					
• Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)					
• Rasio Konsumsi Pemerintah Terhadap Total PDRB					

66 Fungsi atau peran pemerintah dalam PDRB bisa dilihat baik pada pendekatan produksi (sektoral) maupun penggunaan atau permintaan.

Konsumsi pemerintah di sini hanya mencakup pengeluaran untuk konsumsi akhir jadi tidak termasuk pengeluaran konsumsi antara (apabila ada) dan tidak termasuk pula pembentukan modal (PMTB) oleh pemerintah.

4.3.6. Konsumsi Pemerintah Per Kapita

Data ini dimaksudkan untuk melihat peluang rata-rata setiap penduduk untuk mengakses atau pun menikmati layanan jasa pemerintah. Setiap rupiah pengeluaran pemerintah, dianggap memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas atau publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4.27
Rata-rata Konsumsi Pemerintah Per kapita
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Total Konsumsi Pemerintah, Atas Dasar Harga Berlaku (<i>rupiah</i>)					
• Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)					
• Rata-rata Konsumsi Pemerintah Per-kapita (<i>rupiah</i>)					

Dalam kenyataannya pengeluaran pemerintah ini memang relatif tidak begitu besar dibandingkan dengan total PDRB, tetapi manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas (publik). Bahkan dampak pengeluaran yang ditimbulkannya dapat berpengaruh pada sistem maupun struktur ekonomi.

Dalam SNA'93 direkomendasikan untuk menggolongkan pengeluaran pemerintah ini sesuai dengan tujuan sarannya, untuk individual dan kolektif. Penggolongan ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan antara manfaat langsung pengeluaran pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat, baik secara perorangan (individu) maupun secara bersama-sama (kolektif). Pengeluaran secara individual lebih dimaksudkan untuk melihat manfaat sebenarnya secara orang-perorang sebagai pihak yang menikmati layanan jasa pemerintah, misalnya, pengeluaran pemerintah untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Di sisi lain pengeluaran secara kolektif merupakan layanan jasa pemerintah yang

hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, misalnya, adalah pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan.

4.3.7. Investasi Fisik (PMB)

Pembentukan modal bruto (PMB) merupakan jumlah PMTB dan perubahan inventori. Apabila perubahan inventori bertanda positif maka PMB akan menjadi lebih besar daripada PMTB, sedangkan sebaliknya apabila bertanda negatif PMB akan menjadi lebih kecil daripada PMTB. Apabila nilai PMB lebih besar daripada nilai PMTB, kondisi ini menunjukkan terjadinya arus atau penambahan atas investasi fisik, baik yang berupa harta tetap (*fixed assets*) maupun harta lancar (*current assets*) yang berupa inventori. Sebaliknya apabila PMB lebih kecil daripada PMTB maka berarti terjadi pelepasan atau pengurangan inventori. Proses secara matematis tersebut secara otomatis menunjukkan pengurangan ataupun penambahan terhadap jumlah nilai investasi fisik yang ditanamkan pada tahun tersebut.

Tabel 4.28
Komposisi Pembentukan Modal Bruto (PMB)
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Total PMTB (<i>rupiah</i>)
	(.....%)	(.....%)	(.....%)	(.....%)	(.....%)
• Total Perubahan Inventori (<i>rupiah</i>)
	(.....%)	(.....%)	(.....%)	(.....%)	(.....%)
• Total PMB (<i>rupiah</i>)
	(100,0 %)	(100,0 %)	(100,0 %)	(100,0 %)	(100,0 %)

Selain dirinci menurut kelompok jenis barang modal, kategori PMTB ini dapat disajikan berdasarkan penggolongan menurut pelakunya (disebut sebagai institusi) yang terdiri atas: rumah tangga, pemerintah, BUMN/BUMD dan korporasi. Penggolongan menurut kategori ini dimaksudkan untuk melihat peran dari masing-masing institusi di dalam mendukung keberadaan, keberhasilan maupun pertumbuhan ekonomi domestik. Investasi yang ditanamkan oleh berbagai lembaga atau institusi tersebut mempunyai korelasi langsung terhadap penciptaan *output* (keluaran) dan nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi produksi.

4.3.8. Rasio PMB Terhadap PDRB

Ditinjau dari aspek riil, rasio ini menunjukkan hubungan antara barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk kepentingan investasi fisik (PMB) terhadap total penyediaan domestiknya (PDRB). Barang modal yang ditanamkan bisa berasal dari produk domestik maupun impor, sedangkan PDRB hanya mencakup produk yang dihasilkan di wilayah domestik (tidak termasuk impor). Oleh karena itu, untuk melihat perbandingan yang setara dengan produk domestik maka seharusnya pengaruh produk impor pada PMB harus dihilangkan.

Tabel 4.29
Perbandingan Pembentukan Modal Bruto (PMB) terhadap PDRB
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Total PMB (.....rupiah)					
• Total PDRB (.....rupiah)					
• Rasio PMB thdp PDRB					

Disebut **bruto** karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, dalam artian bahwa seluruh barang modal yang ditanamkan dinilai sebelum barang tersebut mengalami penyusutan nilai, baik secara ekonomis maupun teknis. Penyusutan merupakan pengeluaran yang disisihkan untuk menjaga keberlangsungan tersedianya barang modal. Dilihat dari aspek moneter, sumber dana bagi pembentukan modal adalah tabungan dan penyusutan tersebut. Kedua komponen tersebut diperhitungkan pada PDB dari sisi sektoral (nilai tambah) dan PDB dari sisi pendapatan. Dari sebagian komponen surplus usaha dan komponen penyusutan inilah proses investasi dapat dilakukan, termasuk investasi fisik.

4.3.9. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Indikator ini menggambarkan keseimbangan transaksi perdagangan barang dan jasa antara provinsi/kabupaten dengan luar negeri dan antara provinsi/kabupaten dengan provinsi/kabupaten, yang lazimnya disebut sebagai ekspor dan impor. Transaksi tersebut menggambarkan bagaimana pelaku ekonomi domestik telah melakukan transaksi sejenis dengan pelaku ekonomi luar wilayah. Apabila ekspor menggambarkan bagian dari produk

domestik yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, maka sebaliknya impor menggambarkan produk non-domestik yang dikonsumsi di wilayah domestik suatu negara.

Dilihat dari sisi moneter, ekspor dan impor yang merekam lalu lintas perdagangan barang dan jasa provinsi/kabupaten dengan luar negeri atau antara provinsi/kabupaten dengan provinsi/kabupaten ini akan berdampak terhadap penciptaan cadangan moneter di suatu wilayah. Apabila ekspor menambah cadangan moneter maka sebaliknya impor akan mengurangi cadangan moneter. Apabila ekspor lebih besar dari impor maka akan terjadi posisi surplus perdagangan, begitu pula sebaliknya apabila impor lebih besar maka akan terjadi defisit perdagangan.

Tabel 4.30
Keseimbangan Neraca Perdagangan Luar Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total nilai ekspor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Total nilai impor					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					
Ekspor Neto (X-M)					
- Luar negeri					
- Antar-daerah					

Data di sini menyajikan informasi tentang ketergantungan suatu wilayah terhadap wilayah lainnya, atas berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan maupun yang tidak dihasilkan di wilayah tersebut. Dengan demikian maka perdagangan barang dan jasa dengan pasar di luar wilayah ini bisa berupa produk sejenis atau yang tidak sejenis (berbeda). Pada akhirnya dari sisi perdagangan internasional ini dapat dilihat surplus atau defisitnya transaksi berjalan (*current account*), suatu negara terhadap negara-negara lainnya yang disebut sebagai keseimbangan neraca perdagangan luar negeri.

4.3.10. Rasio Kekuatan Ekspor terhadap Output Domestik

Analisa yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan data ekspor ini adalah

untuk melihat porsi dari produk domestik yang dimanfaatkan atau dijual ke wilayah lain baik untuk tujuan dikonsumsi ataupun tujuan lainnya. Adanya produk yang diekspor disebabkan paling tidak oleh 2 (dua) faktor; *pertama*, permintaan oleh pasar luar wilayah (*demand push*) dan *kedua*, karena adanya kelebihan di pasar domestik (*over supply*).

Tabel 4.31
Rasio Ekspor terhadap PDRB
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE, 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total nilai ekspor (..... Rp)					
- Antar-provinsi					
- Antar-daerah					
- Total Nilai PDRB (.....Rp)					
- Rasio Ekspor					

Indikator ini menggambarkan bagian dari produk domestik (barang dan jasa) untuk tujuan diekspor, tanpa perlu memperhatikan apakah produk tersebut untuk memenuhi permintaan antara ataupun permintaan akhir. Kegiatan ekspor antar-wilayah akan menimbulkan adanya aliran moneter yang masuk. Dapat diartikan bahwa apabila proporsi atau rasio ini meningkat maka ketergantungan luar wilayah terhadap jenis produk ekspor daerah tersebut juga meningkat.

4.3.11. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menjelaskan tentang rata-rata nilai produk domestik per penduduk atau nilai barang dan jasa yang secara potensial bisa diterima secara orang per-orang (individu). Sebagai gambaran ukuran representasi wilayah, data per kapita ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB (atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan), dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun).

Tabel 4.32
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Provinsi/Kabupaten/Kota ABCDE (Rupiah), 2003-2007

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB (adhb)					
Total PDRB (adhk)					
Jumlah penduduk					
PDRB per-kapita (adhb)					
PDRB per-kapita (adhk)					

PDRB perkapita dapat digunakan sebagai **proksi** dari ukuran kemakmuran⁶⁷, merupakan ukuran tingkat kemakmuran yang lebih baik adalah pendapatan nasional/regional per kapita. Mengingat pada tingkat daerah sangat sulit untuk menghitung pendapatan regional regional karena terbatasnya informasi tentang *factor income*

Tersedianya parameter-parameter makro dari data PDRB penggunaan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempelajari gejala-gejala atau fenomena ekonomi yang secara empiris terjadi di lapangan karena berbagai peristiwa atau kejadian tidak terlepas dari masalah pelaku dan perilaku ekonomi yang berkembang. Parameter parameter yang disajikan tersebut adakalanya perlu dilengkapi dengan variabel lain sehingga kualitas analisis menjadi lebih bermakna.

⁶⁷ Konsep terbaru mengartikan sebagai ukuran produktivitas.

<http://www.bps.go.id>

BAB V

TEKNIK ANALISIS

Bagian ini selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis data PDRB dilihat dari aspek penggunaan, atau analisis tentang perilaku penggunaan PDRB secara makro. Analisis data PDRB ini dimaksudkan untuk mengkaji, menguraikan atau mengartikan makna dari data PDRB serta membandingkannya baik antar-waktu, antar-variabel maupun antar-wilayah (daerah). Dilihat dari sisi wilayah, PDRB menurut penggunaan atau yang disebut juga sebagai sisi permintaan (*demand side*) ini dapat dikategorikan menurut banyaknya wilayah analisis, baik itu provinsi, kabupaten, wilayah pembangunan (wilbang), maupun menurut kategori wilayah lainnya. Perbandingan antar-wilayah ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan dapat pula dibuat stratifikasi (pelapisan) atau blok-blok menurut daerah yang mempunyai karakteristik yang relatif homogen. Perbandingan antar-wilayah juga berguna untuk melihat perbedaan kecepatan pembangunan sosial-ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari sisi waktu, kombinasi kategori tersebut akan menghasilkan dua tipe analisis yaitu analisis titik (*point analysis*) dan analisis runtun waktu (*time series analysis*). Analisis titik lebih menitik beratkan pada perbandingan variabel (komponen) dalam satu saat, sedangkan analisis runtun waktu lebih menitikberatkan pada perbandingan antar-waktu, baik tahunan maupun interval waktu lainnya. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan kedua tipe tersebut dipadukan dalam analisis secara bersama-sama (*panel analysis*). Perpaduan analisis ini di antaranya akan memberikan gambaran tentang perubahan komposisi maupun perkembangan yang terjadi.

Dengan teknik analisis yang sesuai atas data PDRB menurut penggunaan, akan dapat diketahui, dan selanjutnya dipelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan maupun fluktuasi ekonomi yang terjadi. Dengan demikian maka ketiga dimensi analisis tersebut akan melatar belakangi dasar perbandingan melalui pendekatan analisis yang akan digunakan selanjutnya. Selain itu juga dilakukan analisis agregat makro lainnya yang diturunkan dari PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Secara garis besar PDRB sisi penggunaan ini menjelaskan tentang i) bagaimana pendapatan yang diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir maupun kebutuhan lainnya dan ii)

bagaimana struktur dan pola konsumsi masyarakat di wilayah tersebut terhadap penggunaan berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor. Pada akhirnya hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan arah kebijakan pembangunannya khususnya di bidang ekonomi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PDRB selain dapat disajikan menurut sisi produksi atau sektoral, juga dapat disajikan pula menurut sisi penggunaan⁶⁸. Meskipun secara konsep jumlah nilai PDRB pada kedua sisi tersebut sama besar tetapi struktur di dalamnya memiliki makna kategori yang berbeda, karena tergantung pada inti dan fokus transaksinya. Pada sisi sektoral analisis lebih ditekankan pada masalah nilai tambah⁶⁹ yang diciptakan oleh berbagai macam sektor ekonomi produksi, sedangkan pada sisi penggunaan lebih ditekankan pada masalah penggunaan dari pendapatan yang diciptakan tersebut. Untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan PDRB penggunaan disini adalah pengeluaran konsumsi akhir oleh pelaku-pelaku ekonomi makro seperti institusi rumah tangga, pemerintah, sektor produksi (produsen) serta luar negeri.

Kategori atau komponen penggunaan akhir yang transaksinya direalisasikan oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir barang dan jasa, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), inventori (cadangan) serta ekspor barang dan jasa, dalam batas wilayah domestik suatu negara. Pengeluaran akhir dalam artian barang dan jasa tersebut tidak untuk tujuan diproses lebih lanjut menjadi produk lain, dalam wilayah tersebut, kecuali inventori yang dapat digunakan dalam proses tahun berikutnya. Karena dalam komponen permintaan akhir tersebut masih termasuk komoditas impor maka untuk mengukur kemampuan dan peran ekonomi domestik, impor tersebut harus pula diperhitungkan dari seluruh nilai konsumsinya, yaitu dengan mengurangkan porsi nya dari total pengeluaran akhir domestik.

5.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan data makro yang disusun untuk mengetahui kondisi dan perilaku ekonomi suatu wilayah. Dilihat dari sisi lapangan usaha,

68 Dalam beberapa literatur disebut dikenal sebagai pendekatan ketiga dalam pengukuran PDB/PDRB. Cara yang pertama adalah pendekatan produksi, sedangkan yang kedua adalah pendekatan pendapatan.

69 Dari sisi yang berbeda diartikan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya.

(sektor industri) PDRB ini merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian apabila dilihat dari sisi penggunaan merupakan seluruh nilai barang dan jasa produksi domestik yang dikonsumsi akhir oleh masyarakat yang terdiri dari unit-unit ekonomi rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, sektor usaha dan luar negeri. Sedangkan jika dilihat dari sisi pendapatan lebih menggambarkan tentang besaran pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebagai balas jasa yang diterima atas keterlibatannya dalam berbagai kegiatan ekonomi produksi di wilayah domestik.

Untuk jelasnya yang dimaksud dengan konsumsi akhir disini adalah penggunaan akhir atas berbagai produk barang dan jasa (produksi domestik maupun impor), yang tujuannya tidak untuk diproses lebih lanjut di dalam wilayah domestik suatu negara. Konsumsi tersebut mencakup konsumsi rumah tangga (RT), lembaga nir-laba yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, unit usaha (produsen) serta luar negeri. Konsumsi akhir unit usaha (produsen) disini dinyatakan dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori, sedangkan luar negeri berupa ekspor dikurangi impor.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan di kurangi pengurangan barang-barang modal yang dikuasai oleh unit produser domestik untuk digunakan dalam proses produksi secara terus menerus dan berkesinambungan. Sedangkan perubahan inventori yang juga merupakan bagian dari proses pembentukan modal mencakup penambahan ataupun pengurangan persediaan produk barang, baik yang berbentuk bahan baku & bahan penolong, barang setengah jadi, maupun barang jadi (termasuk barang perdagangan).

PMTB disini mencakup barang modal berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*) yang terlibat dalam berbagai aktivitas produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembentukan modal di wilayah domestik ini bisa berasal dari produk wilayah tersebut (domestik) ataupun yang berasal dari impor. Termasuk pula disini inventori, atau berbagai produk barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi maupun konsumsi. Contoh dari PMTB adalah bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, kendaraan, mesin-mesin, ternak untuk diambil hasilnya, hak cipta, dan sejenisnya.

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi perdagangan produk barang dan jasa suatu wilayah dengan wilayah lainnya (*rest of the world*). Apabila ekspor merupakan penjualan keluar wilayah maka sebaliknya impor merupakan pembelian dari luar wilayah. Dalam sistem pencatatan neraca nasional aktivitas ini disebut pula sebagai transaksi

eksternal, dimana yang menjadi acuan utama adalah konsep residen. Atau dalam pengertian yang sederhana ekspor dan impor ini merupakan transaksi perdagangan yang terjadi antara residen dengan non-residen yang menyebabkan terjadinya aliran moneter masuk maupun keluar.

Dilihat dari aspek riil ekspor akan mengurangi penyediaan (*supply*) domestik sedangkan impor akan menambah penyediaan; tanpa harus memperhatikan apakah penyediaan tersebut untuk memenuhi permintaan antara atau permintaan akhir masyarakat domestik. Permintaan (*demand*) luar negeri memacu kegiatan ekspor, sebaliknya permintaan dalam wilayah akan memacu terjadinya impor. Semakin besar ketergantungan suatu wilayah terhadap luar wilayah maka semakin besar pula peluang terjadinya transaksi ekspor maupun impor. Komoditas atau produk ekspor yang dikonsumsi oleh penduduk residen baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak dikategorikan sebagai kegiatan ekspor, begitu pula sebaliknya dengan impor, apabila produk impor dikonsumsi oleh penduduk non-residen maka tidak dicatat sebagai kegiatan impor.

Dilihat dari sisi pendapatan, adanya kegiatan ekspor dan impor ini akan mempengaruhi cadangan moneter suatu wilayah; apabila ekspor menambah cadangan moneter sebaliknya impor mengurangi cadangan moneter. Ekspor neto, atau ekspor dikurangi dengan impor disebut sebagai surplus atau defisit transaksi neraca berjalan. Apabila ekspor neto bertanda positif maka moneter akan mengalir ke dalam suatu wilayah, sebaliknya apabila bertanda negatif maka moneter akan mengalir keluar wilayah. Indikator ini menunjukkan tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap wilayah-wilayah lainnya. Bila bertransaksi dengan luar negeri, transaksinya dinyatakan dalam besaran nilai mata uang internasional (umumnya US dolar). Oleh karena itu perbedaan dan fluktuasi kurs mata uang asing terhadap mata uang lokal akan menjadi suatu koreksi dalam penilaian produk barang dan jasa baik ekspor maupun impor. Dalam istilah lain ekspor dikurangi dengan impor ini disebut pula sebagai **tabungan** luar wilayah.

Dalam sistem penilaiannya, data PDRB ini dibedakan menjadi atas dasar harga berlaku (*current price*) dan atas dasar harga konstan (*constant price*)⁷⁰. Apabila dilihat dari sisi penggunaan, data PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan seluruh nilai barang dan jasa konsumsi akhir yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan (*current price*), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa

70 Penilaian dalam konteks makro.

konsumsi akhir tersebut berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang ditetapkan sebagai sebagai tahun dasar (waktu referensi).

Sampai saat ini, tahun dasar yang digunakan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah tahun 2000⁷¹, dan biasanya tahun dasar ini berubah setiap sepuluh tahun sekali. Ditetapkannya tahun 2000 sebagai tahun dasar karena kondisi ekonomi pada saat tersebut relatif stabil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Dengan adanya rencana dalam perubahan pengukuran pertumbuhan riil ekonomi ini⁷², maka selanjutnya yang ditetapkan sebagai tahun dasar adalah tahun sebelum (t-1) tahun perhitungan (t).

Beberapa informasi agregat dapat diturunkan dari kedua pendekatan pengukuran PDRB ini. Informasi atau data agregat ini menggambarkan kondisi dan situasi ekonomi di suatu wilayah secara umum yang berkaitan dengan masalah pendapatan yang tercipta, nilai seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi akhir, barang dan jasa yang menjadi bagian dari investasi fisik atau pembentukan modal, nilai barang dan jasa yang diekspor maupun yang berasal dari impor, pendapatan dari luar wilayah yang diterima maupun yang mengalir atau dibayarkan keluar wilayah, serta transaksi transfer atau hibah (*current transfer*) yang terjadi antara wilayah (diterima maupun dibayar).

5.2. Identifikasi Data Agregat PDRB

Tujuan dari penyusunan data-data agregat ini adalah untuk mengelaborasi serta memahami secara lebih jauh mengenai arti daripada **tingkat kemakmuran** masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Sebagaimana yang terjadi bahwa manfaat pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya mampu memberikan kemakmuran kepada masyarakat secara adil dan merata. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa kemakmuran di suatu daerah sebetulnya berasal dari aliran kemakmuran daerah lainnya. Untuk melihat fenomena dan mengukur besaran tersebut indikator-indikator ekonomi makro dapat membantu digunakan untuk mempelajari proses pembangunan yang tengah berlangsung maupun dalam pendistribusian hasilnya pada masing-masing wilayah.

Data agregat yang dapat dihasilkan dalam proses penghitungan PDRB menurut penggunaan, antara lain adalah:

71 Pada tingkat nasional (PDB) saat ini sudah menggunakan tahun dasar 2000.

72 Sesuai dengan rekomendasi dalam SNA'93.

- a. Produk domestik regional bruto (PDRB);⁷³
- b. Produk domestik regional neto (PDRN);
- c. Pendapatan regional;
- d. PDRB per kapita;
- e. Pendapatan Regional per kapita;
- f. Konsumsi rumah tangga (regional) per kapita;
- g. Konsumsi pemerintah (regional) per kapita;
- h. Investasi phisik (PMTB) per kapita; dan
- i. Ekspor, neto (keseimbangan perdagangan luar negeri).

Data agregat sebagaimana dijelaskan tersebut di atas merupakan parameter-parameter PDRB dilihat dari sisi penggunaan (*demand side*) maupun PDRB menurut pendapatan yang bersifat umum. Semua indikator tersebut dimaksudkan untuk dijadikan bahan dalam upaya membandingkan kondisi ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Meskipun demikian masing-masing wilayah dapat saja menghitung indikator-indikator makro yang dibutuhkan. Sebagai ukuran tingkat kemakmuran, pendapatan nasional maupun pendapatan regional, masih sangat relatif karena aspek moneter hanyalah satu dimensi dari kemakmuran sehingga tidak cukup representatif. Paling jauh ukuran tersebut hanya dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa suatu wilayah lebih baik atau lebih maju dari pada wilayah lainnya dilihat dari kemampuan dalam menciptakan pendapatan.

Investasi fisik merupakan bagian dari investasi yang ditanamkan di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi investasi adalah meningkatkan berbagai kegiatan ekonomi produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Biasanya sebagian besar dari investasi direalisasikan dalam bentuk fisik, sedangkan selebihnya berupa investasi finansial. Dalam sistem akuntansi perusahaan jenis investasi fisik dicatat sebagai bagian dari harta tetapnya. Dalam konteks makro data mengenai investasi phisik ini disajikan dalam PDRB menurut penggunaan, tepatnya pada komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dalam proses kompilasi PDRB menurut penggunaan dapat dihasilkan beberapa informasi agregat ekonomi makro penting yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja

73 Bisa pula digunakan data PDRB menurut lapangan usaha (industri) ataupun menurut penggunaan.

pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Bahkan data agregat ini dapat pula dikombinasikan dengan variabel sosial lainnya dalam analisis perilaku sosial-ekonomi yang lebih komplisit. Informasi yang diturunkan tersebut di antaranya meliputi:

- a. besaran (nilai) nominal yaitu besaran yang menggambarkan besarnya nilai moneter barang dan jasa yang dikonsumsi, diinvestasi dalam bentuk pembentukan modal fisik, dan yang diekspor. Untuk mengetahui porsi dari produk yang dihasilkan di wilayah domestik maka nilai tersebut harus dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor.
- b. proporsi atau kontribusi menggambarkan komposisi atau struktur kontribusi masing-masing komponen penggunaan akhir maupun pendapatan yang dinyatakan dalam satu satuan rasio (proporsi). Dalam struktur ini dapat dianalisis perbandingan atau perubahan komponen konsumsi akhir antar-waktu. Rasio diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku.
- c. pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang persentase perubahan konsumsi akhir barang dan jasa pada satu waktu terhadap waktu sebelumnya. Dinyatakan dalam ukuran volume (kuantum), baik pada masing-masing komponen maupun total. Tingkat pertumbuhan diperoleh dengan cara membagi nilai pada satu tahun tertentu dengan nilai pada tahun sebelumnya (dua periode secara berturut-turut). Pertumbuhan yang diturunkan dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan ini merupakan perhitungan indeks berantai dari satu waktu (tahun) terhadap waktu sebelumnya dalam suatu periode waktu tertentu.
- d. indeks implisit merupakan angka indeks perkembangan harga yang diperoleh dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan, untuk masing-masing komponen PDRB menurut penggunaan. Secara implisit angka indeks ini menjelaskan tentang perubahan harga dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat sebagai konsumsi akhirnya. Indeks harga yang merupakan indeks perkembangan ini menggambarkan perubahan harga secara kumulatif pada satu titik terhadap harga pada titik rujukan atau tahun dasar. Indeks perkembangan yang terjadi antar 2 (dua) tahun secara berturut-turut disebut sebagai inflasi di antara waktu-waktu tersebut.
- e. defisit/surplus perdagangan merupakan selisih transaksi perdagangan barang dan jasa domestik dengan negara/wilayah lain, atau disebut juga sebagai ekspor neto (ekspor minus impor). Surplus terjadi apabila ekspor lebih besar dari impor, defisit

perdagangan⁷⁴. Ekspor perdagangan merupakan indikator ketergantungan satu wilayah terhadap wilayah lain.

- f. PDRB per kapita merupakan rata-rata potensi berbagai produk barang dan jasa yang tersedia baik domestik maupun impor setiap penduduk di suatu wilayah⁷⁵ untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.

Dengan demikian maka PDRB sebagai salah satu indikator makro bermanfaat untuk menunjukkan kondisi perekonomian regional pada kurun waktu tertentu. Manfaat yang diperoleh dari data yang disajikan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan masing-masing, antara lain:

- a. perkembangan PDRB dengan menggunakan *harga berlaku* menjelaskan perkembangan produksi/pendapatan karena peningkatan volume dan harga-harga.
- b. PDRB atas dasar *harga berlaku* nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu region. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- c. PDRB atas dasar *harga berlaku* menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri atau luar daerah.
- d. PDRB atas dasar *harga berlaku* digunakan untuk menjelaskan struktur distribusi PDRB. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- e. PDRB per kapita atas dasar *harga berlaku* menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- f. dalam penghitungan dengan *harga konstan*, pengaruh kenaikan harga sudah ditiadakan, sehingga PDRB atas dasar *harga konstan* menunjukkan perkembangan riil PDRB pada suatu (periode) tahun tertentu.
- g. PDRB penggunaan *atas dasar harga konstan* bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan wilayah.
- h. PDRB dan PRB per kapita *atas dasar harga konstan* berguna untuk mengetahui *pertumbuhan nyata* ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

74 Dari aspek moneter secara nasional disebut pula sebagai tabungan luar negeri, atau tabungan yang terbentuk karena adanya transaksi perdagangan luar negeri yang akan mempengaruhi devisa nasional.

75 Dari sisi sektoral dianggap identik dengan pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi atas keterlibatannya dalam berbagai proses produksi.

5.3 Analisis Data PDRB Menurut Penggunaan

Dalam kaitannya dengan pengukuran PDRB (penggunaan) pada tingkat regional maka dipandang perlu untuk menggunakan asumsi-asumsi mengingat terbatasnya berbagai informasi (data) yang tersedia di lapangan. Asumsi tersebut tentunya akan mempengaruhi atau melatar belakangi analisis yang akan disajikan. Sebagai contoh, secara konseptual total ekspor antar-provinsi seharusnya sama dengan total impor antar-provinsi, meskipun dalam kenyataannya tidak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dengan demikian maka untuk kepentingan analisis pada tingkat region (provinsi) akan dilakukan penyesuaian terhadap teknik dan model analisis berdasarkan pada kategori data yang tersedia, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis model statistik-ekonomi lainnya. Analisis deskriptif disini akan lebih menekankan pada kajian sederhana yang berkaitan dengan fenomena ekonomi yang terjadi, yang tidak terlepas dari proses pengumpulan, pengolahan serta penyajian datanya. Analisis model statistik ekonomi di sini akan menggunakan model-model ekonomi yang relatif sederhana tanpa mengabaikan kaidah statistik yang sesuai.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, cakupan analisis PDRB maupun pendapatan regional dibedakan menurut komponen penggunaan, menurut wilayah dan menurut waktu. Dimensi komponen penggunaan menjelaskan tentang struktur konsumsi akhir sebagai pengeluaran rumah tangga, pemerintah, sektor bisnis maupun luar negeri. Berbeda dengan sektor bisnis dan luar negeri, sektor rumah tangga dan pemerintah menggunakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Sementara itu sektor bisnis menggunakan sebagian pendapatannya untuk investasi (khususnya fisik) yang direalisasikan dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan inventori (persediaan). Transaksi dengan luar wilayah dalam bentuk ekspor dan impor produk barang dan jasa tersebut dihitung untuk melihat dan mengukur ketergantungan ekonomi domestik terhadap pelaku ekonomi luar wilayah, termasuk juga besaran aliran moneter yang terjadi.

Selain atas dasar harga berlaku PDRB menurut penggunaan ini juga disajikan menurut harga konstan. Pembedaan penilaian tersebut didasarkan karena pengaruh faktor perubahan volume dan perubahan harga. PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) menjelaskan tentang besaran nominal PDRB karena dipengaruhi oleh perubahan volume serta perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menjelaskan

besaran PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan volume saja (harga diasumsikan tetap). Masing-masing jenis penilaian PDRB tersebut dianalisis secara berbeda;

- i. Total PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan tentang besaran nilai pengeluaran atau transaksi domestik untuk keseluruhan barang dan jasa, dinilai dengan harga pasar (*current market price*), yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir (termasuk yang berasal dari impor), sedangkan rinciannya menjelaskan tentang besaran transaksi pada masing-masing komponen, seluruhnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

=> Konsumsi Rumah Tangga (KRt)	= Rp.....
(+) Konsumsi Lembaga Non-Profit pelayan Rt (LNPRT)	= Rp.....
(+) Konsumsi Pemerintah (KPem)	= Rp.....
(+) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	= Rp.....
(+) Perubahan Inventori (P_{Ivtr})	= Rp.....
(+) Ekspor (Eks)	= Rp.....
Total nilai pengeluaran konsumsi akhir	= Rp.....
(-) Impor (Im)	= (Rp.....)
Total Nilai Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (adhb) ⁷⁶	= Rp.....

- ii. total PDRB atas dasar harga konstan menjelaskan tentang besaran nilai pengeluaran domestik untuk keseluruhan produk barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir (termasuk yang berasal dari impor), yang dinilai berdasarkan harga pada satu tahun dasar tertentu (*base year*), dan bisa dirinci menurut komponen transaksinya. Analisis harga konstan ini lebih tepat apabila digunakan bagi data runtun waktu (*time series*), sehingga dapat menjelaskan perubahan kuantum atau volume yang terjadi pada masing-masing komponennya antar-waktu. Formulasi total PDRB adhk dengan komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

=> Konsumsi Rumah Tangga (KRt)	= Rp.....
(+) Konsumsi Lembaga Non-Profit pelayan Rt (LNPRT)	= Rp.....
(+) Konsumsi Pemerintah (Kpem)	= Rp.....
(+) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	= Rp.....
(+) Perubahan Inventori (PIvtr)	= Rp.....
(+) Ekspor (Ext)	= Rp.....
<hr/>	
Total nilai pengeluaran konsumsi akhir	= Rp.....
(-) Impor (Imt)	= (Rp.....)
<hr/>	
Total Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (adhk) ⁷⁷	= Rp.....

- iii. Distribusi penggunaan akhir menjelaskan tentang struktur atau komposisi penggunaan akhir dari PDRB, yang dinyatakan dalam satuan persentase. Terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan atas inventori, ekspor dan impor.

Proporsi dihitung dari PDRB (atas dasar harga berlaku), yang dirinci menurut masing-masing komponennya. Data runtun waktu dapat menunjukkan peralihan/pergeseran (*shifting*) tatanan pola konsumsi yang terjadi antar-komponen penggunaan dalam satu periode. Formulasi hubungan proporsi komponen PDRB adalah sebagai berikut:

=> Konsumsi Rumah Tangga (KRt)	= %
(+) Konsumsi Lembaga Non-Profit pelayan Rt (LNPRT)	= %
(+) Konsumsi Pemerintah (KPem)	= %
(+) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	= %
(+) Perubahan Inventori (PIvtr)	= %
(+) Ekspor (Ex)	= %
<hr/>	
Total nilai pengeluaran konsumsi akhir	= %
(-) Impor (Im)	= (.....%)

76 atas dasar harga pasar (adhps)

77 atas dasar harga pasar (adhps)

Total nilai produk domestik regional bruto/PDRB (atas dasar harga berlaku) = 100%. Dari pengalaman empiris secara umum dapat dikatakan bahwa semakin maju suatu daerah/wilayah maka semakin kecil peran atau porsi konsumsi rumah tangganya, sebaliknya jika semakin terbelakang suatu wilayah maka peran konsumsi rumah tangganya semakin besar. Di negara maju yang masyarakatnya mempunyai pendapatan tinggi, sebagian besar dari pendapatan tersebut tidak digunakan untuk konsumsi tetapi ditabung untuk investasi (setelah kebutuhan konsumsinya terpenuhi). Indikasi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan kontribusi antara konsumsi rumah tangga dengan pembentukan modalnya, terhadap total PDRB.

- iv. Pertumbuhan PDRB, pertumbuhan yang dinyatakan dalam satuan indeks (berantai)⁷⁸ ini menjelaskan tentang terjadinya peningkatan (bertanda positif) ataupun penurunan (bertanda negatif) pengeluaran untuk konsumsi secara kuantitas, di antara dua titik waktu yang berurutan. Rasio pertumbuhan yang dinyatakan dalam bilangan persentase tersebut diturunkan dari perhitungan PDRB adhk yang diformulasikan sebagai berikut

$$r(k) = \frac{PDRB(k)_t}{PDRB(k)_{t-1}} \times 100\% - 100\%$$

di mana: k = komponen
 t = tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
 $t-1$ = tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)

Pertumbuhan yang terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga menggambarkan perubahan konsumsi secara kuantitas. Analognya apabila jumlah penduduk meningkat maka seharusnya konsumsi rumah tangga juga meningkat. Begitu pula dengan komponen lainnya apabila rasio menunjukkan tanda positif berarti terjadi penambahan atau peningkatan volume, sebaliknya apabila rasio bertanda negatif terjadi penurunan volume.

78 Disarankan untuk menggunakan indeks Las peyres untuk menghitung indeks volume

- v. Indeks harga implisit menjelaskan tentang perubahan harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Indeks implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB adhb dengan nilai PDRB adhk, yang secara otomatis akan menghasilkan indeks perkembangan harga, dengan pembandingan tahun dasar (tahun referensi perhitungan).

Formulasi indeks tersebut adalah sebagai berikut

$$IH(\text{Indeksimplisit}) = \frac{PDRB_{berlaku}}{PDRB_{konstan}} \times 100\%$$

Indeks harga (IH) yang terbentuk di sini menggambarkan perubahan kumulatif harga barang dan jasa yang dikonsumsi akhir mulai dari tahun dasar sampai dengan tahun tertentu (indeks perkembangan).

- vi. PDRB per kapita merupakan ukuran rata-rata yang menjelaskan tentang nilai yang dapat diperoleh seorang wakil sekelompok penduduk suatu wilayah dari PDRB. Rata-rata yang biasanya digambarkan dalam bentuk bilangan konkrit ini tidak dapat diartikan sebagai ukuran yang sebenarnya (aktual).

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa PDRB maupun pendapatan regional merupakan ukuran **produktivitas** dari faktor-faktor produksi dalam melakukan transformasi berbagai sumber daya yang tersedia (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya finansial) dalam proses produksi yang dapat menciptakan sejumlah pendapatan. Pada gilirannya sumber pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai konsumsi seluruh anggota masyarakat. Perilaku konsumsi kemudian disebut sebagai ukuran **kemakmuran**.

Selain analisis deskriptif di atas mengenai perbandingan antar komponen PDRB menurut penggunaan, beberapa analisis lanjut dapat dikembangkan adalah dengan menggunakan kombinasi antara komponen PDRB dengan variabel lain, seperti halnya terhadap pendapatan dan *output* (keluaran). Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat diturunkan dari perhitungan PDRB penggunaan maupun pada masing-masing komponennya akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya

a. Konsumsi Rumah Tangga

Dari data komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan analisis, antara lain mengenai laju pertumbuhan, peranan (*share*) terhadap PDRB total, *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dan *Average Propensity to Consume* (APC) serta fungsi konsumsi.

1. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)

Laju pertumbuhan PKRT diukur dari data pertambahan pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan (pengaruh harga dihilangkan) pada tahun tertentu dibandingkan dengan data konsumsi tahun sebelumnya. Data ini memberi informasi besar kecilnya pertumbuhan konstan atau kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk suatu region.

2. Peranan (*Share*) Terhadap Total PDRB

Peranan (*share*) PKRT terhadap total PDRB, menginformasikan berapa persen PDRB yang tercipta dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di suatu daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin maju suatu negara, maka peranan konsumsi penduduknya semakin kecil dan sebaliknya jika semakin terbelakang suatu negara maka peranan konsumsinya semakin besar. Di negara maju dimana pendapatan tinggi, sebagian besar dari pendapatan digunakan untuk investasi. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima penduduk cukup tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup.

Di samping itu pola konsumsi di negara maju adalah produktif, yaitu konsumsi yang banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kestabilan harga, kesempatan kerja dan sebagainya. Sebaliknya di negara berkembang, di samping pendapatan yang diterima penduduk rendah, pola pengeluarannya pun bersifat konsumtif, yaitu pendapatan yang diterima hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok (*basic need*) seperti makanan, pakaian dan perumahan.

3. *Marginal Propensity to Consume*

Persamaan Dasar : $Y_d = C + S$

Y_d = Pendapatan yang siap dibelanjakan
 C = Pengeluaran konsumsi
 S = Tabungan (*saving*)

$$\delta Y_d = \delta C + \delta S$$
$$1 = \frac{\delta C}{\delta Y_d} + \frac{\delta S}{\delta Y_d}$$

$\frac{\delta C}{\delta Y_d}$ = Bagian kenaikan pendapatan (*income*) yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi (*Marginal Propensity to Consume/MPC*).

$\frac{\delta S}{\delta Y_d}$ = Bagian kenaikan pendapatan/*income* yang dialokasikan untuk tabungan (*Marginal Propensity to Saving/MPS*).

$\delta C < \delta Y_d \Rightarrow \frac{\delta C}{\delta Y_d}$ positif dan lebih kecil dari (<) 1.

maka, $0 < MPC < 1$

Jika pendapatan (*income*) meningkat maka porsi pendapatan (*income*) yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi menurun.

4. *Average Propensity to Consume*

Persamaan Dasar : $Y_d = C + S$

$$1 = \frac{C}{Y_d} + \frac{S}{Y_d}$$

$\frac{C}{Y_d}$ = Menunjukkan porsi total *income* yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*).

$\frac{S}{Y_d}$ = Menunjukkan porsi total pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan/*saving* (*Average Propensity to Saving/APS*).

Jika pendapatan meningkat maka APC akan turun sedangkan APS meningkat.

5. Elastisitas Pengeluaran Terhadap Pendapatan

ε = Perubahan proporsional dalam pengeluaran yang diakibatkan oleh perubahan persentase pendapatan.

$$\varepsilon = \frac{\text{PerubahanPersentasePengeluaran}}{\text{PerubahanPersentasePendapatn}}$$

$$\varepsilon = \frac{(C_2 - C_1)/C_1}{(Y_2 - Y_1)/Y_1}$$

$$\varepsilon = \frac{C_2 - C_1}{C_1} \times \frac{Y_1}{Y_2 - Y_1}$$

$$\varepsilon = \frac{C_2 - C_1}{Y_2 - Y_1} \times \frac{Y_1}{C_1}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \times \frac{Y_1}{C_1}$$

di mana C adalah konsumsi dan Y adalah pendapatan.

Elastisitas pengeluaran digunakan untuk mengetahui tingkat reaksi pengkonsumsian suatu komoditi akibat kenaikan pendapatan rumah tangga sebesar satu persen.

6. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Nilai PKRt per kapita diukur dari data pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku atau konstan pada tahun tertentu dibagi dengan data penduduk pertengahan tahun. Data ini memberi informasi tentang seberapa besar nilai rata-rata konsumsi penduduk selama satu tahun.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain berfungsi sebagai regulator dan fasilitator pemerintah juga merupakan konsumen akhir yang perilaku permintaannya akan mempengaruhi struktur penyediaan domestik. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara simultan. Begitu pula dengan transfer yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang juga akan mempengaruhi struktur ekonomi wilayah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki peran dominan apabila sebagian besar

kegiatan ekonomi di suatu region sebagian besar masih diselenggarakan oleh pemerintah ketimbang swasta.

Kaidah yang dikenal sebagai hukum *Wagner* menjelaskan bahwa ada korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional, yang secara implisit bisa juga berlaku untuk regional. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan aktivitas produksi yang secara langsung juga akan meningkatkan pendapatan regional. Selanjutnya peningkatan pendapatan regional tersebut akan meningkatkan dan memperluas potensi pajak. Dengan kata lain, bila pengeluaran pemerintah meningkat maka dana pemerintah meningkat pula, yang utamanya memang bersumber dari pajak.

Dalam kenyataannya pengeluaran pemerintah yang meningkat dalam jumlah besar belum tentu selalu berakibat baik bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan dari pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah adalah:

- Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB.
- Perbandingan pengeluaran rutin terhadap pengeluaran pembangunan.
- Komposisi pengeluaran rutin.

Biasanya efisiensi selalu dikaitkan dengan masalah kehematan, atau dalam kata lain dengan biaya yang sekecil-kecilnya diharapkan dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Efisiensi tidak harus selalu berarti harus menurunkan level pengeluaran, khususnya pengeluaran rutin; karena yang penting adalah bagaimana menekan biaya serendah mungkin untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Analisa yang dapat dikembangkan dari data pengeluaran konsumsi pemerintah antara lain adalah analisa APBD seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 TP &= PD - PR \Rightarrow \text{dinamis absolute} \\
 DAP &= AP - TP \Rightarrow \text{dinamis relatif} \\
 BLN &= DAP
 \end{aligned}$$

di mana,

$$\begin{aligned}
 TP &= \text{Tabungan Pemerintah} \\
 PD &= \text{Penerimaan Domestik} \\
 PR &= \text{Pengeluaran Rutin} \\
 DAP &= \text{Defisit Anggaran Pembangunan} \\
 AP &= \text{Anggaran (Pengeluaran Pembangunan)} \\
 BLN &= \text{Bantuan Pemerintah Pusat / Luar Negeri}
 \end{aligned}$$

$$G = G_f + G_d$$

$$\begin{aligned}
Gd &= G - Gf \\
R &= Rf + Rd \\
Rd &= R - Rf \\
Gf + Gd &= Rf - Rd \\
Gd - Rd &= Rf - Gf \\
Gd - Rd &= \text{Pengeluaran Neto Domestik}
\end{aligned}$$

di mana:

$$\begin{aligned}
G &= \text{Pengeluaran Pemerintah} \\
R &= \text{Penerimaan Pemerintah} \\
Gf &= \text{Bunga/cicilan pinjaman pemerintah daerah dan transfer lainnya} \\
Gd &= \text{Pengeluaran Rutin + Pembangunan}
\end{aligned}$$

Dampak Neto Anggaran (Dn A)

Perkembangan “Dn A” dari tahun ke tahun memberi indikasi terhadap pengaruh APBN sebagai pemicu laju pertumbuhan ekonomi.

$$Dn A = Gd - Rd$$

$$Ratio Dn A = \frac{Dn A}{PDRB} \times 100\%$$

$$Ratio Gd = \frac{Gd}{PDRB} \times 100\%$$

c. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan modal tetap bruto menggambarkan bagian dari realisasi investasi fisik yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi produksi di suatu wilayah. PMTB adalah barang/jasa yang digunakan secara berulang-ulang dalam proses produksi dan tidak habis digunakan dalam suatu periode yang relatif panjang. PMTB yang diperlakukan sebagai *input* tidak langsung (*indirect input*) dalam berbagai aktivitas produksi mempunyai hubungan yang sinergis dengan penciptaan *output* maupun nilai tambah atau pendapatan, di suatu wilayah.

Salah satu analisis yang dapat diturunkan dari komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah: *incremental capital output ratio (ICOR)*. Model ini merupakan besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan

satu unit *output*⁷⁹, yang identik dengan ukuran produktivitas. Disamping untuk melihat tingkat produktivitas kapital ICOR juga dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam penggunaan berbagai barang modalnya. Produktivitas dan efisiensi ini merupakan dua formula ukuran yang saling melengkapi.

Cara menghitung besarnya ICOR adalah sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{K_t - K_{t-1}}{Y_t - Y_{t-1}}$$

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

$$ICOR = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

$$ICOR = \frac{I_t}{Y_{t+1} - Y_t}$$

di mana K = Stok Modal
 I = Investasi = Pembentukan Modal Tetap Bruto
 Y = PDRB

Bila ICOR sama dengan 0,5 artinya untuk menaikkan satu unit *output* dibutuhkan tambahan kapital 0,5 unit. Bila ICOR = 2,5 maka untuk menaikkan satu unit *output* dibutuhkan tambahan kapital 2,5 unit. Data PMTB yang digunakan disini adalah dari perhitungan atas harga konstan.

d. Ekspor dan Impor

Transaksi ekspor dan impor ini menggambarkan bagaimana perilaku pelaku ekonomi domestik melakukan transaksi dengan luar wilayah. Ekspor dan impor yang direkam sebagai kegiatan perdagangan antar wilayah ini mempunyai dampak terhadap penciptaan cadangan moneter satu wilayah. Apabila ekspor menambah cadangan moneter maka sebaliknya impor akan mengurangi cadangan moneter. Apabila ekspor lebih besar dari impor maka akan terjadi aliran moneter masuk, begitu pula sebaliknya. Analisis yang biasa dikembangkan pada tingkat nasional yaitu berkaitan dengan pemanfaatan data

79 *Output* dapat dilihat dari dua sisi, pertama adalah *output* dalam arti total keluaran dan yang kedua adalah nilai tambah. Untuk kepentingan penyusunan indikator makro yang umum digunakan adalah nilai tambah

ekspor dan impor antara lain adalah analisis rasio perdagangan internasional (RPI) dan efek nilai tukar perdagangan luar negeri.

a. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

RPI menunjukkan apakah neraca perdagangan lebih banyak didominasi oleh transaksi ekspor atau impor.

Formulasi RPI adalah sebagai berikut:

$$RPI = \frac{X - M}{X + M}$$

Koefisien RPI berkisar antara $-1 < RPI < 1$

Jika berkisar -1 , maka perdagangan internasional didominasi impor.

Jika berkisar $+1$, maka perdagangan internasional didominasi ekspor.

b. Efek Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri/Daerah

Nilai tukar perdagangan luar negeri (*Term of Trade*) sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga ekspor dan impor.

Langkah-langkah menghitung Term of Trade (ToT)

1. Menghitung indeks harga ekspor dan impor (IHPB_x dan IHPB_y).

2. Menentukan Indeks Nilai Tukar = $\frac{IHPB_x}{IHPB_y} \times 100\%$

3. Menentukan kapasitas impor (= kemampuan mengimpor barang-barang dari luar negeri) berdasarkan nilai ekspor.

$$C_m = \frac{X(\text{berlaku})}{IHPB_m} \times 100\%$$

4. Menghitung efek nilai tukar perdagangan luar negeri

$$ENT = C_m - X(\text{konstan})$$

5. Menentukan Pendapatan Domestik Bruto (GDY)

$$GDY = PDRB + ENT$$

Catatan:

Dengan melakukan beberapa penyesuaian, analisis di atas juga bisa digunakan untuk menganalisis perdagangan ke luar daerah.

Analisis yang menyajikan parameter-parameter dalam formulasi yang relatif sederhana tersebut di atas sangat bermanfaat bagi para perencana pembangunan di tingkat wilayah untuk mengukur kinerja hasil pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Tentu saja masih dapat dirumuskan model-model lain yang dikaitkan dengan hasil pengukuran PDRB baik dari sisi sektoral maupun penggunaan. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa model-model indikator ekonomi makro yang dibangun disini lebih menekankan pada aspek riil daripada moneter.

Sebagaimana diketahui, data PDRB selain disajikan menurut sisi produsen/sektoral disajikan pula menurut penggunaan. Analisis dari kedua sisi pandang tersebut tentunya mempunyai makna yang berbeda. Apabila sisi sektoral lebih menekankan pada masalah penciptaan nilai tambah⁸⁰ oleh berbagai sektor ekonomi, maka sisi penggunaan lebih menekankan pada masalah penggunaan dari pendapatan yang diciptakan tersebut. Yang dimaksud dengan penggunaan di sini adalah penggunaan akhir yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi makro seperti rumah tangga, pemerintah, sektor produksi (produsen) dan luar negeri.

Komponen penggunaan akhir yang direalisasikan oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut meliputi transaksi konsumsi barang dan jasa, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori serta ekspor barang dan jasa. Untuk mengukur kemampuan ekonomi domestik maka impor harus pula diperhitungkan yaitu dengan cara mengurangi posisinya dari total domestik. Oleh sebab itu untuk dapat memenuhi kepentingan region (provinsi) maka transaksi tersebut harus lebih diperluas untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh pemerintah dibedakan menurut pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekspor dan impor dibedakan menurut transaksi dalam negeri (antar-wilayah luar region) dan luar negeri (internasional).

Dalam kaitannya dengan pengukuran PDRB penggunaan pada tingkat regional maka dipandang perlu untuk menggunakan asumsi-asumsi mengingat terbatasnya

berbagai informasi (data) yang tersedia di lapangan. Asumsi tersebut tentunya akan mempengaruhi atau melatarbelakangi analisis yang akan disajikan. Sebagai contoh, secara konseptual total ekspor antar-provinsi seharusnya sama dengan total impor antar-provinsi, meskipun dalam kenyataannya tidak. Dengan demikian ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yang perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk kepentingan analisis pada tingkat region (provinsi) akan dilakukan penyesuaian terhadap teknik dan model analisis berdasarkan pada kategori data yang tersedia, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis model statistik-ekonomi lainnya. Analisis deskriptif akan lebih menekankan pada kajian sederhana yang berkaitan dengan fenomena ekonomi yang terjadi, yang tidak terlepas dari proses pengumpulan, pengolahan serta penyajian datanya, sedangkan analisis model statistik ekonomi akan menggunakan model-model ekonomi sederhana dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik yang berlaku.

5.4 . Perbedaan Dengan Data Nasional (PDB)

Apabila dicermati dalam penghitungan PDRB, hampir tidak terdapat perbedaan antara provinsi dalam tata cara melakukan kompilasi data tersebut. Kondisi ini bisa dimengerti karena metode penghitungan maupun struktur data dasar yang tersedia antar-wilayah relatif sama. Tetapi apabila hasil pengukuran PDRB provinsi-provinsi tersebut dijumlahkan dan kemudian dibandingkan dengan data PDB (nasional), nampak terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan data tunggal yang berasal dari satu sumber yang sama pun bisa berbeda, seperti halnya konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi, perbedaan ini nampak terjadi pada seluruh komponen penggunaan akhir, yang terbesar terdapat pada komponen perubahan stok. Secara konseptual, seharusnya jumlah PDRB dari seluruh provinsi akan sama dengan PDB tingkat nasional, atau jumlah PDRB dari seluruh kabupaten akan sama dengan PDRB di tingkat provinsi, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Apabila penjumlahan komponen PDB dimulai dari level bawah dan secara otomatis level di atasnya hanya merupakan hasil penjumlahan tersebut, maka berlaku konsep ini; tetapi apabila pengukurannya dilakukan secara independent, di mana masing-masing PDRB maupun PDB menggunakan tatacara dan prosedur yang berbeda, maka dimungkinkan terjadi perbedaan yang pada akhirnya menyebabkan munculnya diskrepansi

80 Dari sisi yang berbeda diartikan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya .

statistik⁸¹.

Perbedaan atau kesenjangan yang terjadi selama ini perlu diperkecil dengan cara memperbaiki mutu data dasar maupun prosedur dalam penyusunan PDRB maupun PDB. Banyak hal yang menyebabkan perbedaan tersebut di antaranya penentuan jenis produk, wujud produk (unit satuan), pendekatan pengukuran, metode estimasi (khususnya harga konstan), asumsi yang digunakan, rasio-rasio yang diolah dari hasil survei, perlakuan untuk imputasi, serta sumber data. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat multi-nasional, multi-regional, multi-aktivitas, serta multi produk merupakan faktor-faktor lain yang juga menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut. Dengan demikian maka perbedaan yang terjadi masih dapat ditolerir, sejauh faktor-faktor penyebabnya dapat teridentifikasi dan dijelaskan. Selain itu, perbedaan statistik yang terjadi sebaiknya harus dijaga dalam interval yang wajar (rasional). Diterbitkannya panduan ini diharapkan dapat memperkecil perbedaan hasil perhitungan PDB maupun PDRB tersebut.

81 Lihat perbedaan statistik yang terjadi antara total PDRB dan PDB pada setiap tahun penghitungan

<http://www.bps.go.id>

BAB VI P E N U T U P

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PDRB menurut penggunaan adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas hasil perhitungan PDRB dirasakan masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi antara data PDB penggunaan yang dibangun oleh BPS (pusat) dengan jumlah PDRB penggunaan hasil penghitungan provinsi/kabupaten. Perbedaan yang ditunjukkan melalui diskrepansi statistik ini terjadi di seluruh komponen penggunaan dengan besaran yang bervariasi antar-tahunnya.
- b. Selain perbedaan dengan PDB (nasional), perbedaan data PDRB ini juga terjadi antara sisi penyediaan (total sektoral) dan sisi penggunaan yang ditunjukkan oleh besaran-besaran pada komponen diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*).
- c. Karena hasil penghitungan PDB di pusat dengan PDRB dirasakan masih belum sejalan, maka dipandang perlu untuk membuat suatu panduan teknis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan data PDB dan PDRB penggunaan baik di pusat maupun daerah.
- d. Buku manual serupa sudah pernah diterbitkan sebelumnya dengan yang berbasis pada konsep-konsep dalam SNA'68. Untuk itu perlu dimutakhirkan dengan konsep-konsep yang terbaru (SNA'93).
- e. Dirasakan bahwa proses dalam mengaplikasikan konsep-konsep SNA'93 masih menemui kendala diseluruh wilayah baik di pusat maupun di daerah. Banyak hambatan yang dihadapi baik yang menyangkut definisi konsep, metode estimasi, sumber data, asumsi, dan kasus batas wilayah ekonomi, bahkan juga yang berkaitan dengan masalah-masalah non teknis lainnya.
- f. Dalam perkembangannya hampir seluruh negara di dunia mencoba untuk menggunakan konsep SNA'93 dalam membangun sistem neraca nasionalnya termasuk pula data PDB dan PDRB di dalamnya.
Diperbolehkannya setiap negara membangun perangkat tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan teknis, tetapi tetap menjaga standarisasi yang telah digariskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (UN).

- g. Buku pedoman ini hanya berupaya untuk menyajikan sebagian kecil dari konsep-konsep SNA'93, khususnya dalam membangun perangkat data PDRB dilihat dari sisi penggunaan atau pengeluaran.
- h. Dengan demikian diharapkan buku pedoman ini dapat menjembatani problem-problem yang timbul dalam upaya membangun sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) maupun sistem neraca regional Indonesia, (SNRI) khususnya data PDRB sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- i. Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak dalam menggunakan data PDB/PDRB penggunaan, disajikan pula model-model analisis sederhana yang menggunakan data PDRB menurut penggunaan sebagai basis data.
- j. Selanjutnya untuk membuat analisis yang dinamis perlu disertakan pula data (variabel) lain sebagai pendukung, di antaranya data rumah tangga, penduduk, termasuk data tenaga kerja dan data lain yang relevan.

Selanjutnya diberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penyempurnaan penyusunan PDRB menurut penggunaan sebagai berikut.

- a. Upaya untuk menyempurnakan tata cara dalam pengukuran PDRB menurut penggunaan ini harus tetap dilaksanakan. Kebutuhan berbagai parameter-parameter makro yang diturunkan dari sisi *demand* atau permintaan ini merupakan kebutuhan penting untuk mempelajari tatanan ekonomi dalam hal perilaku produksi, konsumsi maupun akumulasi.
- b. Penggunaan konsep-konsep SNA'93 disarankan untuk selalu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas data. Oleh karena itu untuk menyikapinya maka program penyempurnaan serta pembenahan data PDRB menurut penggunaan harus dilakukan secara gradual atau bertahap dengan memperhitungkan kondisi serta sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah.
- c. Baik data PDRB menurut lapangan usaha (sektoral), maupun PDRB menurut penggunaan dan bahkan juga PDRB menurut pendapatan merupakan barometer penting dalam mengukur perfoma suatu wilayah di bidang pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.
- d. Konsistensi data PDB nasional yang dibangun oleh BPS pusat maupun dengan PDRB yang dibangun oleh BPS daerah perlu dijaga tingkat akurasi

dan keselarasannya. Dengan demikian maka upaya untuk membangun perangkat data tersebut perlu kerjasama yang sinergi antara pusat dan daerah.

- e. Dukungan data dasar merupakan kunci keberhasilan dalam membangun perangkat data makro ini. Oleh karena itu kerja sama antar berbagai pihak sangat dibutuhkan apalagi banyak data yang harus diambil dari pihak-pihak lain baik dalam lingkungan unit kerja BPS maupun instansi lain seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat dan Daerah), Departemen/Dinas Perhubungan, dan departemen/dinas serta asosiasi-asosiasi terkait.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Indonesia
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Website: <http://www.bps.go.id>